

**LAPORAN STUDI KELAYAKAN USAHA
PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA**

PT SARIMELATI KENCANA, TBK

**No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020**

No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/X/2020

Jakarta, 12 Oktober 2020

Kepada :

Direksi PT Sarimelati Kencana, Tbk
Graha Mustika Ratu, Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta Selatan 12870

Perihal: Laporan Studi Kelayakan Usaha Perdagangan Eceran Melalui Media

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 039A/MSE-PB/KJPP/IX/2020, tanggal 4 September 2020, antara **PT Sarimelati Kencana, Tbk** ("Perseroan") dengan **KJPP Syarif, Endang, dan Rekan**, bersama ini kami sampaikan hasil penyusunan Studi Kelayakan Usaha Perdagangan Eceran Melalui Media.

Laporan ini merupakan hasil Studi Kelayakan Usaha yang mencakup Kajian Kelayakan Pasar, Kajian Kelayakan Teknis, Kajian Kelayakan Pola Bisnis, Kajian Kelayakan Model Manajemen, dan Kajian Kelayakan Keuangan.

Perseroan berencana akan melakukan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Melalui Media dengan kebutuhan biaya investasi mencapai Rp2.145.421.000,-. Adapun pemenuhan pendanaan untuk rencana usaha Perdagangan Eceran Melalui Media akan berasal dari modal sendiri.

Dari hasil studi ini, kami berpendapat bahwa Rencana Pengembangan Usaha Perdagangan Eceran Melalui Media oleh Perseroan **memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan. *Pendapat ini kami berikan dengan catatan semua asumsi yang diterapkan dalam Studi Kelayakan Usaha ini dapat dipenuhi.***

Persyaratan Atas Persetujuan Untuk Publikasi

Setiap publikasi terhadap keseluruhan atau sebagian dari laporan, atau referensi yang dipublikasikan, termasuk referensi yang terkait dengan objek penilaian harus mendapatkan persetujuan dari KJPP Syarif, Endang, dan Rekan. Adalah tidak dibenarkan untuk menerbitkan duplikat dokumen maupun pernyataan, edaran ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KJPP Syarif, Endang, dan Rekan, baik mengenai format cetak maupun konten dimana akan dipublikasikan.

Penutup

Penugasan untuk mempersiapkan Studi Kelayakan Usaha ini bukan dan tidak dapat dianggap dalam segala hal sebagai, *review* atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Penugasan kami tidak dilakukan untuk tujuan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal, kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan, segala bentuk implikasi pajak atau pelanggaran hukum. Studi Kelayakan Usaha ini juga tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana proyek atau untuk mengambil tindakan tertentu atas Rencana Kegiatan Usaha.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kepercayaan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih dan kami berharap kiranya laporan ini dapat berguna bagi kemajuan usaha selanjutnya.

Hormat kami,
KJPP SYARIF, ENDANG & REKAN

MSE
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Endang Sunardi, ST, MM, MAPPI (Cert)

Pemimpin Cabang

MAPPI No. : 09-S-02341
Izin Penilai No. : B-1.12.00340
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
STTD OJK No. : STTD.PB-08/PM.2/2018
STTD IKNB No. : 173/NB.122/STTD-P/2019

PERNYATAAN PENILAI

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan Usaha ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan Usaha ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 039A/MSE-PB/KJPP/IX/2020, tanggal 4 September 2020;
2. Penilai bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam rangka penugasan Studi Kelayakan Usaha, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini;
3. Analisis Kelayakan dilaksanakan per tanggal 30 Juni 2020, parameter dan data yang digunakan dalam analisis menggunakan data per 30 Juni 2020;
4. Penugasan penilaian telah dilakukan dengan pemahaman terhadap Objek Penilaian pada Tanggal Penilaian dan analisis telah dilakukan sesuai dengan Tujuan Penilaian sebagaimana diungkapkan dalam Laporan ini;
5. Laporan Studi Kelayakan Usaha ini tidak lepas dari ketentuan-ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018 dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Opini yang dihasilkan dalam penugasan ini telah disajikan sebagai Kesimpulan pada Laporan Studi Kelayakan Usaha ini;
7. Lingkup pekerjaan telah diungkapkan pada Ruang Lingkup dan data yang dianalisis serta data ekonomi dan industri yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian ini pada Sumber Data diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan;
8. Laporan ini menjelaskan semua asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam Laporan ini;
9. Kesimpulan telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
10. Pernyataan yang menjadi dasar analisis, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan di dalam Laporan ini adalah betul dan benar, sesuai dengan pemahaman terbaik;
11. Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan Usaha ini, Penilai juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Imbalan yang Penilai terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kesimpulan yang tercantum pada Laporan Penilaian ini;
12. Dalam melakukan penugasan ini, Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional dalam menyiapkan Laporan Studi Kelayakan Usaha; dan
13. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan ini, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Penilaian.

KJPP Syarif, Endang & Rekan menyatakan bahwa Para Penilai yang kami libatkan dalam penugasan Penilaian ini adalah Penilai profesional yang kompeten dan memiliki keahlian penilaian yang baik.

Jakarta, 12 Oktober 2020

No.	Nama	Tugas	Tanda Tangan
1.	Endang Sunardi, ST, MM, MAPPI (Cert) MAPPI No. : 09-S-02341 Izin Penilai No. : B-1.12.00340 Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis STTD OJK No. : STTD.PB-08/PM.2/2018 STTD IKNB No. : 173/NB.122/STTD-P/2019	Penanggung Jawab	 (.....)
2.	Meilindra Indriani, S.Si MAPPI No. : 14-T-05006	Reviewer	 (.....)
3.	Toyib Efendi, SE, M.Ec.Dev MAPPI No. : 09-P-02398	Staf Penilai	 (.....)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Studi Kelayakan Usaha Perdagangan Eceran Melalui Media

1.	Nama Perusahaan	PT Sarimelati Kencana, Tbk			
2.	Alamat Perusahaan	Graha Mustika Ratu, Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan 12870			
3.	Pendirian Perusahaan	Berdasarkan Akta Notaris No. 132, tanggal 16 Desember 1987 dari Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4573.HT.01.01.TH.88, tanggal 25 Mei 1988 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 1388 Tambahan No. 102, tanggal 20 Desember 1988			
4.	Bidang Usaha	Penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, pengangkutan dan pergudangan, perdagangan, dan industri pembuatan makanan			
5.	Rencana Usaha	Pengembangan usaha perdagangan eceran melalui media			
6.	Pemegang Saham	PT Sriboga Raturaya	:	1.957.933.250 lembar saham	64,79%
		DBS Bank Ltd. S/A Albizia ASEAN Opportunities Fund	:	191.534.500 lembar saham	6,34%
		Jeo Sasanto (Direktur)	:	173.600 lembar saham	0,01%
		Masyarakat (@ di bawah 5%)	:	872.233.650 lembar saham	28,86%
7.	Susunan Pengurus	Komisaris Utama	:	Hadian Iswara	
		Komisaris	:	Stephen James McCarthy	
		Komisaris Independen	:	Brata Taruna Hardjosubroto	
		Direktur Utama	:	Steven Cristopher Lee	
		Direktur	:	Jeo Sasanto	
		Direktur	:	Frederick Estrada Cadlaon	
		Direktur	:	Budi Setiawan	
8.	Maksud	Memperoleh aspek kelayakan berkenaan dengan Studi Kelayakan Usaha perdagangan eceran melalui media yang ditujukan untuk kepentingan pasar modal			

9.	Kebutuhan Biaya Investasi	No	Keterangan		Total (Rp.000)														
		I	PRA OPERASI																
			Perizinan		100.000														
			Google Credit – Pizza Hut		451.871														
			AWS Web Maintenance PHR		799.181														
			AWS Web Maintenance PHD		649.611														
			Doku Payment System		104.759														
			Sub Total		2.105.421														
		II.	MESIN DAN PERALATAN																
			Komputer (Hardware IT)		40.000														
			Sub Total		40.000														
		Total Investasi				2.145.421													
		10.	Biaya Investasi	Total biaya investasi adalah sebesar Rp2.145.421.000,- dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :															
				<table><tr><th rowspan="2">Keterangan</th><th rowspan="2">Total Biaya (Rp.000)</th><th colspan="2">Sumber Pembiayaan (Rp.000)</th></tr><tr><th>Loan</th><th>Equity</th></tr><tr><td>Investasi</td><td>2.145.421</td><td>0</td><td>2.145.421</td></tr><tr><td>Komposisi</td><td>100,00%</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td></tr></table>				Keterangan	Total Biaya (Rp.000)	Sumber Pembiayaan (Rp.000)		Loan	Equity	Investasi	2.145.421	0	2.145.421	Komposisi	100,00%
Keterangan	Total Biaya (Rp.000)	Sumber Pembiayaan (Rp.000)																	
		Loan	Equity																
Investasi	2.145.421	0	2.145.421																
Komposisi	100,00%	0,00%	100,00%																
11.	Laba Bersih dan Saldo Kas Akhir	Tahun	Laba Bersih (Rp.000)	Saldo Kas Akhir (Rp.000)															
		2021	5.167.458	4.855.669															
		2022	5.534.859	8.027.108															
		2023	5.772.571	13.643.229															
		2024	6.018.116	19.512.023															
		2025	6.271.715	25.627.572															
12.	Analisis Kelayakan Proyek																		
	NPV : Rp15.310.101.000,-																		
	PP : 11 bulan																		
	ROI : 17,57%																		
	PI : 1,92911																		
	BEP : Rp70.662.194.000,- atau 51,19% dari rata-rata penjualan																		
13.	Kesimpulan																		
	Berdasarkan kajian proyeksi keuangan yang telah dilakukan, dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan dapat terpenuhi maka rencana pengembangan usaha perdagangan eceran melalui media yang direncanakan oleh Perseroan memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.																		

DAFTAR ISI

SURAT		
PERNYATAAN PENILAI		
RINGKAN EKSEKUTIF		i – ii
DAFTAR ISI		iii – iv
DAFTAR TABEL		v – vi
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Laporan	I – 1
1.2	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	I – 3
1.3	Tanggal Penilaian (Cut Off Date)	I – 3
1.4	Pemberi Tugas	I – 3
1.5	Maksud dan Tujuan Kelayakan Usaha	I – 4
1.6	Sumber Data, Informasi, dan Prosedur yang Digunakan	I – 4
1.7	Ruang Lingkup Penugasan	I – 5
1.8	Asumsi–Asumsi dan Kondisi Pembatas	I – 6
1.9	Objek Analisis Studi Kelayakan Usaha	I – 8
1.10	Kejadian Setelah Tanggal Penilaian	I – 8
1.11	Standar Penilaian	I – 8
1.12	Kualifikasi Penilai	I – 8
1.13	Independensi Penilai	I – 8
1.14	Tenaga Ahli dan Hasil Tenaga Ahli yang Digunakan	I – 9
BAB II	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	II – 1
2.1	Profil Usaha Perseroan	II – 1
2.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	II – 1
2.1.2	Kegiatan Usaha Perseroan	II – 1
2.1.3	Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan	II – 2
2.1.4	Susunan Dewan Komisaris dan Direksi	II – 2
2.1.5	Struktur Organisasi	II – 2
2.1.6	Legalitas dan Izin Operasional	II – 3
2.2	Kinerja Keuangan Perseroan	II – 4
2.3	Merek Perseroan	II – 5
2.4	Aspek Lingkungan	II – 5
BAB III	KELAYAKAN PASAR	III – 1
3.1	Tinjauan Makro Ekonomi	III – 1
3.1.1	Tinjauan Ekonomi Global	III – 1
3.1.2	Kondisi Ekonomi Indonesia	III – 5
3.2	Informasi Industri	III – 10
3.3	Informasi Industri	III – 18

3.3.1	Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia	III – 18
3.3.2	Informasi Industri Makanan dan Minuman	III – 21
3.3.3	Pasar yang Dituju	III – 30
3.3.4	Pesaing	III – 30
3.3.5	Strategi Pemasaran dan Penjualan	III – 30
BAB IV	KELAYAKAN TEKNIS	IV – 1
4.1	Rencana Perseroan	IV – 1
4.2	Tampilan Website dan Aplikasi	IV – 1
4.3	Jenis Produk	IV – 2
4.4	Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak	IV – 10
4.5	Uraian Prosesa Perdagangan Eceran Melalui Media	IV – 10
4.6	Tenaga Kerja	IV – 12
4.7	Rencana Penyerapan Produk Perdagangan Online	IV – 12
4.8	Peraturan Perundang-Undangan yang terkait	IV – 12
BAB V	KELAYAKAN POLA BISNIS	V – 1
5.1	Keunggulan Kompetitif	V – 1
5.2	Kemampuan Pesaing untuk Meniru Produk/Jasa	V – 6
5.3	Kemampuan untuk Menciptakan Nilai	V – 6
BAB VI	KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN	VI – 1
6.1	Kebutuhan Manajemen dan Sumber Daya Manusia	VI – 1
6.2	Hak atas Kekayaan Intelektual	VI – 1
6.3	Faktor Risiko Utama	VI – 3
6.4	Kapasitas dan Kemampuan Manajemen	VI – 4
6.5	Kesesuaian Struktur Organisasi dan Manajemen	VI – 4
BAB VII	KELAYAKAN KEUANGAN	VII – 1
7.1	Persyaratan Modal dan Strategi Finansial	VII – 1
7.2	Sumber Pembiayaan Pengembangan Usaha	VII – 1
7.3	Asumsi-Asumsi Proyeksi Keuangan	VII – 2
7.4	Proyeksi Laporan Keuangan	VII – 3
7.4.1	Proyeksi Arus Kas	VII – 3
7.4.2	Proyeksi Laba Rugi	VII – 5
7.4.3	Proyeksi Posisi Keuangan	VII – 7
7.5	Analisis Rasio Proyeksi Keuangan	VII – 10
7.6	Analisis Kelayakan Proyek	VII – 10
7.7	Analisis Sensitivitas	VII – 11
7.8	Kesimpulan	VII – 11

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 Susunan Pemegang Saham Perseroan	II-2
Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi Perseroan (Rp.000)	II-4
Tabel 2.3 Laporan Posisi Keuangan Perseroan (Rp.000)	II-4

BAB III

Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto	III-3
Tabel 3.2 Harga Komoditas	III-4
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran (% , yoy)	III-5
Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (% , yoy)	III-7
Tabel 3.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2015-2019 (juta orang)	III-15
Tabel 3.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan (angkatan kerja), 2019	III-15
Tabel 3.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan (bukan angkatan kerja), 2019 (orang)	III-15
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Bandung (angkatan kerja), 2019	III-16
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Bandung (bukan angkatan kerja), 2019	III-17
Tabel 3.10 Persentase Banyaknya Porsi yang Dipesan pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Tempat Mengkonsumsi, Tahun 2018 (%)	III-21
Tabel 3.11 Persentase Banyaknya Porsi yang Dipesan pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Tempat Mengkonsumsi, Tahun 2018 (%)	III-22
Tabel 3.12 Persentase Banyaknya Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Lokasi Usaha dan Jenis Usaha, Tahun 2018 (%)	III-23
Tabel 3.13 Persentase Banyaknya Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar Menurut Jenis Usaha dan Status Badan Hukum, Tahun 2018 (%)	III-24
Tabel 3.14 Banyaknya Pekerja Pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan, Tahun 2018 (Orang)	III-25
Tabel 3.15 Pengeluaran Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran, Tahun 2018 (Rp Juta)	III-27
Tabel 3.16 Rata-rata Jumlah Pekerja, Pendapatan, dan Tempat Duduk Tersedia Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi, Tahun 2018	III-28
Tabel 3.17 Pendapatan Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Jenis Pendapatan Usaha,	

Tahun 2018 (Rp Juta)	III-29
Tabel 3.17 Daftar Kompetitor	III-30

BAB VII

Tabel 7.1 Kebutuhan Biaya Investasi	VII-1
Tabel 7.2 Komposisi Pembiayaan (Rp000)	VII-1
Tabel 7.3 Proyeksi Penjualan	VII-2
Tabel 7.4 Laporan Arus Kas Perseroan (Rp.000)	VII-4
Tabel 7.5 Laporan Laba Rugi Perseroan (Rp.000)	VII-6
Tabel 7.6 Laporan Posisi Keuangan Perseroan (Rp.000)	VII-8

DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perseroan	II-3
--	------

BAB III

Gambar 3.1 Aliran Modal	III-2
Gambar 3.2 PMI Manufaktur	III-2
Gambar 3.3 Volume Perdagangan Dunia	III-4
Gambar 3.4 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Rupiah	III-8
Gambar 3.5 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Rupiah	III-9
Gambar 3.6 Grafik Suku Bunga Kebijakan dan PUAB O/N	III-9
Gambar 3.7 Grafik Suku Bunga Deposito dan Kredit Perbankan	III-10
Gambar 3.8 Yield Obligasi Pemerintah (SBN) Tenor 10 Tahun	III-10
Gambar 3.9 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelamin 2015-2019	III-11
Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019	III-11
Gambar 3.11 Presentase Persebaran Penduduk Indonesia Tahun 2019	III-12
Gambar 3.12 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2019	III-13
Gambar 3.13 Peta Persebaran Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2019 (jiwa/km ²)	III-14

BAB IV

Gambar 4.1 Tampilan Website Pizza Hut	IV-1
Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi Pizza Hut	IV-2
Gambar 4.3 Combox	IV-2
Gambar 4.4 Pizza	IV-3
Gambar 4.5 Pasta & Rice	IV-4
Gambar 4.6 Appetizer	IV-5
Gambar 4.7 Drinks	IV-6
Gambar 4.8 Disert	IV-8
Gambar 4.9 Sarapan Pagi	IV-9
Gambar 4.10 Uraian Proses Perdagangan Eceran Melalui Media	IV-11

BAB V

Gambar 5.1 Pola Bisnis Perdagangan Eceran Melalui Media	V-5
---	-----

BAB VI

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Perseroan Stelah Pengembangan Usaha	V-5
--	-----

BAB VII

Gambar 7.1 Analisis Sensitivitas	VII-11
----------------------------------	--------

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan

Penyebaran COVID-19 memberikan tantangan bagi Pemerintah dalam upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia, meskipun pada Februari 2020 ekspor nonmigas masih tumbuh meningkat. Ekspor jasa, terutama sektor pariwisata, diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi nonbangunan berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi. Sementara itu, kinerja lapangan usaha yang terkait dengan konsumsi masih relatif baik, meskipun tidak setinggi prakiraan semula.

Pada bulan April 2020, Pemerintah mengatakan kinerja industri mulai terganggu dengan adanya pandemi virus corona. Bahkan ada beberapa industri yang harus terpaksa menghentikan aktivitasnya karena adanya pandemi virus corona. Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, salah satu sektor yang paling terdampak adalah pariwisata dan restoran. Tak tanggung-tanggung 70% sektor pariwisata dan restoran sudah mulai merasakan dampaknya dari mulai penurunan pendapatan hingga ada yang ditutup. Hal ini cukup wajar, mengingat masyarakat tidak bepergian kemana-mana selama pandemi corona. Apalagi, pemerintah juga melakukan pembatasan pada aktivitas orang baik dari dalam maupun luar negeri.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, mengatakan sudah ada ± 8.000 restoran di seluruh Pulau Jawa yang berada di mal tutup karena pusat-pusat perbelanjaan tempat mereka berjualan berhenti beroperasi.

Ini dihitung dari jumlah pusat perbelanjaan yang tutup di Jakarta sebanyak 77 mal. Sedangkan di dalam mal biasanya terdapat 30 restoran, belum lagi ada yang *stand alone* di luar. Sehingga total untuk DKI Jakarta sebanyak ± 4.700 restoran dan seluruh Pulau Jawa ada lebih dari ± 8.000 restoran.

Agar bisnis bisa bertahan hidup, Wakil Ketua Umum PHRI bidang Restoran mengatakan rata-rata penjualan beralih ke *online*. Mau tidak mau ada yang harus merubah menunya karena menu tersebut dinilai tidak cocok jika didiamkan terlalu lama. Terdapat beberapa jenis makanan yang memang enakya dihidangkan saat panas, seperti makanan Jepang yang saat ini diaplikasikan dalam bentuk *frozen* jadi dapat dibawa pulang dan dapat dipanaskan. Hal ini tentunya agar dapat diterima oleh konsumen karena tidak semua makanan bisa dikirim *online*.

Untuk mencoba menarik pembeli, beberapa pihak restoran juga tidak jarang menjual *voucher* dengan harga diskon. Meskipun cara tersebut dinilai tidak dapat menutupi pendapatan yang hilang selama ini. Hal ini dirasakan tidak terlalu efektif juga karena banyak pesaingannya, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang bikin juga usaha kuliner mandiri.

Perdagangan melalui media adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Perdagangan melalui media bisa dilakukan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau *smartphone*. Pada perdagangan melalui media, *Website* atau aplikasi digunakan sebagai pengganti toko *offline* yang mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan *online* dan pembayaran.

PT Sarimelati Kencana, Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1987 yang berdasarkan anggaran dasarnya menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, pengangkutan dan pergudangan, perdagangan, dan industri pembuatan makanan.

Pizza Hut adalah restoran pizza pertama yang hadir di Indonesia. Perseroan memperkenalkan Pizza Hut pada 1987 berdasarkan perjanjian dengan Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC. Sebagai penerima waralaba, Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan, memasarkan dan mengembangkan Pizza Hut di seluruh Indonesia.

Pizza Hut Restaurant (PHR) merupakan merek unggulan Perseroan. Pada tahun 2007, Perseroan meluncurkan Pizza Hut Delivery (PHD) dan menjadikannya restoran pertama di Indonesia yang menyediakan layanan pesan antar makanan.

Fasilitas pelayanan yang paling utama dari Perseroan yaitu sistem order atau pesan makanan melalui *hotline* khusus dan akan diantar ke rumah. Dengan perubahan gaya hidup masyarakat dan tren teknologi yang semakin berkembang saat ini, Perseroan telah melaksanakan fasilitas layanan penjualan produk-produk Pizza Hut melalui sarana media *online* (*online trading*) selama beberapa tahun terakhir. Dengan sarana *online trading* tersebut, konsumen dapat mengakses melalui *Website* atau Aplikasi dengan tujuan membeli dan membayar produk menu Pizza Hut. Fasilitas layanan melalui *online trading* tersebut diharapkan dapat menunjang daya saing dan bertujuan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("**Permendag 50/2020**"), para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menawarkan dan menjual berbagai jenis produk melalui media *online* (*online trading*) dipersyaratkan untuk melakukan penyesuaian dan pendaftaran terhadap perizinan berusaha yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan. Selanjutnya,

dengan merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha, kegiatan usaha perdagangan produk-produk makanan dan minuman yang dilakukan media telah dikategorikan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yakni KBLI 47911 Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Komedik dan Alat Laboratorium ("KBLI 47911"). Dalam hal ini, kegiatan usaha *online trading* yang telah dijalankan oleh Perseroan merupakan bagian kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori KBLI 47911 sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap perizinan usaha sebagaimana diatur di dalam Permendag 50/2020, yang dalam hal ini mensyaratkan adanya penyesuaian dan perubahan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan jenis bidang usaha yang diatur berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam rangka merealisasikan rencana tersebut, maka Perseroan memerlukan pihak independen untuk melakukan kajian dan analisis studi kelayakan usaha perdagangan eceran melalui media. Pihak independen yang ditunjuk untuk menyusun studi kelayakan usaha tersebut adalah **KJPP Syarif, Endang, dan Rekan** yang diharapkan dapat melakukan kajian secara objektif dan independen, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 039A/MSE-PB/KJPP/IX/2020, tanggal 4 September 2020.

1.2 Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian

No. Laporan : 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/X/2020
Tanggal Laporan : 12 Oktober 2020

1.3 Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*)

Analisis Studi Kelayakan Usaha dilaksanakan per tanggal 30 Juni 2020, parameter dan data yang digunakan dalam analisis menggunakan data per 30 Juni 2020.

1.4 Pemberi Tugas

Nama : PT Sarimelati Kencana, Tbk
Bidang Usaha : Penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, pengangkutan dan pergudangan, perdagangan, dan industri pembuatan makanan
Alamat Kantor Pusat : Graha Mustika Ratu, Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75
Jakarta Selatan 12870
Telepon : +62 21 830 6789
Fax : +62 21 830 6790

1.5 Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan Usaha

Maksud dan tujuan penugasan ini adalah untuk memperoleh aspek kelayakan berkenaan dengan pengembangan usaha perdagangan eceran melalui media yang ditujukan untuk kepentingan pasar modal.

1.6 Sumber Data, Informasi, dan Prosedur yang Digunakan

Data Internal

- Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja No. RPC-6141/PSS/2018, tanggal 9 April 2018.
- Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja No. 00312/2.1032/AU.1/05/1007-1/1/III/2019, tanggal 28 Maret 2019.
- Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja No. 00336/2.1032/AU.1/05/1563-1/1/III/2020, tanggal 31 Maret 2020.
- Laporan Keuangan per 30 Juni 2020.
- Laporan Tahunan 2018.
- Laporan Tahunan 2019.
- Legalitas Umum Perseroan.
- Hasil Wawancara langsung dengan Bapak Kurniadi Sulistyomo selaku Sekretaris Perusahaan.
- Hasil Wawancara langsung dengan Bapak Jeo Sasanto selaku Direktur Operasional.

Data Eksternal

- Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), data posisi akhir Juni 2020, dari Bank Indonesia.
- *Risk Free Rate from Government Bond Daily Watch, August 19, 2020, by: Daily Watch Danareksa.*
- *Country Default Spreads and Risk Premiums, Last updated : January 2020, by: Aswath Damodaran.*
- *Betas by sector, last updates January 2020, by: Aswath Damodaran.*
- Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2020, dari Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Pajak Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman.
- Statistik Indonesia 2020 dari BPS.
- Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, September 2019 dari BPS.
- Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman 2018, dari BPS.

Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan usaha ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

1. Kajian Kelayakan Pasar,
2. Kajian Kelayakan Teknis,
3. Kajian Kelayakan Pola Bisnis,
4. Kajian Kelayakan Model Manajemen, dan
5. Kajian Kelayakan Keuangan.

1.7 Ruang Lingkup Penugasan

Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha ("POJK 17/2020") dan peraturan otoritas jasa keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan sebagai perusahaan publik harus menunjuk Penilai Independen untuk melakukan kelayakan atas rencana pengembangan usaha Perdagangan Eceran Melalui Media.

Laporan Studi Kelayakan Usaha ini disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Studi Kelayakan Usaha ini hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam laporan ini dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain, serta tidak untuk bentuk rencana lainnya. Studi Kelayakan Usaha ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana proyek atau mengambil tindakan tertentu atas rencana tersebut.

Sedangkan lingkup penyusunan Studi Kelayakan Usaha secara garis besar meliputi:

1. Identifikasi masalah,
2. Analisis pendahuluan dan pengumpulan data,
3. Inspeksi ke lokasi,
4. Investigasi dan *interview* dengan manajemen,
5. Penyusunan laporan,
6. Draft laporan dan diskusi dengan manajemen, dan
7. Pelaporan Studi Kelayakan Usaha.

1.8 Asumsi–Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi Pokok

Laporan Studi Kelayakan Usaha ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen–dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai analisis dalam proses penilaian, data dan informasi yang disediakan manajemen Perseroan berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Studi Kelayakan Usaha ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disediakan oleh manajemen Perseroan yang telah kami telaah asumsinya sesuai dengan hasil diskusi dengan manajemen sehingga lebih mencerminkan kemampuan manajemen dalam mencapai target proyeksi keuangan.

Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kelayakan dan menurut pendapat kami Proyeksi Keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun kami tidak bertanggungjawab terhadap pencapaiannya.

Laporan Studi Kelayakan Usaha ini terbuka untuk publik terkecuali apabila terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Kami bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam rangka penugasan Studi Kelayakan Usaha. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Perseroan.

Kondisi Pembatas

Studi Kelayakan Usaha ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Studi Kelayakan Usaha ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung–jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut. Penelaahan, perhitungan dan analisis didasarkan atas data dan informasi yang diberikan manajemen Perseroan seperti tertera di Sumber Data dan Informasi.

Segala perubahan terhadap data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil Studi Kelayakan Usaha kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima

tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan tersebut.

Studi Kelayakan Usaha ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Studi Kelayakan Usaha tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Pendapat Kelayakan ini hanya dilakukan terhadap rencana tersebut seperti yang telah diuraikan di atas.

Studi Kelayakan Usaha ini tidak melihat secara konsolidasi usaha Perseroan seutuhnya namun terbatas pada unit usaha yang saat ini akan dijalankan. Dalam melakukan Penilaian, kami tidak mengacu pada laporan keuangan, sehingga kami tidak menggunakan laporan keuangan *audited* sebagai dasar perhitungan namun menggunakan proyeksi keuangan atas unit usaha yang akan dijalankan.

Studi Kelayakan Usaha yang kami susun hanya mengkaji kelayakan dari yang diatur sesuai dengan prosedur kerja kami dan tidak memperhitungkan status pemenuhan aspek legal dari proyek ini.

Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan Usaha sampai dengan tanggal dilakukannya rencana proyek tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha.

Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar rencana proyek yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap rencana proyek. Demikian pula bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu rencana yang diusung oleh Perseroan.

Penugasan untuk mempersiapkan Studi Kelayakan Usaha ini bukan dan tidak dapat dianggap dalam segala hal sebagai, *review* atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Penugasan kami tidak dilakukan untuk tujuan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal, kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan, segala bentuk implikasi pajak atau pelanggaran hukum.

Studi Kelayakan Usaha ini juga tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana proyek atau untuk mengambil tindakan tertentu atas rencana tersebut.

1.9 Objek Analisis Studi Kelayakan Usaha

Objek analisis Studi Kelayakan Usaha adalah berkenaan dengan Rencana penambahan bidang usaha baru, yakni Perdagangan Eceran Melalui Media dengan tanggal *cut off* per 30 Juni 2020.

1.10 Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Dari tanggal *cut off* yaitu tanggal 30 Juni 2020, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Studi Kelayakan Usaha secara signifikan.

Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

1.11 Standar Penilaian

Laporan Penilaian ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018 seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) serta peraturan-peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.12 Kualifikasi Penilai

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 758/KM.1/2012 tanggal 26 Juni 2012 mengenai Izin Penilai Publik Endang Sunardi, ST, MM, MAPPI (Cert) No. B-1.12.00340 dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Bisnis dan terdaftar sebagai penilai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam – LK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-08/PM.2/2018.

1.13 Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan Usaha ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan Usaha ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kelayakan yang dihasilkan dari proses analisis Studi Kelayakan Usaha ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja No. 039A/MSE-PB/KJPP/IX/2020, tanggal 4 September 2020.

1.14 Tenaga Ahli dan Hasil Tenaga Ahli yang Digunakan

Dalam melakukan Studi Kelayakan Usaha ini, Kami tidak menunjuk tenaga ahli khusus yang membantu proses analisis. Tenaga ahli yang digunakan adalah tenaga ahli penilai yang sehari-hari bekerja di KJPP Syarif, Endang & Rekan sendiri.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Usaha Perseroan

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Sarimelati Kencana, Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 132, tanggal 16 Desember 1987 dari Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4573.HT.01.01.TH.88, tanggal 25 Mei 1988 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 1388 Tambahan No. 102, tanggal 20 Desember 1988.

Pada tanggal 15 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-49/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum perdana ("IPO") sebanyak 604.375.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp1.100 per saham. Pada tanggal 23 Mei 2018, saham Perusahaan telah dicatat pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Surat No. S-03054/BEI.PP1/05- 2018 perihal Persetujuan Pencatatan Efek, tanggal 21 Mei 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 32 dari Aryanti Artisari, SH, M.Kn, tanggal 17 Juni 2020 terkait perubahan jenis Perseroan. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0285554, tanggal 13 Juli 2020.

Perusahaan memulai usaha komersilnya di tahun 1987. Perusahaan mengoperasikan "Pizza Hut" di bawah perjanjian lisensi dengan Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC.

Perusahaan berkedudukan di Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 8, Jakarta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perusahaan mengoperasikan masing-masing 516 dan 451 gerai "Pizza Hut" di Jakarta dan kota lain di Indonesia (tidak diaudit).

2.1.2 Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, pengangkutan dan pergudangan, perdagangan, dan industri pembuatan makanan.

2.1.3 Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Susunan Pemegang Saham Perseroan

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Rp	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Sriboga Raturaya	1.957.933.250	195.793.325.000	64,79%
	DBS Bank Ltd. S/A	191.534.500	19.153.450.000	6,34%
2.	Albizia ASEAN Opportunities Fund			
3.	Jeo Sasanto (Direktur)	173.600	17.360.000	0,01%
4.	Masyarakat (@ di bawah 5%)	872.233.650	87.223.365.000	28,86%
	Jumlah	3.021.875.000	302.187.500.000	100,00%

Sumber: Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2019

2.1.4 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 30, tanggal 17 Juni 2020, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hadian Iswara
Komisaris : Stephen James McCarthy
Komisaris Independen : Brata Taruna Hardjosubroto

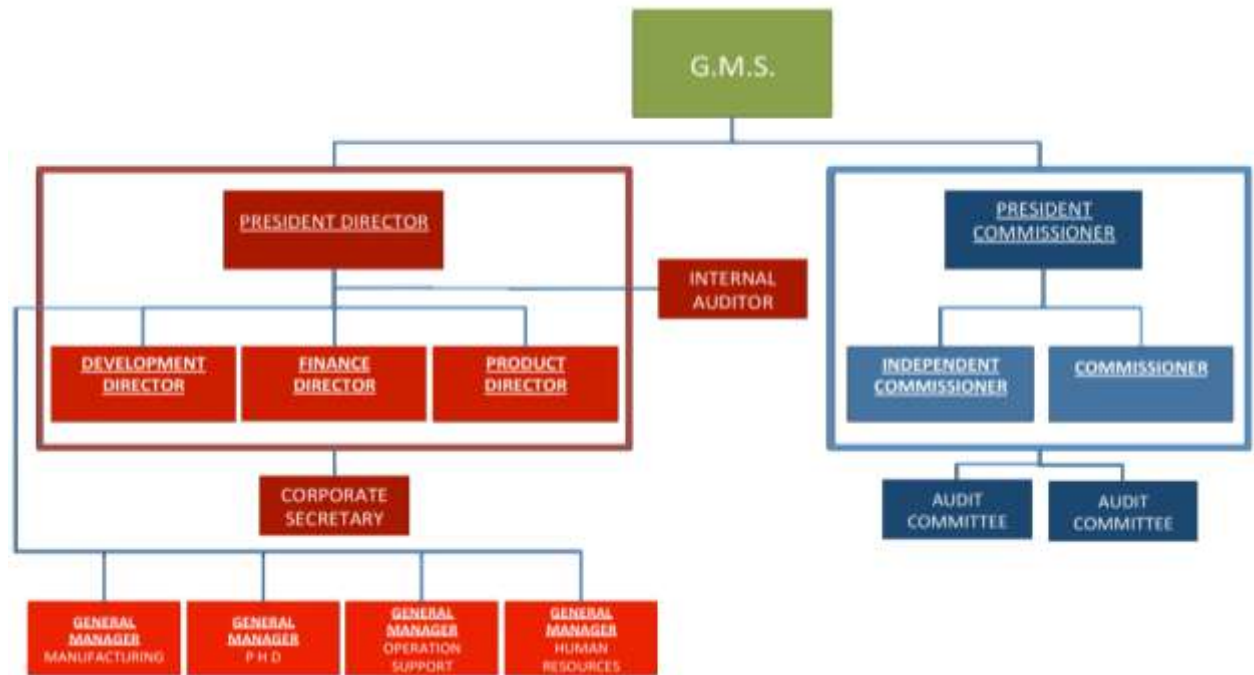
Direksi

Direktur Utama : Steven Cristopher Lee
Direktur : Jeo Sasanto
Direktur : Frederick Estrada Cadlaon
Direktur : Budi Setiawan

2.1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan dalam menjalankan usahanya selama ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Manajemen Perseroan

2.1.6 Legalitas dan Izin Operasional

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan memiliki dokumen perizinan usaha dan legalitas lainnya yang dikeluarkan oleh instansi terkait antara lain :

- Akta Pendirian No. 132, tanggal 16 Desember 1987 dari Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH.
- Pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4573.HT.01.01.TH.88, tanggal 25 Mei 1988 serta diumumkan dalam Berita Negara No.1388 Tambahan No.102, tanggal 20 Desember 1988.
- Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 32 dari Aryanti Artisari, SH, M.Kn, tanggal 17 Juni 2020.
- Akta Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0285554, tanggal 13 Juli 2020.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.323.964.5-092.000.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120102820776.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 391/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2017, tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam.

- Surat Keterangan Terdaftar No. S-13KT/WPJ.19/KP.0203/2018, tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-12PKP/WPJ.19/KP.0203/2018, tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

2.2 Kinerja Keuangan Perseroan

Berikut gambaran mengenai perkembangan kinerja Perseroan yang tergambar pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk setiap tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2015 sampai dengan 30 Juni 2020. Kinerja Perseroan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 merupakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi pada yang ditampilkan kembali pada Laporan Keuangan Audit pada 31 Desember 2017.

Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi Perseroan (Rp.000)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Juni-2020
	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Unaudited</i>
Pendapatan	2.493.741.525	2.695.314.276	3.027.006.714	3.573.974.086	3.986.701.142	1.818.354.492
Beban Pokok						
Pendapatan	832.170.763	872.600.656	1.001.536.144	1.181.118.333	1.303.369.747	634.659.672
Lab a (rugi) Kotor	1.661.570.762	1.822.713.620	2.025.470.570	2.392.855.753	2.683.331.395	1.183.694.820
Beban Usaha	1.539.390.634	1.615.826.726	1.802.953.632	2.135.312.032	2.408.876.931	1.156.908.485
Lab a (rugi) Usaha	122.180.128	206.886.894	222.516.938	257.543.721	274.454.465	26.786.335
Pendapatan (beban) lain-lain	(39.066.970)	(30.591.745)	(33.060.370)	(25.406.337)	(5.571.790)	(10.860.525)
Lab a (rugi) sebelum pajak	83.113.158	176.295.148	189.456.568	232.137.384	268.882.675	15.925.810
Pajak Penghasilan	(21.736.261)	(45.867.319)	(48.132.595)	(59.041.623)	(68.861.970)	(5.450.487)
Lab a (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	61.376.897	130.427.829	141.323.973	173.095.761	200.020.705	10.475.323

Sumber : Laporan Keuangan Perseroan

Tabel 2.3 Kinerja Posisi Keuangan Perseroan (Rp.000)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Juni-2020
	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Audited</i>	<i>Unaudited</i>
Aset						
Aset Lancar	372.805.783	397.891.244	515.282.456	817.048.392	614.630.361	543.610.913
Aset Tidak Lancar	673.589.808	753.801.026	978.722.623	1.213.138.567	1.494.541.549	1.818.793.250
Jumlah Aset	1.046.395.591	1.151.692.270	1.494.005.079	2.030.186.959	2.109.171.909	2.362.404.164
Liabilitas & Ekuitas						
Liabilitas Lancar	467.940.763	522.733.423	609.105.198	484.763.053	466.116.314	621.466.083
Liabilitas Tidak Lancar	291.193.637	290.378.033	515.203.723	332.848.607	303.180.161	486.324.355
Total Liabilitas	759.134.400	813.111.456	1.124.308.921	817.611.660	769.296.475	1.107.790.438
Ekuitas	287.261.191	338.580.814	369.696.158	1.212.575.299	1.339.875.434	1.254.613.726
Total Liabilitas&Ekuitas	1.046.395.591	1.151.692.270	1.494.005.079	2.030.186.959	2.109.171.909	2.362.404.164

Sumber : Laporan Keuangan Perseroan

2.3 Merek Perseroan

Pizza Hut Restaurants (PHR)

PHR merupakan merek unggulan Perseroan. Sebagai merek utama Perseroan, PHR menggunakan format restoran *full-service*. Per 31 Desember 2019, PHR memiliki total 258 restoran yang terletak di lebih dari 90 kota di seluruh Nusantara, yang sebagian besar berlokasi di Jabodetabek, Jawa dan Bali. Pada 2019, PHR memberikan 74% kontribusi penjualan kepada Perseroan.

Pizza Hut Delivery (PHD)

Perseroan meluncurkan Pizza Hut Delivery (PHD) pada 2007, sehingga menjadi restoran pertama di Indonesia yang menyediakan layanan pesan antar makanan. PHD berfokus pada '*food-to-go*' dengan menjamin pengantaran pizza dalam waktu 30 menit sejak pesanan dilakukan. Menu PHD pada dasarnya sama dengan yang ditawarkan PHR, namun diperlukan sedikit penyesuaian mengingat pentingnya menjamin kualitas dan kesegaran makanan di samping pengantaran dalam waktu yang relatif singkat.

2.4 Aspek Lingkungan

Pengembangan usaha ini masih tergolong dalam bidang usaha penyediaan makanan yang berpotensi memiliki limbah berupa limbah padat yang berasal dari sisa-sisa bahan makanan dan limbah cair. Pengolahan limbah perlu diperhatikan oleh perusahaan makanan, agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar, terutama limbah sampah dan air dari proses produksi, sampah seharusnya dipisah antara organik dan anorganik, sehingga memudahkan pengelolaannya, dan limbah air yang berupa sabun atau minyak sebaiknya dibuatkan bak penampungan tersendiri agar tidak mencemari tanah maupun sumber mata air warga di sekitar restoran.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan produk makanan/minuman yang dihasilkan/didistribusi oleh Perseroan merupakan produk yang selaku dalam kondisi baik, tidak berbahaya untuk dikonsumsi sehingga menghasilkan limbah yang ramah bagi lingkungan.

BAB III

KELAYAKAN PASAR

BAB III

KELAYAKAN PASAR

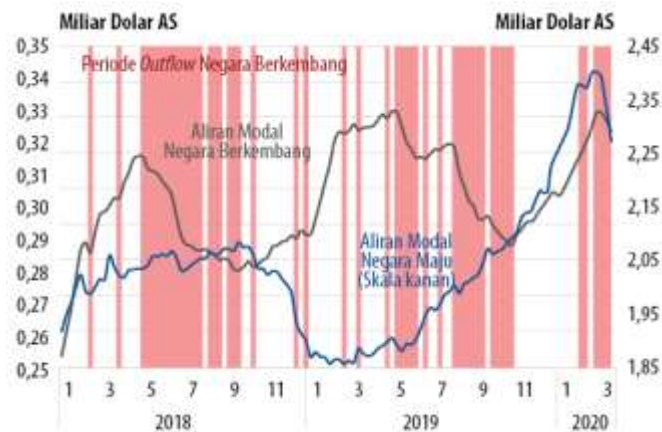
3.1 Tinjauan Makro Ekonomi

3.1.1 Tinjauan Ekonomi Global

Penyebaran COVID-19 di Tiongkok mereda, namun meluas cepat ke luar Tiongkok, termasuk Indonesia. Memasuki pertengahan Maret 2020, perkembangan COVID-19 di Tiongkok telah melewati puncaknya. Jumlah kasus dan *fatality rate* menurun dibarengi dengan tingkat kesembuhan yang meningkat. Perbaikan itu diikuti dengan mulai berjalannya kegiatan produksi di beberapa industri seperti tekstil, ban, dan *smelting*. Indikasi mulai pulihnya produksi juga dikonfirmasi oleh peningkatan konsumsi batu bara oleh kinerja pembangkit listrik utama di Tiongkok yang meningkat mendekati pola normalnya. Mobilitas penduduk di Tiongkok juga kembali normal, ditandai oleh meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah penerbangan domestik, serta kenaikan jumlah penduduk yang kembali ke kota besar setelah tahun baru Lunar. Namun demikian, penyebaran COVID-19 di luar Tiongkok semakin meluas ke 159 negara pada 18 Maret 2020, meningkat signifikan dibandingkan pada 22 Februari 2020 yang tercatat 29 negara. Penyebarannya tidak hanya terjadi di kawasan Asia, tetapi juga ke Eropa dan Amerika Serikat, sehingga WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemik global.

Meluasnya penyebaran COVID-19 semakin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan pembalikan modal ke aset keuangan yang dianggap aman serta menekan banyak mata uang dunia. Sejak akhir Februari 2020, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat tajam, tercermin pada perkembangan sejumlah indikator, seperti *Indeks Economic Policy Uncertainty* (EPU) dan indeks volatilitas (VIX) yang memburuk. Hal tersebut kemudian menekan pasar keuangan global dan memicu tingginya permintaan terhadap aset keuangan yang dianggap aman. *Yield US Treasury* (UST) dan *yield Japanese Government Bond* (JGB) terkoreksi tajam akibat tingginya permintaan. Harga emas dunia juga kembali meningkat seiring besarnya permintaan. Penyebaran COVID-19 memicu terjadinya aliran modal keluar di seluruh negara, terutama dari negara berkembang yang mengalami peningkatan risiko. Pembalikan modal tersebut kemudian menekan berbagai mata uang dunia, terutama mata uang negara berkembang.

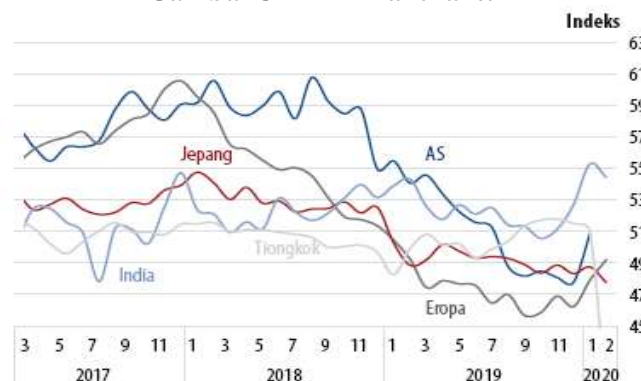
Gambar 3.1 Aliran Modal



Sumber: Bank Indonesia

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Dampak negatif COVID-19 tercermin pada perkembangan indikator dini yang menunjukkan penurunan. Kinerja manufaktur di mayoritas negara mengalami penurunan seperti tercermin pada penurunan *Purchasing Manager Index*. Selain itu, produksi dan konsumsi listrik menurun tajam yang mengindikasikan melemahnya aktivitas produksi di banyak negara yang kemudian berdampak pada rantai penawaran global. Rantai pasokan global turut terganggu akibat tertahannya aktivitas produksi di beberapa negara yang terdampak COVID-19 dengan adanya pembatasan mobilitas tenaga kerja dan terganggunya transportasi serta logistik. Permintaan dunia juga menurun akibat melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Secara keseluruhan, COVID-19 menekan kinerja perekonomian global melalui tiga jalur, yakni perdagangan (ekspor-impor), pariwisata, dan investasi.

Gambar 3.2 PMI Manufaktur



Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) dan Eropa terkoreksi lebih dalam. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada sebagian besar negara berkembang. Dengan dinamika yang berkembang saat ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 turun menjadi 2,5% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan proyeksi sebelumnya sebesar 3,0% (yoy), serta

kembali meningkat pada 2021 pasca berakhirnya COVID-19 menjadi 3,7% (yoy), lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya 3,4% (yoy). Prakiraan tersebut disertai dengan risiko ke bawah yang masih besar seiring dengan ketidakpastian dampak COVID-19 yang tinggi.

Perlambatan perekonomian Tiongkok bersumber dari penyebaran lokal yang menghambat kegiatan ekonomi domestik serta dampak rambatan perlambatan ekonomi negara mitra dagang yang terdampak COVID-19. Merebaknya COVID-19 ke luar Tiongkok menurunkan pertumbuhan ekonomi negara terkait yang berdampak pada melemahnya permintaan barang dari Tiongkok. Pada Februari 2020, ekspor berkontraksi akibat terganggunya kegiatan produksi dan transportasi pada saat kasus COVID-19 mencapai puncaknya. Konsumsi juga berkontraksi, tercermin dari penurunan penjualan jasa penyedia makanan (*catering*), perhiasan, otomotif, furnitur, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh melambat menjadi 5,1% (yoy) pada tahun 2020, lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy). Perekonomian Tiongkok diperkirakan berangsur membaik seiring meredanya COVID-19 yang telah mencapai puncaknya. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan mencapai 6,5% (yoy).

Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto

PDB	2018	WEO (IMF)						Consensus Forecast (CF)						Bank Indonesia					
		Oktober 2019			Januari 2020			Desember 2019			Januari 2020			Februari 2020			Maret 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Dunia	3,6	3,0	3,4	3,6	2,9	3,3	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	2,9	3,0	3,4	2,9	2,5	3,7
Negara Maju	2,3	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	1,5	1,7	1,7	1,0	2,2
Amerika Serikat	2,9	2,4	2,1	1,7	2,3	2,0	1,7	2,3	1,8	1,8	2,3	1,9	1,9	2,3	2,1	2,0	2,3	1,5	2,4
Kawasan Eropa	1,8	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,1	1,0	1,3	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	1,3	1,2	0,3	1,9
Jepang	0,8	0,9	0,5	0,5	1,0	0,7	0,5	1,0	0,2	0,8	1,0	0,4	0,8	0,8	0,4	0,7	0,7	-0,8	1,6
Negara Berkembang	4,5	3,9	4,6	4,6	3,7	4,4	4,6	4,3	4,6	4,9	4,3	4,6	4,7	3,7	3,9	4,4	3,7	3,4	4,6
Tiongkok	6,6	6,1	5,8	5,9	6,1	6,0	5,8	6,1	5,8	5,8	6,1	5,9	5,7	6,1	5,6	6,2	6,1	5,1	6,5
India	7,1	6,1	7,0	7,4	4,8	5,8	6,5	5,8	6,7	7,0	5,2	5,8	6,7	5,1	5,5	6,2	5,3	5,1	6,5
ASEAN-5	5,2	4,8	4,9	5,2	4,7	4,8	5,1	4,3	4,4	4,7	4,3	4,4	4,7	4,7	4,8	5,2	4,7	4,2	5,2
Amerika Latin	1,0	0,2	1,8	2,4	0,1	1,6	2,3	1,0	1,6	2,4	0,7	1,6	2,4	0,1	1,8	2,0	0,1	1,1	2,0
Emerging Europe	3,6	1,8	2,5	2,5	1,8	2,6	2,5	1,3	2,2	2,5	1,3	2,2	2,5	1,8	2,2	2,3	1,8	1,4	2,3
MENA, Afghanistan & Pakistan	1,8	0,1	2,7	2,7										0,1	2,0	2,1	0,1	1,3	2,1

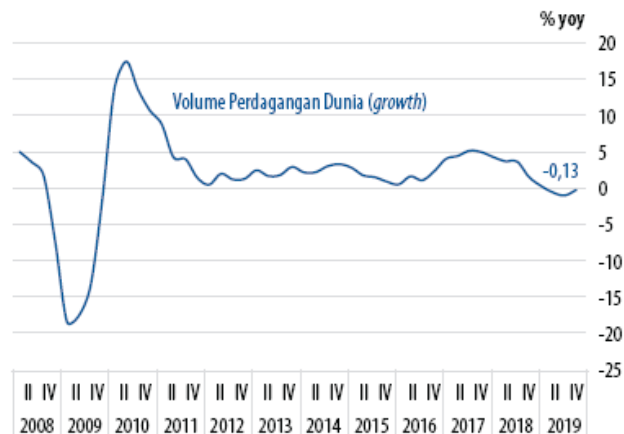
Sumber: Bank Indonesia

COVID-19 juga berdampak negatif terhadap perekonomian negara-negara Eropa. COVID-19 juga menyebar ke negara-negara Eropa, terutama Italia, Perancis, dan Jerman, yang merupakan penggerak utama perekonomian Eropa. Transmisi dampak ekonomi COVID-19 terhadap perekonomian negara-negara Eropa terjadi baik melalui dampak langsung, yakni berupa gangguan terhadap rantai pasokan serta penurunan permintaan dan keyakinan, maupun dampak tidak langsung, sebagai imbas dari perlambatan perekonomian global. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Eropa diperkirakan berlangsung hingga triwulan III 2020. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Eropa pada 2020 diperkirakan terkoreksi menjadi 0,3% (yoy). Perbaikan ekonomi Eropa diperkirakan terjadi pada tahun 2021 seiring dengan perkiraan berakhirnya pandemi COVID-19, yakni tumbuh 1,9% (yoy).

Volume perdagangan dunia berkontraksi seiring perlambatan ekonomi global. Permintaan barang-barang ekspor dan impor melemah, tercermin dari indikator transportasi perdagangan yang menurun. Ekspor negara-negara terdampak COVID-19 mulai tertahan

pada Januari 2020 sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi volume perdagangan dunia. Pada tahun 2020 volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kontraksi dan mulai meningkat pada tahun 2021 sejalan dengan perbaikan perekonomian global.

Gambar 3.3 Volume Perdagangan Dunia



Sumber: Bank Indonesia

Pelemahan ekonomi global mendorong harga komoditas terkoreksi ke bawah. Permintaan komoditas diperkirakan melemah seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi global. Koreksi harga komoditas semakin tajam seiring dengan sentimen negatif pelaku pasar yang meningkat karena ketidakpastian dampak COVID-19. Seluruh harga komoditas tumbuh negatif pada 2020. Harga komoditas logam seperti nikel, tembaga, aluminium, dan timah juga menurun akibat permintaan bahan baku industri yang menurun. Sejalan dengan hal tersebut, harga komoditas perkebunan yakni sawit dan karet juga mengalami penurunan. Harga minyak juga menurun akibat permintaan yang melemah di tengah potensi peningkatan pasokan. Pasokan minyak meningkat akibat tambahan produksi dari negara-negara non-OPEC yang tidak sepakat dengan perpanjangan pembatasan produksi minyak (*oil cuts*).

Tabel 3.2 Harga Komoditas

Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020 (YTD)*
Tembaga	-10,5	27,1	6,7	-7,8	-3,3
Batu Bara	6,8	48,2	2,5	-8,6	-0,2
CPO	21,3	5,7	-19,2	-2,3	26,0
Karet	-2,2	28,1	-16,8	12,4	-5,3
Nikel	-15,4	8,9	27,8	7,0	-6,2
Timah	13,1	13,1	0,5	-7,5	-10,1
Aluminium	-3,5	22,9	7,4	-14,1	-3,9
Kopi	4,3	-2,9	-15,4	-11,8	5,5
Lainnya	1,0	6,8	1,2	-0,7	-1,2
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	5,4	21,7	-2,8	-3,0	3,6

Sumber: Bank Indonesia

Berbagai kebijakan ditempuh untuk memitigasi dampak COVID-19. Sejumlah bank sentral dan otoritas fiskal merespon pandemi COVID-19 tersebut dengan kebijakan yang

akomodatif untuk memitigasi dampaknya terhadap perekonomian. Bank sentral di berbagai negara melakukan pelonggaran suku bunga kebijakan dan likuiditas. Sejak awal tahun hingga Maret 2020, sejumlah bank sentral di dunia telah menurunkan suku bunga acuan 25 bps hingga 150 bps. Pada bulan Maret 2020 The Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali dalam *intermittent meeting Federal Open Market Committee* (FOMC) pada 3 Maret 2020 dan 15 Maret 2020 masing-masing sebesar 50 bps dan 100 bps. Penurunan suku bunga acuan tersebut juga diikuti sejumlah bank sentral lain di negara maju dan berkembang. Bank sentral di berbagai negara juga menempuh kebijakan *Quantitative Easing* (QE) untuk menjaga likuiditas, di antaranya melalui *treasury* dan *Mortgage-Backed Securities* (*The Federal Reserve*), pemberian fasilitas pendanaan untuk Usaha Kecil Menengah (Bank of England dan Bank of Canada), serta fasilitas pembiayaan perusahaan (Bank of Japan). Sementara itu, otoritas fiskal di berbagai negara mengeluarkan stimulus untuk meminimalisasi dampak lanjutan COVID-19. Paket stimulus fiskal yang diluncurkan di berbagai negara mencakup penurunan tarif pajak, pinjaman lunak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stimulus untuk pariwisata dan sektor terdampak, serta kebijakan fiskal lainnya.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Penyebaran COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia, meskipun pada Februari 2020 ekspor nonmigas masih tumbuh meningkat. Ekspor jasa, terutama sektor pariwisata, diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara sejalan dengan upaya memitigasi risiko perluasan COVID-19. Investasi nonbangunan berisiko melambat dipengaruhi menurunnya prospek ekspor barang dan jasa serta terganggunya rantai produksi. Bank Indonesia mengapresiasi langkah stimulus fiskal Pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19, yang bersamaan dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0–5,4% menjadi 4,2–4,6% Pasca berakhirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2–5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran (% yoy)

Komponen	2017	2018				2018	2019				2019	2020*	2021*
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Konsumsi Swasta	4,94	4,96	5,17	5,00	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	4,5-5,0	4,9-5,4
Konsumsi Pemerintah	2,13	2,71	5,21	6,26	4,56	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	1,2-1,7	2,8-3,3
Investasi (PMTDB)	6,15	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	2,9-3,4	5,8-6,3
Ekspor	8,91	5,84	7,48	8,34	8,34	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	-5,8-5,3	5,9-6,4
Impor	8,06	12,46	14,94	13,77	13,77	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	-9,5-9,0	4,5-5,0
PDB	5,07	5,06	5,27	5,17	5,17	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	4,2-4,6	5,2-5,6

Sumber: Bank Indonesia

Prospek ekspor 2020 menurun dipengaruhi melambatnya ekonomi dunia akibat meluasnya penyebaran COVID-19, meskipun kinerja ekspor Februari 2020 masih meningkat. Seiring dengan meluasnya penyebaran COVID-19, revisi ke bawah dari sejumlah determinan ekspor, antara lain pertumbuhan ekonomi global, volume perdagangan dunia, dan harga komoditas, mengindikasikan prospek ekspor Indonesia yang menurun. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas ke berbagai negara mitra dagang Indonesia memberikan tekanan permintaan bagi produk ekspor barang Indonesia. Selain tekanan permintaan, penyebaran COVID-19 juga mengganggu rantai penawaran (*supply chain*) global. Pada sisi ekspor barang, kinerja ekspor nonmigas pada Februari 2020 masih tumbuh meningkat didorong oleh ekspor berbasis komoditas, seperti batu bara dan CPO, serta beberapa produk manufaktur. Di sisi lain, kinerja ekspor jasa diperkirakan mengalami tekanan sejalan dengan kinerja sektor pariwisata yang diperkirakan juga menurun akibat kebijakan restriksi perjalanan dari sejumlah negara. Hal tersebut tercermin dari penurunan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Februari 2020.

Konsumsi rumah tangga tetap berdaya tahan meskipun tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang tetap solid, ditopang oleh pendapatan yang diperkirakan tetap baik serta didorong oleh dampak positif stimulus fiskal dan penyelenggaraan Pilkada serentak di sejumlah wilayah. Daya beli konsumen turut ditopang oleh inflasi yang diperkirakan rendah dan stabil sepanjang 2020. Namun demikian, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, terdampak COVID-19 yang meluas. Kinerja ekspor termasuk sektor pariwisata yang menurun berpotensi menurunkan pendapatan dan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pendapatan lainnya yang bersumber dari pasar keuangan dan aset terindikasi menurun sejalan dengan penurunan kinerja pasar keuangan di tengah tingginya ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian yang tinggi juga memengaruhi tingkat keyakinan konsumen yang tercatat menurun pada Februari 2020.

Stimulus Pemerintah diarahkan untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Pemerintah telah mengumumkan stimulus yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp33,3 triliun sebagai langkah memitigasi dampak COVID-19 pada perekonomian. Stimulus yang terdiri dari stimulus jilid I dan jilid II difokuskan pada insentif perpajakan, insentif nonfiskal, insentif belanja, bantuan sosial, serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Stimulus jilid I yang diumumkan pada saat awal merebaknya COVID-19 ditujukan untuk memberikan insentif bagi dunia usaha yang terdampak COVID-19 dengan tetap mendukung konsumsi. Seiring meluasnya dampak COVID-19, Pemerintah mengumumkan stimulus jilid II melalui relaksasi perpajakan untuk mendorong belanja dan daya beli, relaksasi nonfiskal untuk mendorong lalu lintas perdagangan, serta kebijakan pangan untuk memastikan Pasokan. Bank Indonesia mengapresiasi langkah stimulus fiskal Pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19, yang diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi.

Investasi diperkirakan melambat pada 2020 sejalan dengan prospek ekspor yang melambat dan konsumsi swasta yang menurun. Melambatnya investasi terutama pada investasi

nonbangunan yang terdampak oleh menurunnya prospek ekspor, dan terganggunya rantai produksi. Sementara itu, pertumbuhan investasi bangunan diperkirakan tidak setinggi prakiraan semula seiring berkurangnya aktivitas konstruksi. Indikator dini investasi, antara lain penjualan semen, impor barang konstruksi, dan impor barang modal, berkontraksi lebih dalam hingga Februari 2020. Secara khusus, dalam jangka pendek, investasi terdampak oleh terganggunya investasi Tiongkok di beberapa wilayah Indonesia pasca merebaknya COVID-19. Ke depan, investasi diperkirakan membaik pada 2021 ditopang oleh upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi.

Sejalan dengan prospek ekspor yang turun dan permintaan domestik yang melambat, impor juga turun. Impor pada 2020 diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan dipengaruhi oleh melemahnya sisi permintaan untuk ekspor dan investasi. Kinerja impor juga tertekan lebih dalam dari sisi penawaran sebagai dampak gangguan pada rantai suplai global akibat meluasnya COVID-19. Hingga Februari 2020, penurunan impor terjadi pada seluruh kelompok barang, baik barang modal, bahan baku, maupun barang konsumsi. Secara khusus impor Indonesia dari Tiongkok mengalami kontraksi lebih dalam pada Februari 2020.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 yang diperkirakan lebih rendah tercermin pada turunnya kinerja seluruh LU, dengan kinerja LU yang terkait dengan ekspor dan impor serta investasi mengalami tekanan lebih dalam LU pertambangan diperkirakan akan mengalami kontraksi, sedangkan LU pertanian tumbuh melambat. LU industri pengolahan juga tumbuh melambat seiring prospek ekspor yang turun dan melambatnya investasi. Sementara itu, kinerja LU yang terkait dengan konsumsi masih relatif baik, meskipun tidak setinggi prakiraan semula. Pertumbuhan LU perdagangan dan penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman serta LU transportasi dan komunikasi masih relatif baik meskipun melambat, didorong permintaan domestik sedangkan LU konstruksi diperkirakan tumbuh melambat, sejalan dengan moderasi investasi. Aktivitas ekonomi yang diperkirakan melambat memengaruhi kinerja LU jasa keuangan dan jasa lainnya yang juga tumbuh melambat.

Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (% , yoy)

Komponen	2017	2018				2018	2019				2019	2020*	2021*
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Konsumsi Swasta	4,94	4,96	5,17	5,00	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	4,5-5,0	4,9-5,4
Konsumsi Pemerintah	2,13	2,71	5,21	6,26	4,56	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	1,2-1,7	2,8-3,3
Investasi (PMTDB)	6,15	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	2,9-3,4	5,8-6,3
Ekspor	8,91	5,84	7,48	8,34	8,34	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	-5,8-5,3	5,9-6,4
Impor	8,06	12,46	14,94	13,77	13,77	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	-9,5-9,0	4,5-5,0
PDB	5,07	5,06	5,27	5,17	5,17	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	4,2-4,6	5,2-5,6

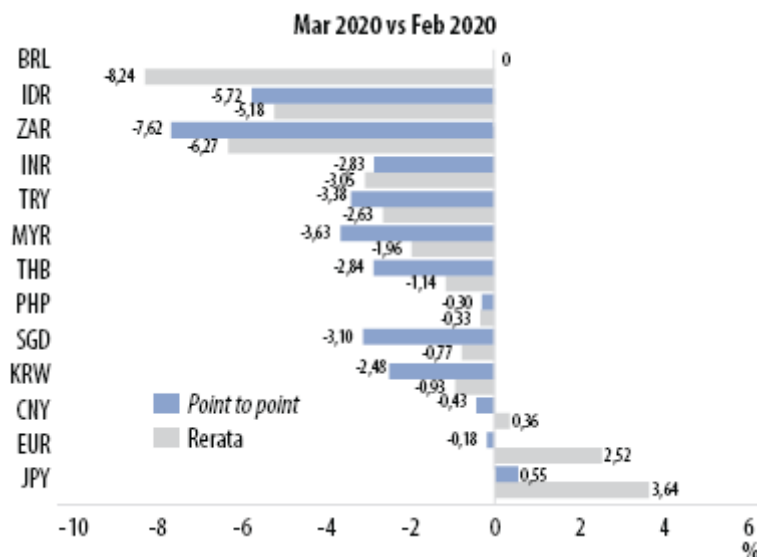
Sumber: Bank Indonesia

Inflasi

Penyesuaian aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik pasca meluasnya COVID-19 mulai menekan nilai tukar Rupiah. Pada Februari 2020, nilai tukar Rupiah secara

rerata mencatat depresiasi 0,38% dibandingkan dengan rerata level Januari 2020. Pelemahan Rupiah ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara peers yang dipicu oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait meluasnya COVID-19. Pada 18 Maret 2020, pelemahan Rupiah masih berlanjut sebesar 5,18% secara rerata atau 5,72% secara point to point dibandingkan Februari 2020. Pelemahan Rupiah tersebut didorong oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin meningkat pasca penyebaran COVID-19 yang kian meluas sehingga memicu peningkatan perilaku *risk-off* investor global. Hal ini mendorong terjadinya penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang ke aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman sehingga semakin menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, pelemahan nilai tukar Rupiah masih berlanjut seiring masih tingginya sentimen di pasar keuangan global terkait COVID-19.

Gambar 3.4 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

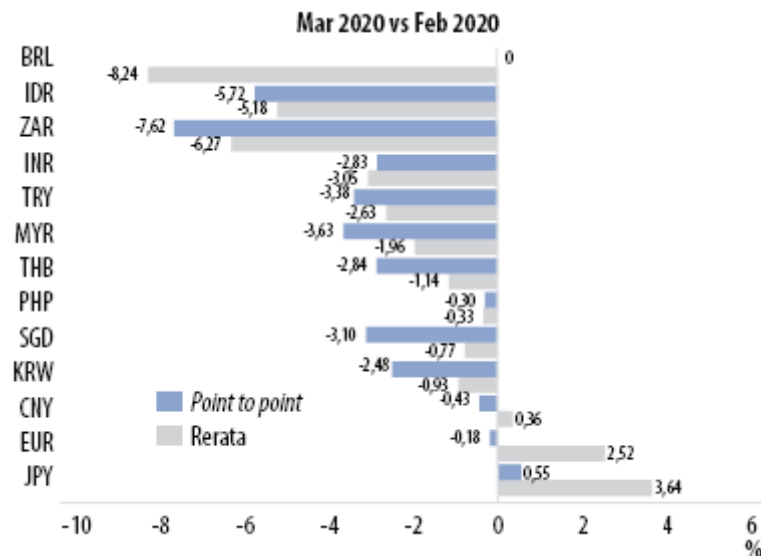


Sumber: Bank Indonesia

Nilai Tukar Rupiah

Penyesuaian aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik pasca meluasnya COVID-19 mulai menekan nilai tukar Rupiah. Pada Februari 2020, nilai tukar Rupiah secara rerata mencatat depresiasi 0,38% dibandingkan dengan rerata level Januari 2020. Pelemahan Rupiah ini sejalan dengan pelemahan mata uang negara peers yang dipicu oleh peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait meluasnya COVID-19. Pada 18 Maret 2020, pelemahan Rupiah masih berlanjut sebesar 5,18% secara rerata atau 5,72% secara point to point dibandingkan Februari 2020. Pelemahan Rupiah tersebut didorong oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin meningkat pasca penyebaran COVID-19 yang kian meluas sehingga memicu peningkatan perilaku *risk-off* investor global. Hal ini mendorong terjadinya penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang ke aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman sehingga semakin menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, pelemahan nilai tukar Rupiah masih berlanjut seiring masih tingginya sentimen di pasar keuangan global terkait COVID-19.

Gambar 3.5 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

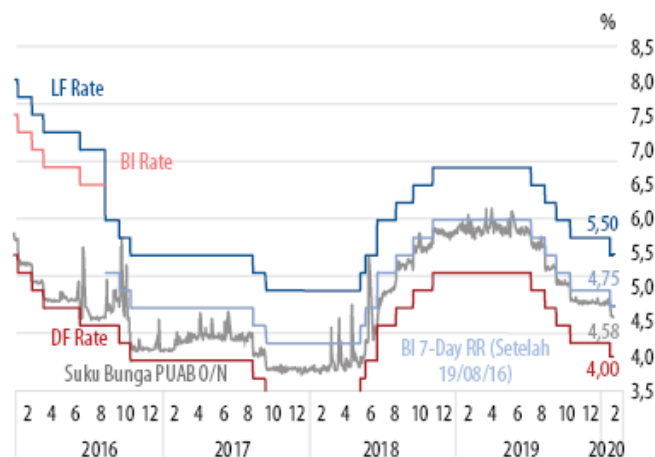


Sumber: Bank Indonesia

Pasar Keuangan

Pelonggaran kebijakan moneter dan strategi operasi moneter Bank Indonesia menopang transmisi kebijakan moneter ke suku bunga pasar uang hingga Februari 2020. Dari jalur suku bunga, suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) O/N telah turun sebesar 126 bps menjadi 4,58% selama periode pelonggaran kebijakan moneter.

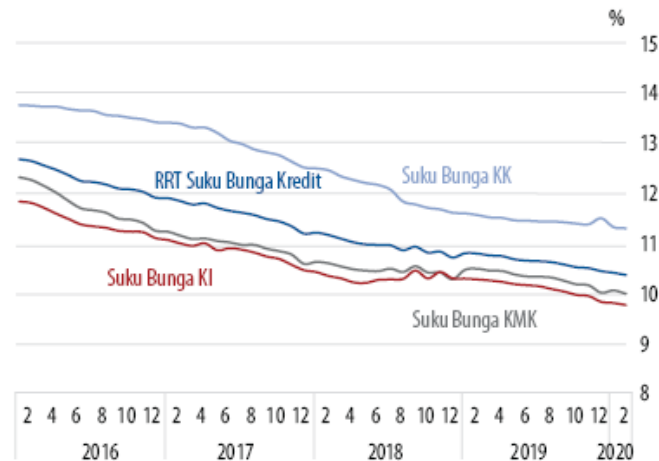
Gambar 3.6 Grafik Suku Bunga Kebijakan dan PUAB O/N



Sumber: Bank Indonesia

Suku bunga perbankan juga turun dimana rerata tertimbang suku bunga deposito yang tercatat 6,16% atau turun 67 bps sedangkan suku bunga kredit, terutama pada suku bunga kredit modal kerja turun 36 bps menjadi 10,07%. Namun demikian, meningkatnya faktor risiko di pasar keuangan menyebabkan *yield* Surat Berharga Negara (SBN) mengalami pembalikan arah di tengah penurunan suku bunga kebijakan.

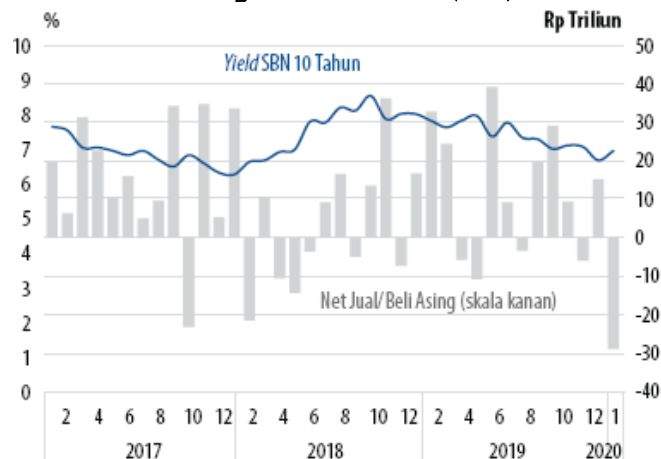
Gambar 3.7 Grafik Suku Bunga Deposito dan Kredit Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Yield SBN seri benchmark 10 tahun meningkat sebesar 27 bps ke level 6,95%. Sementara, tenor-tenor pendek masih melanjutkan tren penurunan Sementara itu, rerata *yield* obligasi korporasi peringkat AAA turun terbatas sebesar 5 bps ke level 7,02%. Sementara itu, likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai, tercermin pada rerata harian volume PUAB Februari 2020 yang tetap tinggi sebesar Rp14,02 triliun serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap besar yakni 21,47% pada Januari 2020.

Gambar 3.8 Yield Obligasi Pemerintah (SBN) Tenor 10 Tahun



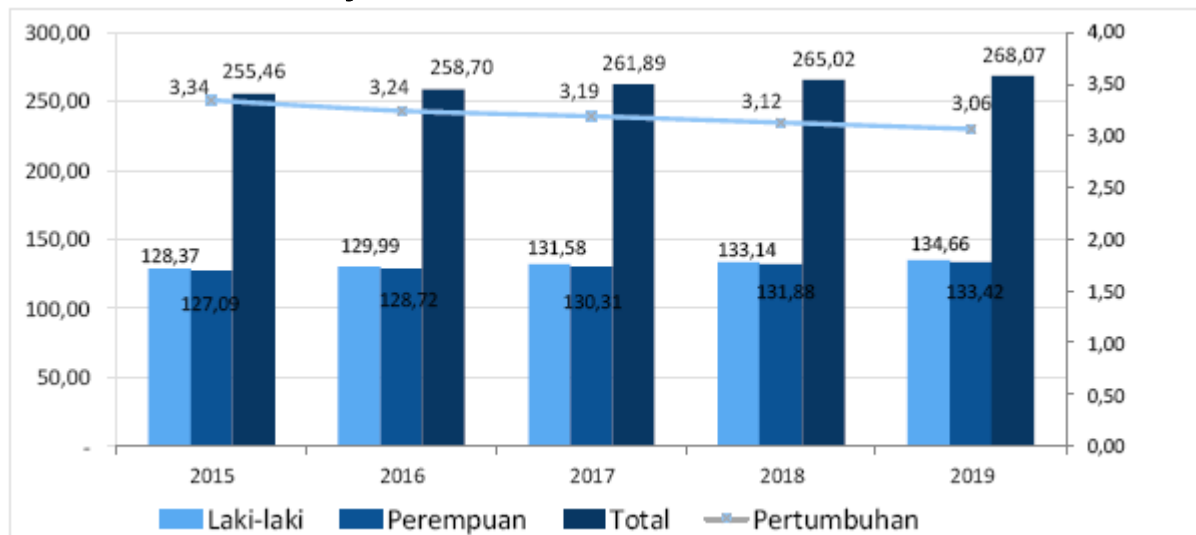
Sumber: Bank Indonesia

3.2 Perkembangan Penduduk dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 268.074.565 jiwa yang terdiri atas 133.136.131 jiwa penduduk laki-laki dan 133.416.946 jiwa penduduk perempuan. Memperlihatkan pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2015 – 2016 dari

3,34 juta per tahun menjadi 3,24 juta per tahun. Namun jika dilihat dari kurun waktu 2010 s.d 2019, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,31% per tahun.

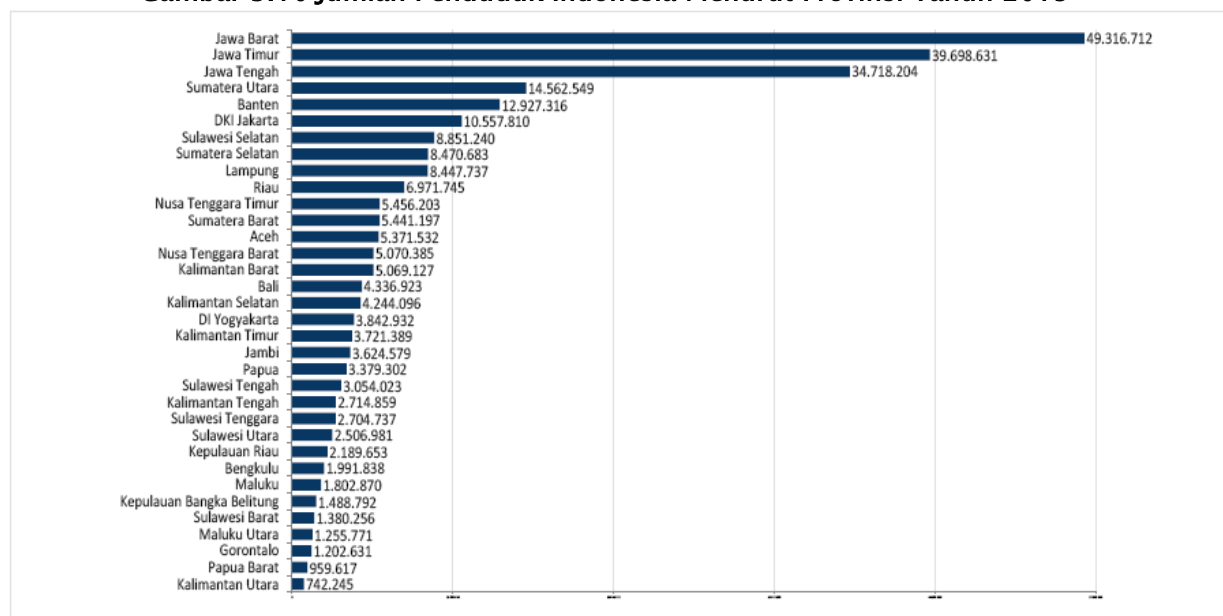
Gambar 3.9 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelamin 2015–2019



Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat (49.316.712 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kalimantan Utara (742.245 jiwa).

Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019

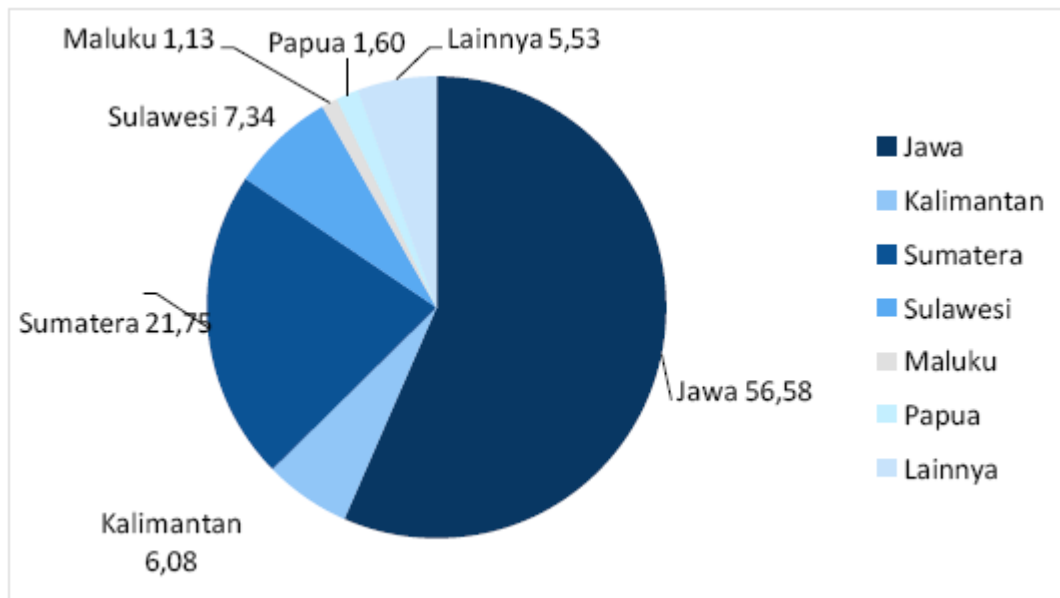


Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan

Pulau Jawa (56,58%) merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Daerah timur yaitu Pulau Maluku (1,13%) dan Papua (1,60%) merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran

populasi penduduk beberapa pulau besar di Indonesia dapat dilihat secara rinci pada gambar berikut.

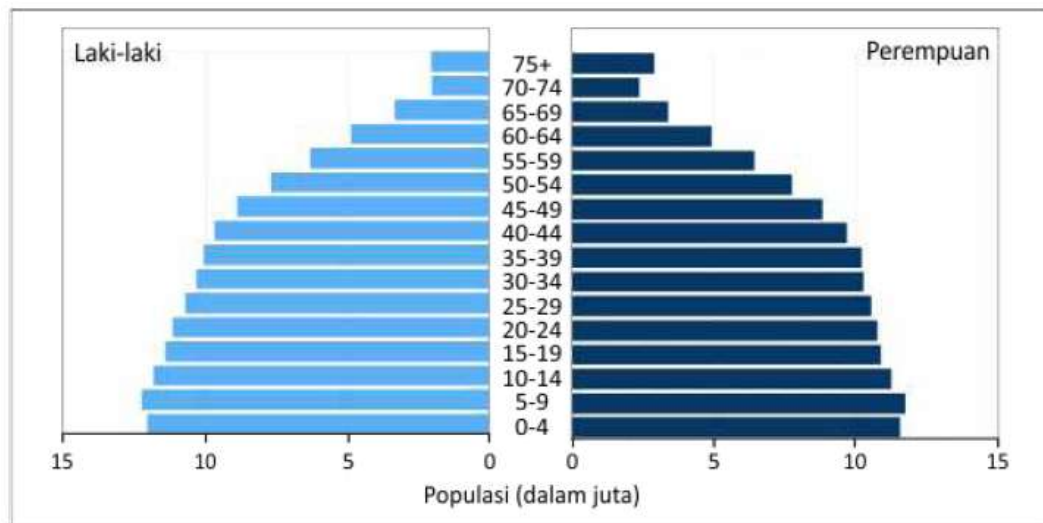
Gambar 3.11 Persentase Persebaran Penduduk Indonesia Tahun 2019



Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun sebuah piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan gambaran yang menyajikan komposisi data kependudukan suatu wilayah atau negara (kelompok umur dan jenis kelamin) dalam bentuk grafik batang yang digambarkan berlawanan arah dengan posisi horizontal. Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Gambar 3.12 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2019

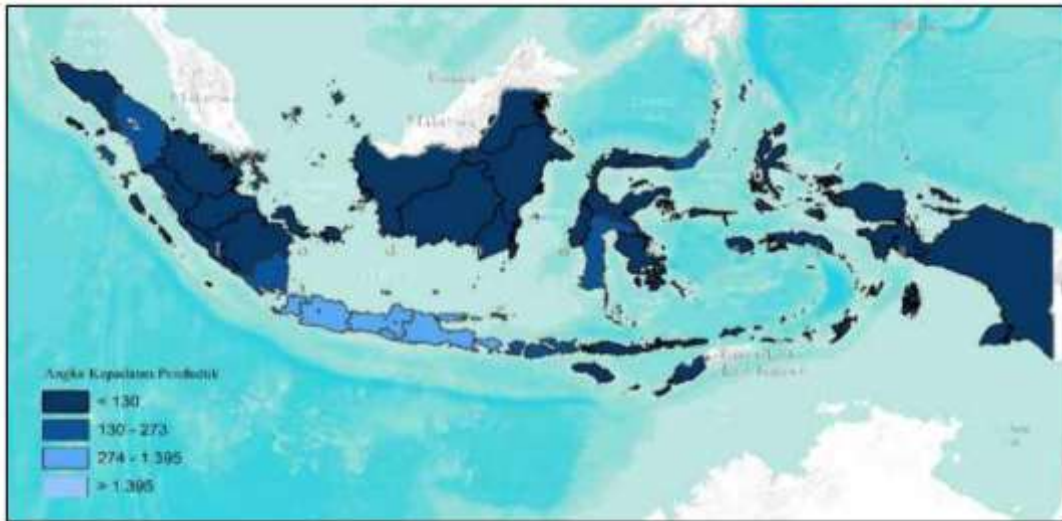


Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan

Piramida penduduk Indonesia pada gambar di atas berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0–14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Grafik pada usia muda lebih lebar dibandingkan bagian di atasnya membuktikan bahwa penduduk Indonesia memiliki struktur muda. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat persebaran penduduk suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2019 berdasarkan hasil estimasi sebesar 139,85 jiwa per km². Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.13 Peta Persebaran Kepadatan Penduduk Indonesia Tahun 2019 (jiwa/km²)



Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan

Berdasarkan konsep dari *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO), penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2016 sebanyak 127,67 juta orang menjadi 136,18 juta orang pada periode Februari 2019. Begitu pula dengan jumlah penduduk yang bekerja, meningkat dari 118,41 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 126,52 juta orang pada Agustus 2019. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan, dari 66,34% pada Agustus 2016 menjadi 67,49% pada Agustus 2019. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode Agustus 2016, jumlah pengangguran terbuka adalah 7,03 juta orang, meningkat menjadi 7,04 juta orang di periode Agustus 2017, menurun menjadi 7,00 juta orang di periode Agustus 2018, dan kembali meningkat menjadi 7,05 juta orang di periode Agustus 2019.

**Tabel 3.5 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2015–2019
(juta orang)**

Angkatan Kerja	2016		2017		2018		2019	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	127,67	125,44	131,54	128,06	133,94	131,01	136,18	133,56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,06	66,34	69,02	66,67	69,2	67,26	69,32	67,49
Jumlah Penduduk yang Bekerja	120,65	118,41	124,54	121,02	127,07	124,01	129,37	126,52
Jumlah Pengangguran Terbuka	7,02	7,03	7,01	7,04	6,87	7,00	6,82	7,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,61	5,33	5,50	5,13	5,34	5,01	5,28

Sumber: BPS

Tabel 3.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan (Angkatan Kerja), 2019 (orang)

Kelompok Umur	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja
15–19	4 642 273	327 969	1 291 931	1 619 900	6 262 173
20–24	12 733 253	1 038 363	1 318 447	2 356 810	15 090 063
25–29	14 931 797	675 297	480 441	1 155 738	16 087 535
30–34	15 153 947	409 196	148 236	557 432	15 711 379
35–39	15 499 555	278 859	79 799	358 658	15 858 213
40–44	15 244 779	245 407	78 697	324 104	15 568 883
45–49	14 094 685	206 257	55 090	261 347	14 356 032
50–54	12 042 459	161 985	40 819	202 804	12 245 263
55–59	9 284 674	99 564	23 179	122 743	9 407 417
60+	12 887 697	70 182	16 043	86 225	12 973 922
Jumlah	126 515 119	3 513 079	3 532 682	7 045 761	133 560 880

Tabel 3.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan (Bukan Angkatan Kerja), 2019 (orang)

Kelompok Umur	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
15–19	13 305 747	1 840 301	885 442	16 031 490	22 293 663
20–24	2 516 975	3 626 838	663 116	6 806 929	21 896 992
25–29	169 721	4 655 125	343 161	5 168 007	21 255 542
30–34	15 191	4 629 031	229 640	4 873 862	20 585 241
35–39	3 054	4 255 680	195 070	4 453 804	20 312 017
40–44	1 007	3 650 662	173 164	3 824 833	19 393 716
45–49	989	3 196 486	201 308	3 398 783	17 754 815

Kelompok Umur	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
50-54	NA	2 950 286	306 662	3 257 046	15 502 309
55-59	554	2 889 276	526 629	3 416 459	12 823 876
60+	228	8 521 197	4 598 259	13 119 684	26 093 606
Jumlah	16 013 564	40 214 882	8 122 451	64 350 897	197 911 777

Sumber: BPS

Tabel 3.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan (Angkatan Kerja), 2019

Provinsi	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja
Aceh	2 219 698	38 459	108 163	146 622	2 366 320
Sumatera Utara	6 681 224	191 274	191 164	382 438	7 063 662
Sumatera Barat	2 460 554	60 938	77 521	138 459	2 599 013
Riau	2 996 079	84 774	105 369	190 143	3 186 222
Jambi	1 691 782	27 903	46 062	73 965	1 765 747
Sumatera Selatan	3 968 499	72 720	113 198	185 918	4 154 417
Bengkulu	981 095	15 444	18 995	34 439	1 015 534
Lampung	4 077 930	97 938	73 517	171 455	4 249 385
Kepulauan Bangka Belitung	715 927	13 437	13 434	26 871	742 798
Kepulauan Riau	935 682	46 408	23 071	69 479	1 005 161
DKI Jakarta	4 836 977	185 198	135 703	320 901	5 157 878
Jawa Barat	21 902 958	976 759	924 739	1 901 498	23 804 456
Jawa Tengah	17 441 153	493 576	325 779	819 355	18 260 508
DI Yogyakarta	2 134 750	47 371	21 799	69 170	2 203 920
Jawa Timur	20 655 632	422 084	421 670	843 754	21 499 386
Banten	5 562 846	236 409	254 399	490 808	6 053 654
Bali	2 428 679	17 963	19 588	37 551	2 466 230
Nusa Tenggara Barat	2 387 036	55 121	29 395	84 516	2 471 552
Nusa Tenggara Timur	2 394 673	22 342	60 688	83 030	2 477 703
Kalimantan Barat	2 369 015	50 214	60 058	110 272	2 479 287
Kalimantan Tengah	1 327 885	24 796	31 994	56 790	1 384 675
Kalimantan Selatan	2 036 736	51 209	40 521	91 730	2 128 466
Kalimantan Timur	1 704 808	53 096	57 478	110 574	1 815 382
Kalimantan Utara	333 777	6 609	8 771	15 380	349 157
Sulawesi Utara	1 131 521	30 894	44 591	75 485	1 207 006
Sulawesi Tengah	1 439 759	22 619	24 183	46 802	1 486 561
Sulawesi Selatan	3 830 096	85 282	115 022	200 304	4 030 400
Sulawesi Tenggara	1 217 983	21 008	24 284	45 292	1 263 275
Gorontalo	562 087	9 537	14 272	23 809	585 896
Sulawesi Barat	641 613	11 895	9 159	21 054	662 667
Maluku	715 811	14 089	40 486	54 575	770 386
Maluku Utara	522 423	6 691	20 612	27 303	549 726

Provinsi	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja
Papua Barat	433 401	8 721	20 125	28 846	462 247
Papua	1 775 030	10 301	56 872	67 173	1 842 203
Indonesia	126 515 119	3 513 079	3 532 682	7 045 761	133 560 880

**Tabel 3.9 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan
(Bukan Angkatan Kerja), 2019**

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
Aceh	366 433	811 552	190 309	1 368 294	3 734 614
Sumatera Utara	896 494	1 727 347	376 381	3 000 222	10 063 884
Sumatera Barat	393 053	685 347	172 403	1 250 803	3 849 816
Riau	433 719	1 102 823	171 635	1 708 177	4 894 399
Jambi	230 368	568 003	107 813	906 184	2 671 931
Sumatera Selatan	513 966	1 204 189	249 416	1 967 571	6 121 988
Bengkulu	129 518	253 013	54 813	437 344	1 452 878
Lampung	446 459	1 275 054	179 186	1 900 699	6 150 084
Kepulauan Bangka Belitung	82 178	236 071	36 214	354 463	1 097 261
Kepulauan Riau	144 335	359 131	43 586	547 052	1 552 213
DKI Jakarta	669 463	1 768 476	362 618	2 800 557	7 958 435
Jawa Barat	2 805 512	8 472 764	1 501 393	12 779 669	36 584 125
Jawa Tengah	1 917 325	5 167 824	1 266 614	8 351 763	26 612 271
DI Yogyakarta	265 781	453 381	98 565	817 727	3 021 647
Jawa Timur	2 238 697	5 943 158	1 277 604	9 459 459	30 958 845
Banten	801 770	2 148 188	379 165	3 329 123	9 382 777
Bali	278 854	489 201	104 482	872 537	3 338 767
Nusa Tenggara Barat	289 990	682 301	156 589	1 128 880	3 600 432
Nusa Tenggara Timur	427 553	563 451	148 432	1 139 436	3 617 139
Kalimantan Barat	296 944	686 639	167 248	1 150 831	3 630 118
Kalimantan Tengah	163 231	391 328	48 004	602 563	1 987 238
Kalimantan Selatan	245 565	591 629	100 946	938 140	3 066 606
Kalimantan Timur	245 422	577 722	93 817	916 961	2 732 343
Kalimantan Utara	46 829	110 610	20 227	177 666	526 823
Sulawesi Utara	152 296	432 982	97 601	682 879	1 889 885
Sulawesi Tengah	181 615	442 792	88 350	712 757	2 199 318
Sulawesi Selatan	558 339	1 506 948	311 598	2 376 885	6 407 285
Sulawesi Tenggara	158 091	351 655	55 863	565 609	1 828 884
Gorontalo	73 481	184 652	32 706	290 839	876 735
Sulawesi Barat	71 383	189 554	33 043	293 980	956 647
Maluku	143 821	241 116	66 678	451 615	1 222 001
Maluku Utara	85 300	181 640	35 737	302 677	852 403
Papua Barat	71 341	120 382	23 128	214 851	677 098
Papua	188 438	293 959	70 287	552 684	2 394 887

Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
Indonesia	16 013 564	40 214 882	8 122 451	64 350 897	197 911 777

3.3 Informasi Industri

3.3.1 Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia

Pangsa Pengeluaran Pangan Sebagai Refleksi Dari Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan sampai ke tingkat perseorangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, beragam, dan terjangkau. Terdapat beberapa aspek dalam undang-undang tersebut yaitu ketersediaan pangan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal, keterjangkauan fisik dan ekonomi oleh masyarakat, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan (BKP, 2017).

Tercapainya ketahanan pangan merupakan salah satu bagian kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) selain mengakhiri kelaparan dan meningkatkan pertanian berkelanjutan (BKP, 2017). Pemerintah memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu pembangunan nasional dengan menyusun peraturan perundang-undangan untuk memperkuat tujuan yang akan dicapai tahun 2030. Implementasi tersebut dapat dilihat dari beberapa produk hukum diantaranya Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan sebesar Rp1.205.862,-. Dibandingkan dengan angka tersebut, sebanyak 16 provinsi memiliki rata-rata pengeluaran yang berada di atas angka nasional. Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.322.246,- sedangkan yang terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp800.619,-.

Sementara itu, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar 49,21 persen dan bukan makanan sebesar 50,79 persen. Hal ini secara langsung mengindikasikan bahwa secara nasional, pangsa pengeluaran pangan adalah sebesar 49,21 persen. Fenomena pangsa pengeluaran pangan yang kurang dari 50 persen ini mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk bukan makanan penduduk Indonesia sedikit lebih besar porsinya dibandingkan untuk makanan. Wilayah perdesaan dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 55,68 persen, cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang pangsa pengeluaran pangannya sebesar 45,97 persen.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan tertinggi yaitu sebesar 59,25 persen sedangkan yang terendah di Provinsi DI Yogyakarta dengan pangsa pengeluaran pangannya sebesar 38,62 persen. Selain Provinsi DI Yogyakarta yang

merupakan provinsi dengan tingkat ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, terdapat 16 provinsi lain yang memiliki pangsa pengeluaran pangan di bawah 50 persen yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu.

Pada wilayah provinsi dalam pulau/gugusan pulau yang sama juga masih terdapat variasi yang besar dalam pangsa pengeluaran pangannya. Di Pulau Sumatera, provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan tertinggi yaitu Provinsi Aceh sebesar 55,35 persen sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 46,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa di Pulau Sumatera penduduk Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih tinggi ketahanan pangannya dibandingkan penduduk Provinsi Aceh.

Pada pulau dengan penghuni terpadat yaitu Pulau Jawa, Provinsi DI Yogyakarta dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 38,62 persen merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan terendah sedangkan yang tertinggi adalah Provinsi Banten yaitu sebesar 50,42 persen. Secara tidak langsung terlihat bahwa di Pulau Jawa penduduk Banten masih jauh tertinggal tingkat ketahanan pangannya dibandingkan penduduk DI Yogyakarta.

Pada gugusan Pulau Bali dan Nusa Tenggara, provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan terendah adalah Provinsi Bali yaitu sebesar 43,14 persen sedangkan yang tertinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 59,25 persen. Hal ini menegaskan bahwa penduduk Provinsi Bali lebih tinggi ketahanan pangannya dibandingkan penduduk Nusa Tenggara Timur pada gugusan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan terendah yaitu sebesar 42,36 persen sedangkan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 52,78 persen.

Selanjutnya di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan terendah yaitu sebesar 46,23 persen sedangkan tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 51,40 persen. Pada wilayah paling timur Indonesia yaitu gugusan pulau Maluku dan Papua, Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan pangsa pengeluaran pangan terendah yaitu sebesar 50,54 persen sedangkan tertinggi di Provinsi Papua sebesar 54,14 persen.

Ragam Konsumsi dan Pengeluaran Beberapa Komoditas Makanan Penting

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki pola konsumsi dan pengeluaran yang berbeda satu sama lain terhadap beberapa komoditas pangan tertentu. Berdasarkan komoditas makanan yang terdapat pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional – Susenas, terdapat sekitar 20 komoditas makanan yang banyak dikonsumsi di setiap provinsi. Di antaranya adalah beras, tepung terigu, ketela pohon/singkong, ikan dan udang segar/diawetkan, daging sapi, daging ayam ras/kampung, telur ayam ras/kampung, susu kental manis, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tahu, tempe, minyak kelapa/goreng, kelapa, dan gula pasir.

Pada kelompok padi-padian, konsumsi beras per kapita sebulan tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 8,79 kg sedangkan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,98 kg. Sementara untuk pengeluarannya, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 94.576 rupiah per kapita sebulan sedangkan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 44.055 rupiah per kapita sebulan.

Ketela pohon sebagai salah satu komoditas dalam kelompok umbi-umbian, konsumsi per kapita sebulan tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 2,21 kg sedangkan terendah di Provinsi Aceh sebesar 0,11 kg. Sementara untuk pengeluarannya, tertinggi di Provinsi Papua sebesar 18.159 rupiah per kapita sebulan sedangkan terendah di Provinsi Aceh sebesar 421 rupiah per kapita sebulan.

Pada kelompok ikan/udang/cumi/kerang, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan yang tertinggi dalam mengonsumsi ikan dan udang segar per kapita sebulan, yaitu sebesar 3,26 kg sedangkan Provinsi Jawa Tengah merupakan yang terendah, yaitu sebesar 0,63 kg. Sementara untuk pengeluarannya, tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 92.458 rupiah per kapita sebulan sedangkan terendah di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 15.452 rupiah per kapita sebulan.

Sementara itu, daging ayam ras/kampung sebagai salah satu komoditas pada kelompok daging, konsumsi per kapita sebulan tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,89 kg sedangkan terendah di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,11 kg. Jika dilihat dari sisi pengeluaran per kapita sebulan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan pengeluaran tertinggi, yaitu sebesar 32.453 rupiah sedangkan yang terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5.006 rupiah.

Pada kelompok telur dan susu, konsumsi per kapita sebulan telur ayam ras/kampung tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 11,88 butir sedangkan yang terendah di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,45 butir. Sementara untuk pengeluaran per kapita sebulan komoditas tersebut, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 19.364 rupiah sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 7.057 rupiah.

Bawang merah sebagai salah satu komoditas dalam kelompok sayuran, konsumsi per kapita sebulan tertinggi terdapat di Provinsi Bali yaitu sebesar 3,62 ons sedangkan Provinsi Kalimantan Barat merupakan yang terendah, yaitu sebesar 1,28 ons. Sementara untuk pengeluarannya, Provinsi Papua menjadi yang tertinggi, yaitu sebesar 10.766 rupiah per kapita sebulan sedangkan terendah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3.348 rupiah per kapita sebulan. Pada komoditas sayuran lainnya yaitu cabai merah, konsumsi dan pengeluaran per kapita sebulan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 0,52 kg untuk konsumsinya dan 27.317 rupiah untuk pengeluarannya sedangkan terendah di Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 0,01 kg untuk konsumsinya dan 260 rupiah untuk pengeluarannya.

Pada kelompok minyak dan lemak, konsumsi per kapita sebulan komoditas minyak kelapa/goreng tertinggi di Provinsi Jambi, yaitu sebesar 1,28 liter sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 0,64 liter. Sementara untuk pengeluarannya,

tertinggi di Provinsi Papua, yaitu sebesar 22.401 rupiah per kapita sebulan sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 8.661 rupiah per kapita sebulan.

Pada kelompok bahan minuman, konsumsi per kapita sebulan gula pasir tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 8,27 ons sedangkan Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah, yaitu 2,50 ons. Sementara untuk pengeluarannya, tertinggi di Provinsi Papua yaitu sebesar 12.121 rupiah per kapita sebulan sedangkan terendah di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.420 rupiah per kapita sebulan.

3.3.2 Informasi Industri Makanan dan Minuman

Karakteristik Perusahaan/Usaha

Usaha penyediaan makanan dan minuman sekarang ini dapat menjadi salah satu sarana munculnya ikon kepariwisataan suatu daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui wisata kuliner khas daerah yang berdampak pada kepuasan wisatawan ketika mengunjungi suatu daerah. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai ikon kuliner yang sangat dikenal masyarakat adalah pempek Palembang, Yogyakarta dengan gudeg Yogya, Sulawesi Selatan dengan sop konro dan coto Makassar, wilayah Maluku dan Papua dengan makanan khas papeda. dan lain-lain.

Tabel 3.10 Jumlah Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar Menurut Provinsi (Unit Usaha)

No.	Provinsi	Restoran	Catering	PMM Lainnya	Total
1.	Aceh	21	1	13	35
2.	Sumatera Utara	191	8	70	269
3.	Sumatera Barat	68	8	29	105
4.	Riau	125	8	47	180
5.	Jambi	34	1	7	42
6.	Sumatera Selatan	132	11	22	165
7.	Bengkulu	18	–	4	22
8.	Lampung	39	3	9	51
9.	Kep.Bangka	19	1	3	23
10.	Kepulauan Riau	114	9	59	182
11.	DKI Jakarta	3.021	97	1.098	4.216
12.	Jawa Barat	1.231	107	456	1.794
13.	Jawa Tengah	289	22	101	412
14.	D.I. Yogyakarta	157	13	63	233
15.	Jawa Timur	640	76	283	999
16.	Banten	584	24	198	806
17.	Bali	408	12	137	557
18.	Nusa Tenggara	29	3	13	45
19.	Nusa Tenggara	25	–	11	36
20.	Kalimantan Barat	43	1	11	55

No.	Provinsi	Restoran	Catering	PMM Lainnya	Total
21.	Kalimantan Tengah	26	1	12	39
22.	Kalimantan Selatan	59	13	27	99
23.	Kalimantan Timur	109	38	26	173
24.	Kalimantan Utara	1	2	–	3
25.	Sulawesi Utara	47	2	15	64
26.	Sulawesi Tengah	4	–	2	6
27.	Sulawesi Selatan	150	15	93	258
28.	Sulawesi Tenggara	14	1	5	20
29.	Gorontalo	10	–	–	10
30.	Sulawesi Barat	2	–	–	2
31.	Maluku	20	2	5	27
32.	Maluku Utara	26	–	7	33
33.	Papua Barat	4	2	2	8
34.	Papua	20	4	8	32
Indonesia		7.680	485	2.836	11.001

Sumber: BPS

Untuk mengembangkan kegiatan pariwisata di suatu destinasi, dukungan usaha penyediaan makanan dan minuman yang memadai sangat diperlukan. Dukungan tersebut tidak hanya dari jumlah yang tersedia tetapi juga kualitas yang memadai, sehingga dapat melayani wisatawan dengan baik. Pada akhirnya bisa membuat wisatawan terkesan dan ingin datang kembali.

Usaha penyediaan makanan dan minuman mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "*self service*" atau restoran "*take away*", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Faktor yang menentukan adalah makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan, bukan berdasar fasilitas yang ditawarkan.

Tabel 3.11 Persentase Banyaknya Porsi yang Dipesan pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Tempat Mengonsumsi, Tahun 2018 (%)

No.	Provinsi	Konsumsi di Tempat	Dibawa Konsumen	Ojek Online
1.	Aceh	57,81	40,59	1,60
2.	Sumatera Utara	71,22	23,11	5,67
3.	Sumatera Barat	56,84	40,88	2,28
4.	Riau	62,08	31,98	5,94
5.	Jambi	78,95	16,05	5,01
6.	Sumatera Selatan	48,87	36,63	14,51
7.	Bengkulu	88,48	11,52	0,00
8.	Lampung	60,74	29,35	9,90
9.	Kep.Bangka	77,88	21,02	1,09

No.	Provinsi	Konsumsi di Tempat	Dibawa Konsumen	Ojek Online
10.	Kepulauan Riau	61,26	33,80	4,94
11.	DKI Jakarta	72,79	18,63	8,59
12.	Jawa Barat	73,66	18,93	7,41
13.	Jawa Tengah	73,45	22,40	4,14
14.	D.I. Yogyakarta	71,89	19,30	8,82
15.	Jawa Timur	68,71	21,81	9,48
16.	Banten	52,81	37,74	9,45
17.	Bali	78,16	18,14	3,70
18.	Nusa Tenggara	62,24	25,71	12,05
19.	Nusa Tenggara	82,98	15,46	1,56
20.	Kalimantan Barat	54,37	39,56	6,07
21.	Kalimantan Tengah	56,49	43,13	0,38
22.	Kalimantan Selatan	39,15	57,68	3,17
23.	Kalimantan Timur	26,27	71,56	2,16
24.	Kalimantan Utara	90,32	4,75	4,92
25.	Sulawesi Utara	79,74	8,43	11,82
26.	Sulawesi Tengah	52,39	44,26	3,35
27.	Sulawesi Selatan	69,29	24,87	5,84
28.	Sulawesi Tenggara	49,40	47,86	2,74
29.	Gorontalo	94,79	5,13	0,08
30.	Sulawesi Barat	91,19	8,00	0,81
31.	Maluku	75,61	20,80	3,59
32.	Maluku Utara	59,53	39,43	1,04
33.	Papua Barat	80,89	18,98	0,12
34.	Papua	45,08	54,51	0,41
	Indonesia	67,37	25,28	7,35

Sumber: BPS

Usaha penyedia makanan dan minuman berskala menengah besar sebagian besar (70,35 persen) berlokasi di kawasan mall/pertokoan/ perkantoran. Usaha yang berada di lokasi kawasan wisata (objek wisata) hanya sebanyak 7,01 persen, dan lokasi lainnya seperti di kawasan industri, hotel, dan lokasi lainnya (kawasan perumahan, pemukiman) sebanyak 22,64 persen.

Tabel 3.12 Persentase Banyaknya Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Lokasi Usaha dan Jenis Usaha, Tahun 2018 (%)

Lokasi Usaha	Restoran	Katering	Penyedia Makan Minum Lainnya	Total
Mall/Pertokoan/Perkantoran	72,46	23,72	65,99	70,35
Hotel	1,32	0,00	1,01	1,25
Kawasan Wisata	7,48	1,92	3,37	7,01
Kawasan Industri	0,60	3,21	1,35	0,74
Lainnya	18,14	71,15	28,28	20,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Dilihat menurut status badan usaha, usaha penyediaan makanan dan minuman sebagian besar telah berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yaitu sebesar 77,82 persen. Sebanyak 8,74 persen perusahaan belum mempunyai badan hukum. Selain itu, terdapat 13,44 persen perusahaan yang berbentuk CV, firma, koperasi, yayasan, dan izin khusus dari instansi berwenang.

Tabel 3.13 Persentase Banyaknya Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar Menurut Jenis Usaha dan Status Badan Hukum, Tahun 2018 (%)

Badan Usaha	Restoran	Katering	Penyedia Makan Minum Lainnya	Total
PT/PT Persero/Perum	78,17	63,96	78,40	77,82
CV/Firma	6,03	17,05	3,75	6,15
Koperasi/DanaPensiun/Yayasan	0,13	1,11	0,44	0,18
Izin Khusus Dari Instansi Berwenang	7,09	7,76	7,16	7,11
Tidak Berbadang Usaha	8,58	10,12	10,25	8,74
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Dilihat menurut ketersediaan ruang pertemuan di usaha penyediaan makanan dan minuman, sebagian besar usaha (86,79 persen) tidak mempunyai ruang pertemuan. Hanya sebanyak 13,21 persen usaha mempunyai ruang pertemuan. Rata-rata kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam usaha penyediaan makanan dan minuman mencapai 88 tempat duduk.

Sementara penjualan yang dilakukan usaha penyedia makanan dan minuman dapat dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yakni:

- Penjualan yang dikonsumsi konsumen/pelanggan di tempat usaha,
- Penjualan melalui *delivery order* atau dibawa pulang, dan
- Penjualan yang dilakukan secara *online*, baik melalui platform penjualan yang bersifat nasional maupun regional yang hanya di wilayah tertentu.

Porsi penjualan terbesar adalah dikonsumsi di tempat, yaitu mencapai 67,37 persen. Sementara yang melalui *delivery order* atau dibawa pulang oleh konsumen/pelanggan sebesar 25,28 persen, dan melalui *online* 7,35 persen.

Dalam rangka meningkatkan omset usaha, berbagai sarana promosi digunakan oleh usaha penyedia makanan dan minuman untuk memasarkan jasa dan produknya. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sarana promosi yang paling banyak digunakan adalah media *online*. Sebanyak 45,53 persen usaha memanfaatkan media *online* untuk mempromosikan usaha atau produk makanannya. Media lainnya yang dianggap cukup efektif adalah menggunakan brosur/*leaflet*, dan spanduk/*billboard*. Beberapa usaha juga masih menggunakan televisi/radio, surat kabar/majalah, serta media lainnya untuk mempromosikan usahanya.

Tenaga Kerja

Tumbuhnya usaha penyedia makanan dan minuman memberikan peluang pada penciptaan kesempatan kerja. Berdasar Survei Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman tahun 2019, rata-rata tenaga kerja pada usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia mencapai 23 pekerja per usaha. Rata-rata tenaga kerja terbanyak terjadi di Bali, yaitu 36 orang per usaha. Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan rata-rata tenaga kerja per usaha terkecil, masing-masing hanya sebanyak 14 orang per usaha.

Jenis pekerjaan pada usaha penyediaan makanan dan minuman, meliputi manajer, bagian pelayanan, bagian produksi, pemasaran, administrasi dan SDM. Distribusi atau penyebaran besarnya tenaga kerja yang terserap dalam tiap jenis pekerjaan dapat dilihat pada Sebagian besar tenaga kerja (51,70 persen) bekerja sebagai pelayan, disusul tenaga produksi sebesar 34,0 persen. Sedangkan yang mempunyai share terkecil adalah tenaga pemasaran atau marketing, yaitu hanya sebesar 1,37 persen.

Tabel 3.14 Banyaknya Pekerja Pada Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan, Tahun 2018 (Orang)

No.	Provinsi	Manager	Pelayan	Produksi	Pemasaran	Pembelian	Akuntan	Adm dan SDM	Total
1.	Aceh	42	371	148	36	40	18	45	700
2.	Sumatera Utara	369	3.828	2.150	143	205	165	672	7.532
3.	Sumatera Barat	130	1.360	699	15	31	32	43	2.310
4.	Riau	219	1.981	1.358	53	161	52	136	3.960
5.	Jambi	54	372	433	24	12	16	13	924
6.	Sumatera Selatan	184	1.879	1.143	21	108	31	99	3.465
7.	Bengkulu	30	177	225	13	9	13	17	484
8.	Lampung	75	421	315	13	26	12	56	918
9.	Kep.Bangka	26	196	137	7	8	6	11	391
10.	Kepulauan Riau	261	2.056	1.261	18	73	73	80	3.822
11.	DKI Jakarta	6.225	47.960	28.393	1.128	1.836	1.218	1.776	88.536
12.	Jawa Barat	2.518	18.437	11.024	385	685	361	676	34.086
13.	Jawa Tengah	589	4.618	3.520	136	225	118	270	9.476
14.	D.I. Yogyakarta	350	3.179	2.069	86	118	101	155	6.058
15.	Jawa Timur	1.355	9.683	7.445	363	404	256	474	19.980
16.	Banten	1.697	9.851	5.693	431	332	134	400	18.538
17.	Bali	1.029	9.436	7.548	349	507	641	542	20.052
18.	Nusa Tenggara	65	570	351	5	25	5	14	1.035
19.	Nusa Tenggara	25	310	213	7	5	7	9	576
20.	Kalimantan Barat	100	741	439	23	23	13	36	1.375
21.	Kalimantan Tengah	44	277	188	1	5	4	27	546
22.	Kalimantan Selatan	102	942	903	26	91	20	94	2.178
23.	Kalimantan Timur	213	2.197	1.433	67	234	49	132	4.325
24.	Kalimantan Utara	3	14	73	0	0	0	0	90
25.	Sulawesi Utara	86	706	691	0	19	10	24	1.536

No.	Provinsi	Manager	Pelayan	Produksi	Pemasaran	Pembelian	Akuntan	Adm dan SDM	Total
26.	Sulawesi Tengah	8	39	59	0	4	2	8	120
27.	Sulawesi Selatan	322	3.170	2.660	23	253	68	212	6.708
28.	Sulawesi Tenggara	26	183	141	38	0	4	8	400
29.	Gorontalo	12	87	74	3	7	7	0	190
30.	Sulawesi Barat	2	6	27	0	0	1	0	36
31.	Maluku	36	238	173	2	2	3	5	459
32.	Maluku Utara	42	417	483	0	46	26	9	1.023
33.	Papua Barat	8	50	48	2	2	0	2	112
34.	Papua	43	303	203	6	20	18	15	608
	Indonesia	16.288	126.056	81.719	3.426	5.517	3.483	6.060	242.549

Sumber: BPS

Dilihat menurut jenis kelamin, pekerja pada usaha penyediaan makanan dan minuman berskala menengah dan besar mempekerjakan 62,49 persen pekerja laki-laki dan 37,51 persen pekerja perempuan. Sementara itu, untuk pekerja yang mempunyai sertifikat jumlahnya masih sangat sedikit, yaitu 4,87 persen.

Upah Tenaga Kerja

Rata-rata balas jasa yang diterima pekerja Indonesia pada usaha penyediaan makanan dan minuman selama setahun tercatat sebesar 40,50 juta rupiah per pekerja. Berdasarkan data dari BPS, memperlihatkan bahwa sebagian besar balas jasa pekerja berupa upah gaji. Selain upah gaji, beberapa usaha penyediaan makanan dan minuman juga memberikan upah lembur; hadiah, bonus, iuran dana pensiun, asuransi tenaga kerja, dan sejenisnya. Pada tahun 2018, sebesar 87,81 persen dari balas jasa merupakan upah gaji, kemudian diikuti dengan tunjangan sebesar 5,04 persen, sedangkan sisanya diberikan dalam bentuk bonus (3,72 persen), asuransi kecelakaan kerja dan jaminan sosial (2,13 persen), serta balas jasa lainnya (1,3 persen).

Biaya/Pengeluaran Usaha

Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran perusahaan/usaha penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp5,52 miliar per usaha. Pengeluaran terbesar digunakan untuk pembelian bahan makanan dan minuman yang akan diolah maupun makanan dan minuman jadi yang akan dijual kembali, dimana besarnya mencapai 50,78 persen dari total pengeluaran. Sementara sisanya (49,22 persen) merupakan biaya umum yang meliputi biaya untuk upah dan gaji, pembelian bahan bakar, listrik, gas, dan air, biaya angkutan/pengiriman, sewa, jasa, dan lain-lain.

Tabel 3.15 Pengeluaran Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Jenis Pengeluaran, Tahun 2018 (Rp Juta)

No.	Provinsi	Pengeluaran Utama	Pengeluaran Umum	Total
1.	Aceh	80.890	61.367	142.257
2.	Sumatera Utara	886.413	518.656	1.405.069
3.	Sumatera Barat	243.035	163.392	406.427
4.	Riau	325.318	307.740	633.057
5.	Jambi	51.249	60.873	112.122
6.	Sumatera Selatan	303.187	253.019	556.205
7.	Bengkulu	18.918	22.184	41.102
8.	Lampung	69.495	69.812	139.306
9.	Kep.Bangka	28.721	22.530	51.251
10.	Kepulauan Riau	409.701	362.287	771.988
11.	DKI Jakarta	6.229.128	7.441.908	13.671.035
12.	Jawa Barat	2.533.138	2.354.774	4.887.913
13.	Jawa Tengah	579.520	536.109	1.115.629
14.	D.I. Yogyakarta	385.436	355.057	740.493
15.	Jawa Timur	1.966.366	1.395.637	3.362.004
16.	Banten	2.500.942	1.769.746	4.270.688
17.	Bali	1.911.093	1.933.046	3.844.139
18.	Nusa Tenggara	68.684	70.780	139.464
19.	Nusa Tenggara	79.347	38.528	117.875
20.	Kalimantan Barat	142.779	121.397	264.176
21.	Kalimantan Tengah	41.139	36.272	77.411
22.	Kalimantan Selatan	214.726	197.666	412.392
23.	Kalimantan Timur	420.068	351.679	771.746
24.	Kalimantan Utara	6.468	2.226	8.694
25.	Sulawesi Utara	105.299	110.280	215.579
26.	Sulawesi Tengah	5.359	13.380	18.740
27.	Sulawesi Selatan	429.960	375.959	805.919
28.	Sulawesi Tenggara	29.475	33.176	62.651
29.	Gorontalo	8.792	13.620	22.412
30.	Sulawesi Barat	4.217	1.510	5.727
31.	Maluku	35.064	38.868	73.932
32.	Maluku Utara	89.203	55.589	144.792
33.	Papua Barat	9.181	8.041	17.223
34.	Papua	45.617	56.205	101.822
	Indonesia	20.257.929	19.153.311	39.411.240

Sumber: BPS

Pendapatan Usaha

Pendapatan perusahaan/usaha penyediaan makanan dan minuman berskala menengah dan besar terdiri dari pendapatan utama dan pendapatan lainnya. Sebagian besar pendapatan (99,11 persen) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama yaitu penjualan

makanan dan minuman, sedangkan pedapatan lainnya hanya 0,89 persen. Pendapatan lainnya diantaranya diperoleh dari menyewakan gedung/ ruangan, menyewakan gudang, keuntungan dari penjualan barang/bahan baku, menyewakan mesin, kendaraan, royalti/deviden dan waralaba yang diterima.

Rata-rata pendapatan usaha/ perusahaan penyediaan makanan dan minuman terbesar di Provinsi Banten yang sebesar Rp9,04 miliar per tahun, diikuti Provinsi Bali Rp8,25 miliar. Sementara pendapatan terendah di Provinsi Bengkulu dengan rata-rata pendapatan Rp2,07 miliar per tahun.

Tabel 3.16 Rata-rata Jumlah Pekerja, Pendapatan, dan Tempat Duduk Tersedia Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi, Tahun 2018

No.	Provinsi	Rata-Rata Jumlah Pekerja (Rp Juta)	Rata-Rata Pendapatan Perusahaan (Rp Juta)	Rata-Rata Tempat Duduk Tersedia (unit)
1.	Aceh	20	4.975	130
2.	Sumatera Utara	28	7.215	117
3.	Sumatera Barat	22	5.604	119
4.	Riau	22	4.778	99
5.	Jambi	22	4.909	117
6.	Sumatera Selatan	21	5.019	76
7.	Bengkulu	22	2.069	51
8.	Lampung	18	3.554	96
9.	Kep.Bangka	17	4.093	92
10.	Kepulauan Riau	21	5.587	84
11.	DKI Jakarta	21	5.586	78
12.	Jawa Barat	19	4.942	99
13.	Jawa Tengah	23	4.003	95
14.	D.I. Yogyakarta	26	4.617	109
15.	Jawa Timur	20	4.872	88
16.	Banten	23	9.045	98
17.	Bali	36	8.246	87
18.	Nusa Tenggara	23	4.326	108
19.	Nusa Tenggara	16	4.255	70
20.	Kalimantan Barat	25	7.135	101
21.	Kalimantan Tengah	14	2.868	82
22.	Kalimantan Selatan	22	5.104	98
23.	Kalimantan Timur	25	8.778	102
24.	Kalimantan Utara	30	3.523	101
25.	Sulawesi Utara	24	5.205	82
26.	Sulawesi Tengah	20	2.524	159
27.	Sulawesi Selatan	26	5.114	88
28.	Sulawesi Tenggara	20	4.904	165
29.	Gorontalo	19	4.083	110

No.	Provinsi	Rata-Rata Jumlah Pekerja (Rp Juta)	Rata-Rata Pendapatan Perusahaan (Rp Juta)	Rata-Rata Tempat Duduk Tersedia (unit)
30.	Sulawesi Barat	18	3.891	167
31.	Maluku	17	5.546	113
32.	Maluku Utara	31	5.968	113
33.	Papua Barat	14	4.923	55
34.	Papua	19	5.908	71
	Indonesia	23	5.585	88

Sumber: BPS

Sedangkan jika dilihat dari pendapatan utama dan pendapatan lainnya untuk perusahaan penyediaan makanan dan minuman pada tahun 2018 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.17 Pendapatan Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman Skala Menengah Besar menurut Provinsi dan Jenis Pendapatan Usaha, Tahun 2018 (Rp Juta)

No.	Provinsi	Pendapatan Utama	Pendapatan Lainnya	Total
1.	Aceh	174.125	0	174.125
2.	Sumatera Utara	1.924.993	15.842	1.940.835
3.	Sumatera Barat	588.198	222	588.420
4.	Riau	852.052	7.988	860.040
5.	Jambi	204.817	1.361	206.178
6.	Sumatera Selatan	826.809	1.326	828.135
7.	Bengkulu	45.515	3	45.518
8.	Lampung	181.053	201	181.254
9.	Kep.Bangka	92.693	1.446	94.139
10.	Kepulauan Riau	1.005.385	11.449	1.016.834
11.	DKI Jakarta	23.394.463	156.113	23.550.576
12.	Jawa Barat	8.834.319	31.629	8.865.948
13.	Jawa Tengah	1.638.538	10.698	1.649.236
14.	D.I. Yogyakarta	1.063.898	11.863	1.075.761
15.	Jawa Timur	4.819.585	47.543	4.867.128
16.	Banten	7.272.360	17.910	7.290.270
17.	Bali	4.439.501	153.521	4.593.022
18.	Nusa Tenggara	193.101	1.569	194.670
19.	Nusa Tenggara	149.753	3.427	153.180
20.	Kalimantan Barat	390.755	1.670	392.425
21.	Kalimantan Tengah	110.671	1.181	111.852
22.	Kalimantan Selatan	499.915	5.381	505.296
23.	Kalimantan Timur	1.518.195	399	1.518.594
24.	Kalimantan Utara	10.569	0	10.569
25.	Sulawesi Utara	333.120	0	333.120
26.	Sulawesi Tengah	15.144	0	15.144
27.	Sulawesi Selatan	1.312.246	7.166	1.319.412
28.	Sulawesi Tenggara	96.965	1.115	98.080

No.	Provinsi	Pendapatan Utama	Pendapatan Lainnya	Total
29.	Gorontalo	40.471	359	40.830
30.	Sulawesi Barat	7.782	0	7.782
31.	Maluku	148.950	792	149.742
32.	Maluku Utara	196.847	97	196.944
33.	Papua Barat	39.384	0	39.384
34.	Papua	186.777	2.279	189.056
	Indonesia	60.894.983	545.602	61.440.585

Sumber: BPS

3.3.3 Pasar yang Dituju

Seluruh wilayah Indonesia yang berdekatan dengan titik-titik lokasi outlet Pizza Hut.

3.3.4 Pesaing dan Persaingan

Tabel 3.18 Daftar Kompetitor

No.	Daftar Kompetitor	Keterangan
1	Domino's Pizza	https://www.dominos.co.id/online-order/delivery/
2	Kentucky Fried Chicken	https://hd.kfcku.com/prod/register
3	Burger King	https://bkdelivery.co.id/menus/
4	Mc Donald	https://www.mcdelivery.co.id/id/menu.html
5	Hoka-hoka Bento	https://www.hokben.co.id/login
6	J.co Donat	https://order.jcodelivery.com/

3.3.5 Strategi Pemasaran dan Penjualan

Strategi Marketing yang diterapkan oleh manajemen Perseroan dalam membangun dan menjalankan bisnisnya jelas terlihat dari sisi manajemen pelanggan yang sangat baik, strategi ini menjadi kemenangan tersendiri yang membawa bisnis ini terus berkembang sangat baik. Tanpa disadari oleh konsumen, produk-produk makanan Perseroan sudah memikat kepercayaan mereka dan menjaga kepercayaan tersebut dengan layanan – layanan tambahan yang membuat mereka selalu ingat akan Pizza Hut sebagai pilihan pertama “*First Choice*”.

– Strategi Produk

Dengan Rencana penambahan bidang usaha baru perdagangan eceran melalui media, diharapkan akan memudahkan dan dapat menjangkau konsumen yang tidak sempat datang langsung ke restoran. Perdagangan eceran melalui media akan menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan letak berdekatan dengan titik-titik lokasi Outlet Pizza Hut hanya dengan melakukan pembelian dan pembayaran melalui *Website* dan Aplikasi.

– Strategi Distribusi

Setelah penyelesaian transaksi dan konfirmasi pembayaran melalui aplikasi, Outlet Pizza Hut yang dipilih oleh Konsumen akan mempersiapkan produk makanan yang dipesan oleh Konsumen. Selanjutnya, proses penyerahan produk Pizza Hut dapat dilakukan dengan pengambilan langsung oleh konsumen, pengiriman oleh karyawan Outlet Pizza Hut atau pengiriman melalui jasa agregator pihak ketiga.

– Strategi Promosi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan dalam mempromosikan bidang usaha perdagangan eceran melalui media adalah melalui iklan di media massa, termasuk televisi dan surat kabar juga memanfaatkan fasilitas seperti media sosial, *website* dan brosur promosi menu Pizza Hut.

BAB IV

KELAYAKAN TEKNIS

BAB IV KELAYAKAN TEKNIS

4.1 Rencana Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang memperkenalkan Pizza Hut pada 1987 berdasarkan perjanjian dengan Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC. Fasilitas pelayanan yang paling utama dari Perseroan yaitu sistem order atau pesan makanan melalui *hotline* khusus dan akan diantar ke rumah. Dengan perubahan gaya hidup masyarakat dan tren teknologi yang semakin berkembang saat ini, Perseroan berencana melakukan pengembangan bidang usaha yakni perdagangan eceran melalui media. Dengan penambahan bidang usaha tersebut, konsumen dapat melakukan pembelian dan pembayaran melalui *website* atau aplikasi Pizza Hut. Penambahan bidang usaha melalui media tersebut diharapkan dapat menunjang daya saing dan bertujuan untuk menjangkau konsumen yang tidak sempat datang langsung ke restoran.

4.2 Tampilan Website dan Aplikasi

Website

Website digunakan sebagai pengganti toko *offline* dengan fungsi diantaranya seperti etalase produk. Sementara itu, pememesanannya dilakukan melalui *hotline* khusus untuk selanjutnya produk akan diantar ke alamat yang telah ditentukan oleh konsumen.

Gambar 4.1 Tampilan Website Pizza Hut

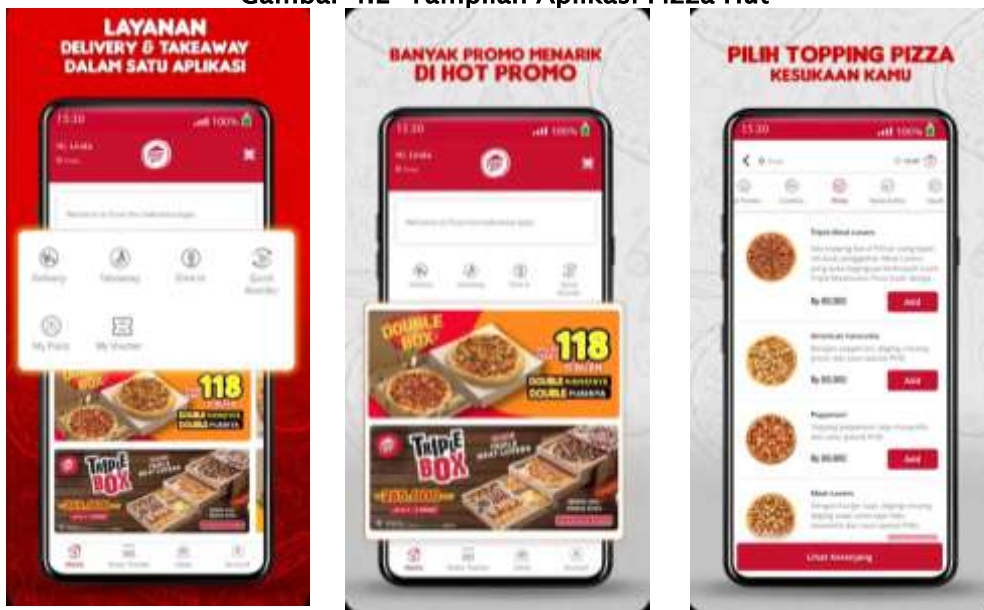


Sumber: www.pizzahut.co.id

Aplikasi

Konsumen dapat melakukan pembelian dan pembayaran melalui aplikasi pada *smartphone* yang bisa di-*download* secara gratis melalui penyedia aplikasi di *smartphone*.

Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi Pizza Hut

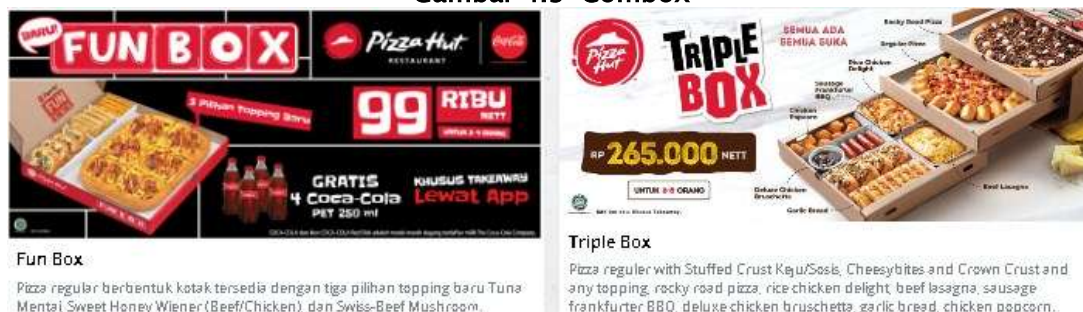


Sumber: Google Play Store

4.3 Jenis Produk

Berbagai macam produk Perseroan melalui PHR dan PHD seperti berbagai macam Pizza, *Pasta & Rice*, minuman, *Dessert* serta tersedia menu untuk sarapan pagi. Selain itu juga tersedia combo menu yang terdiri dari berbagai menu yang tersedia.

Gambar 4.3 Combo

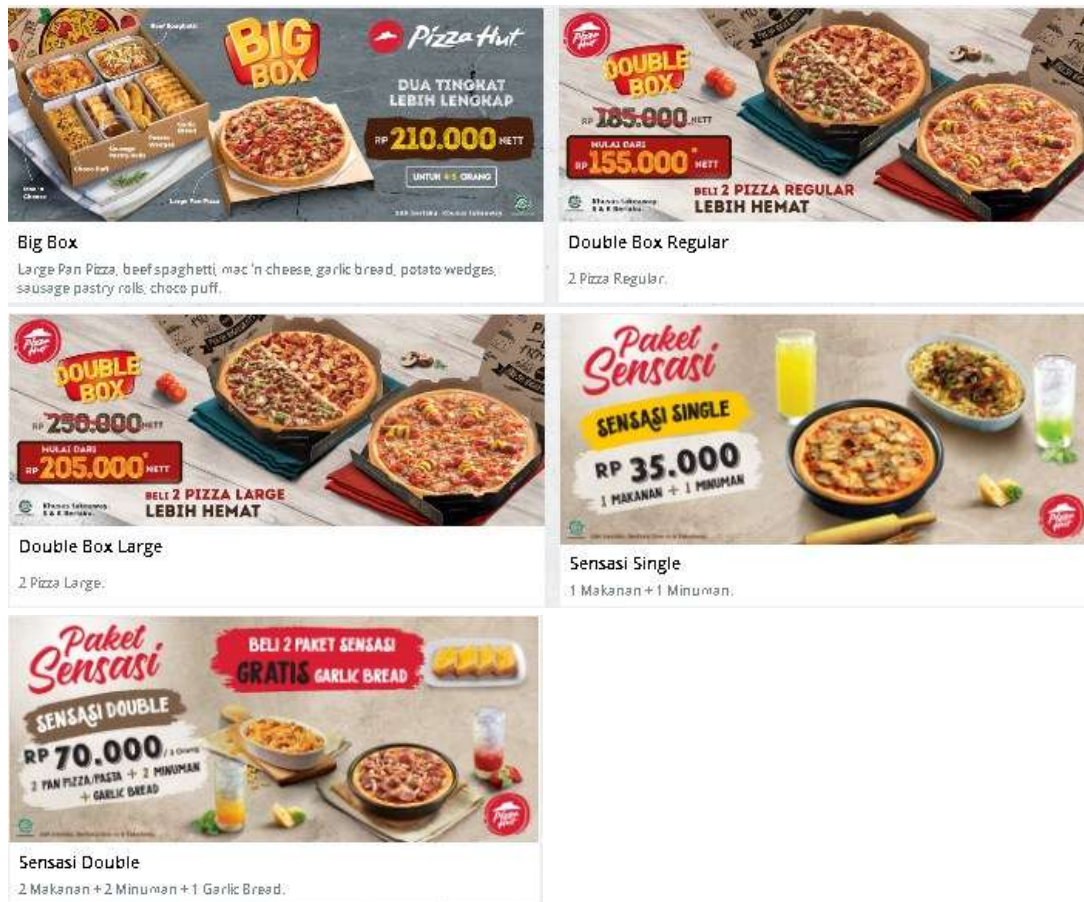


Fun Box

Pizza regular berbentuk kotak tersedia dengan tiga pilihan topping baru Tuna Mental Sweet Honey Wiener (Beef/Chicken), dan Swiss-Beef Mushroom.

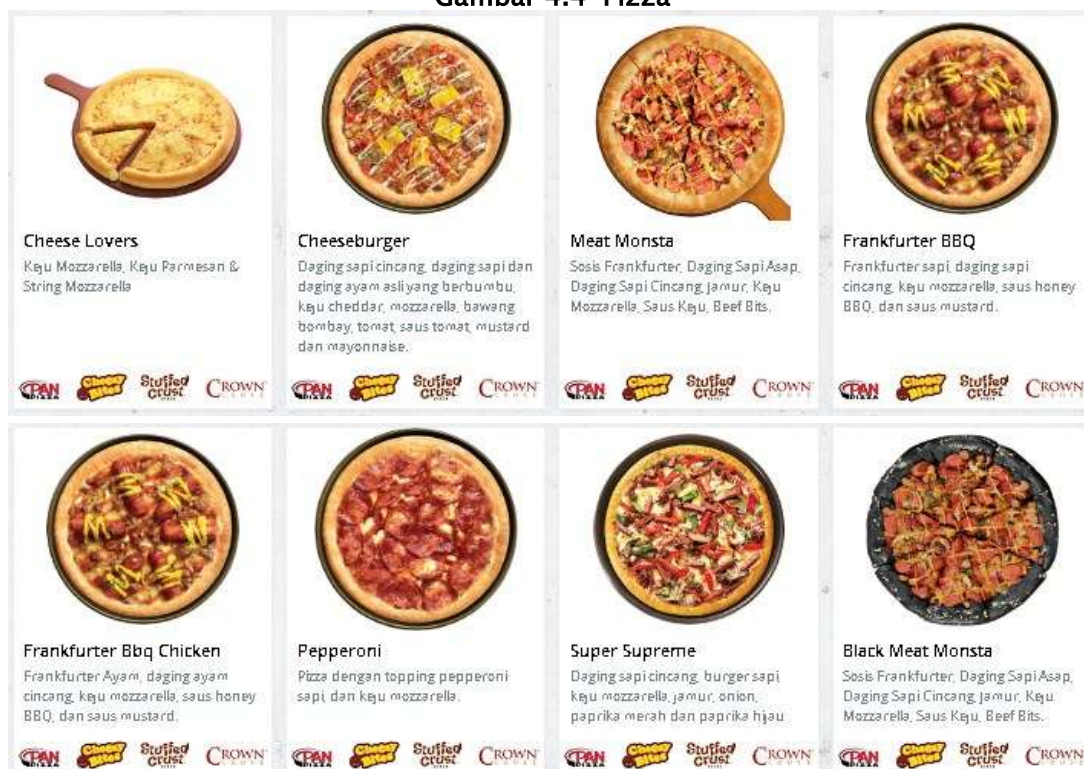
Triple Box

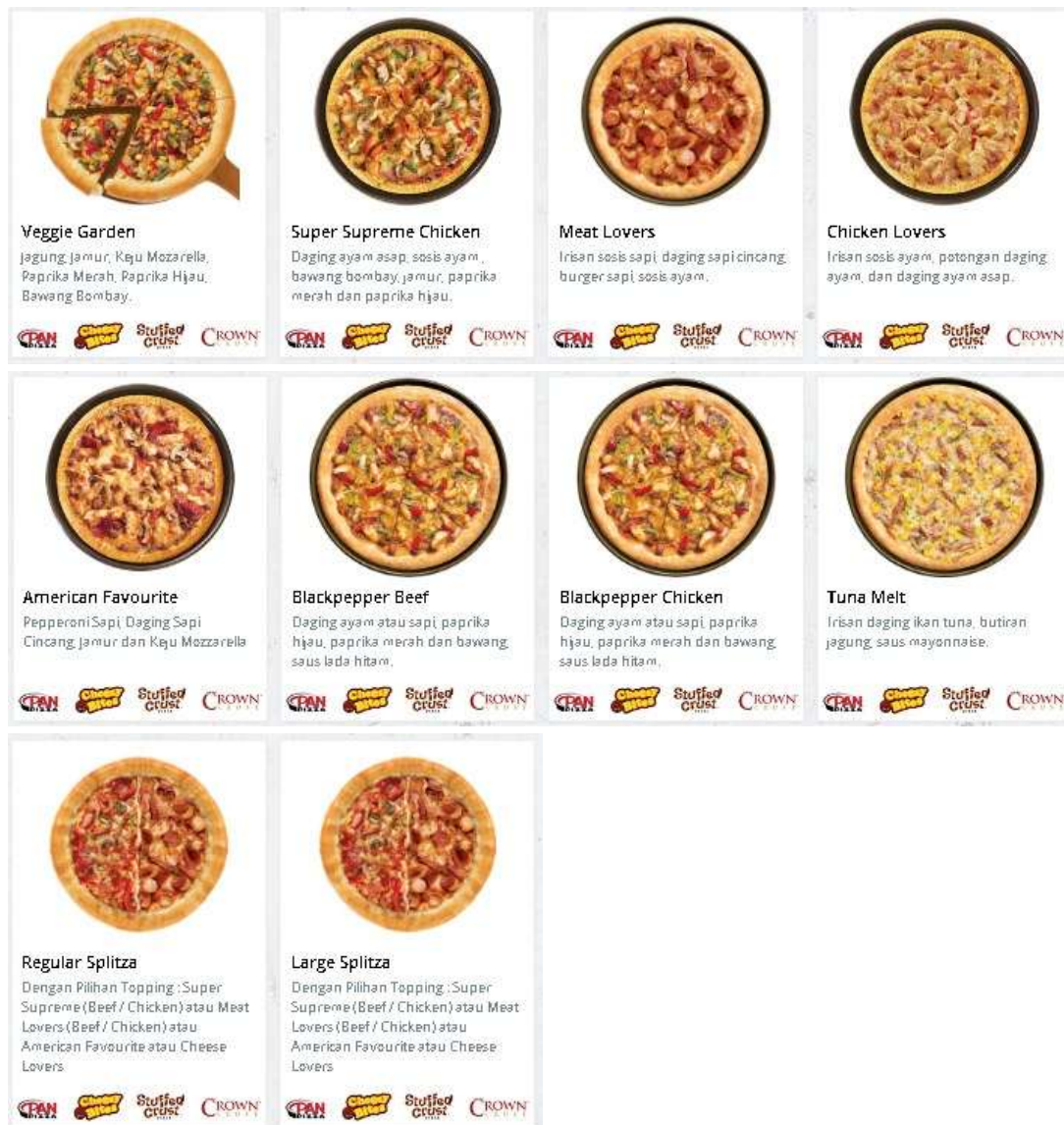
Pizza regular with Stuffed Crust Kayu/Sosis, Cheesybites and Crown Crust and any topping, rocky road pizza, rice chicken delight, beef lasagna, sausage frankfurter BBQ, deluxe chicken bruschetta, garlic bread, chicken popcorn.



Sumber: www.pizzahut.co.id

Gambar 4.4 Pizza

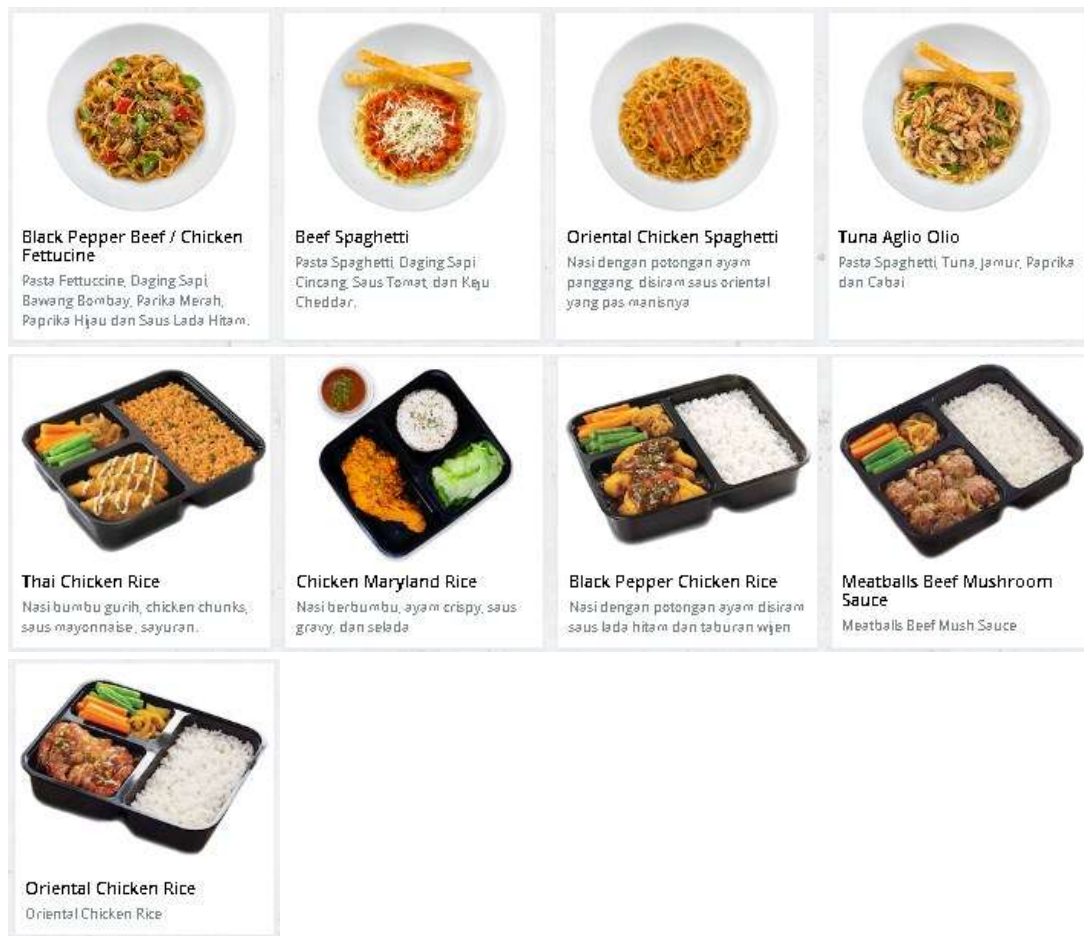




Sumber: www.pizzahut.co.id

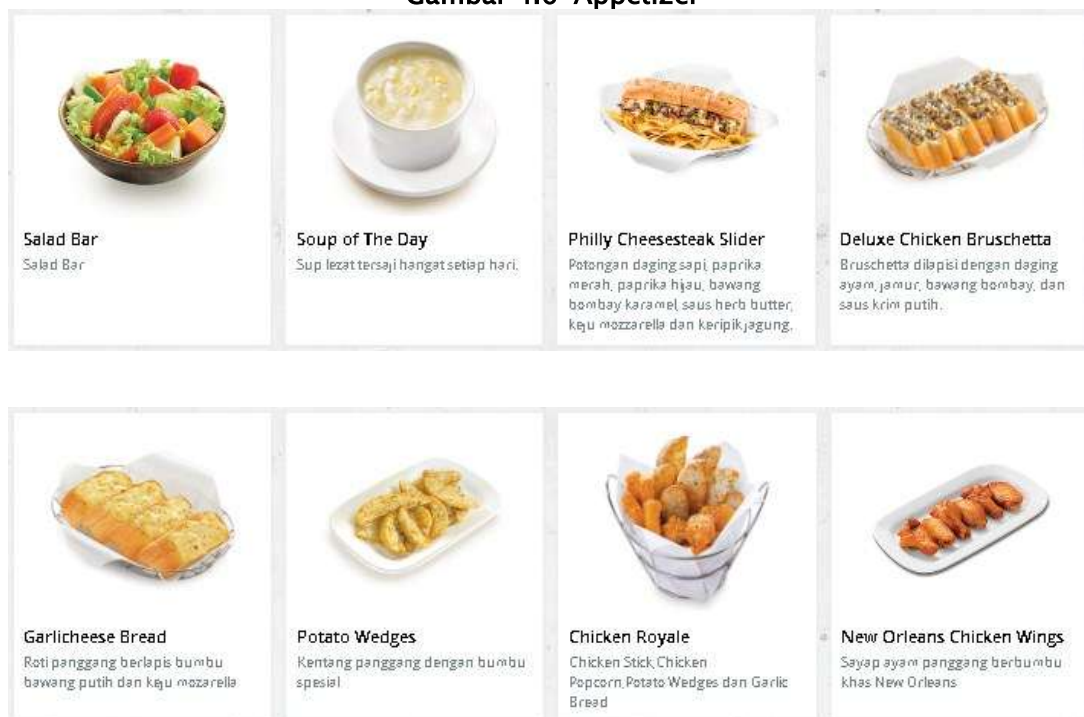
Gambar 4.5 Pasta & Rice

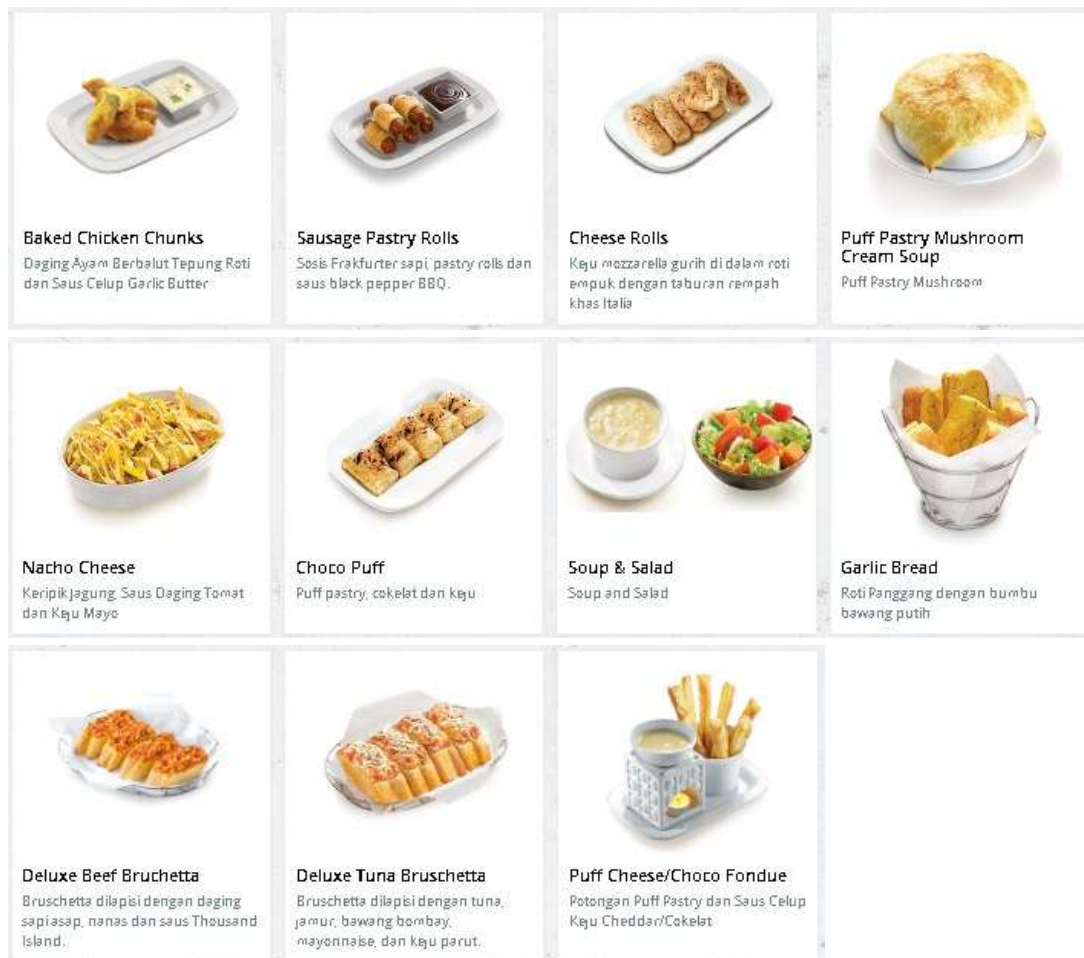




Sumber: www.pizzahut.co.id

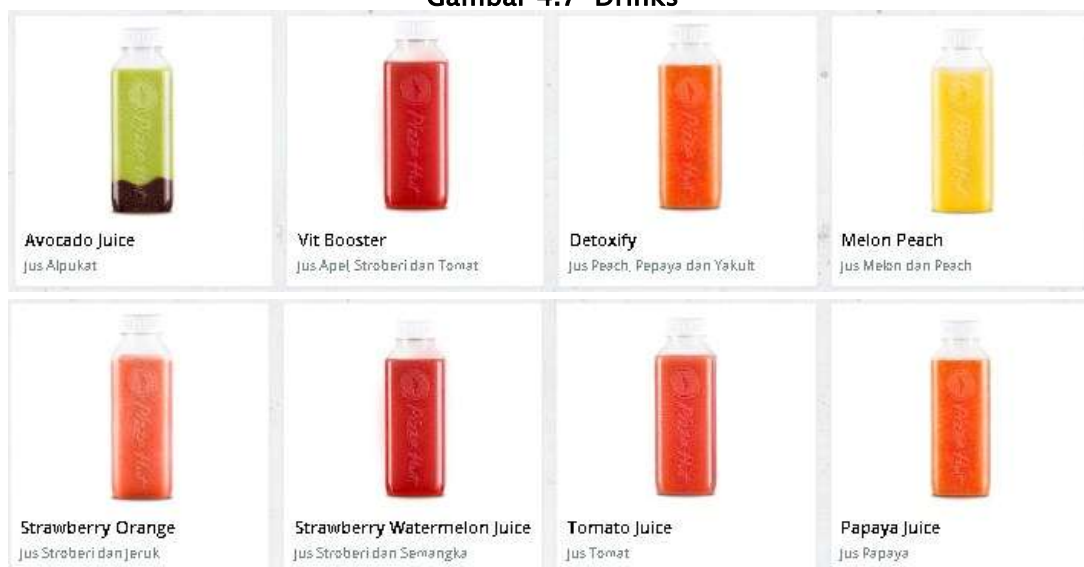
Gambar 4.6 Appetizer



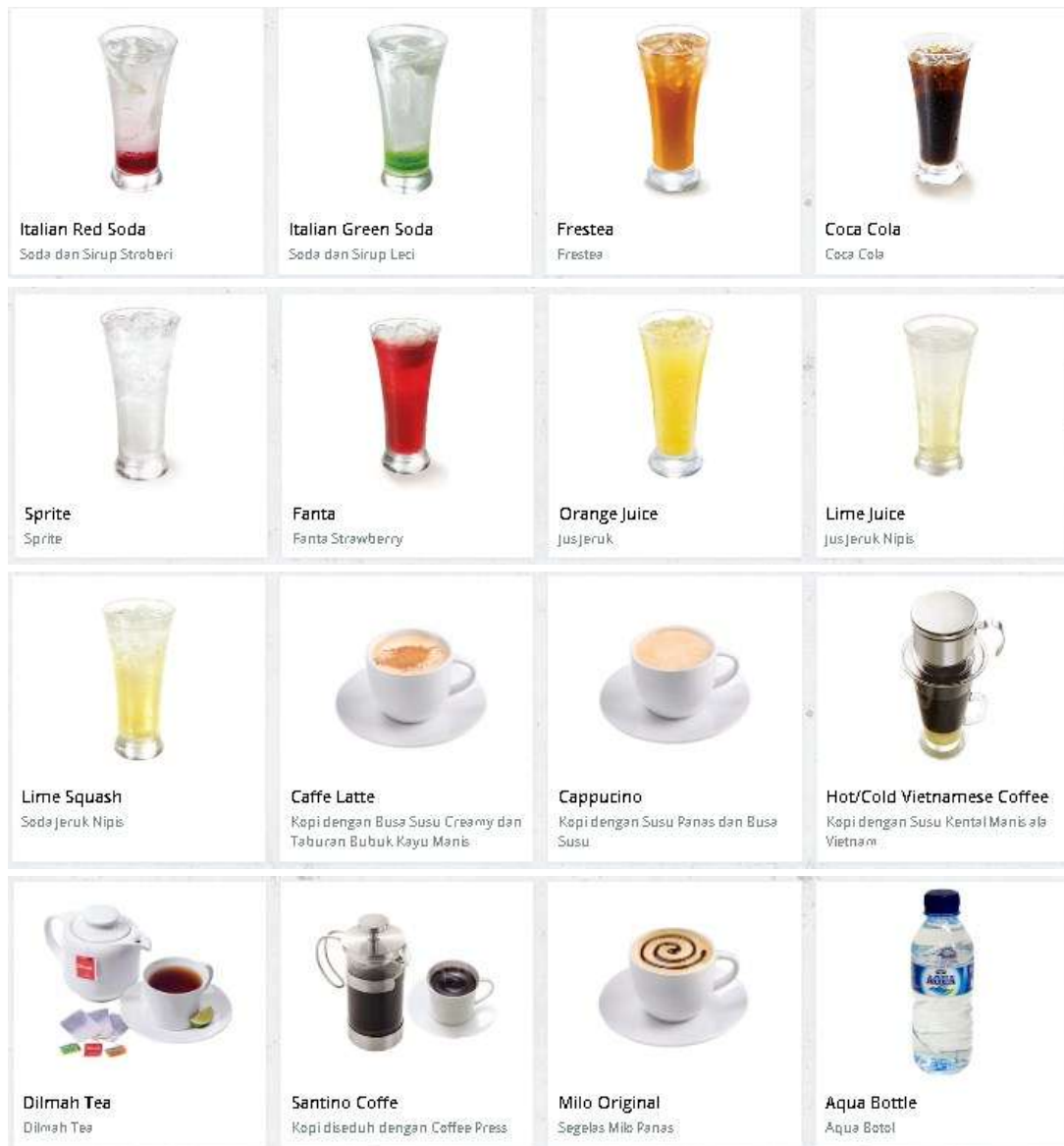


Sumber: www.pizzahut.co.id

Gambar 4.7 Drinks



			
Melon Juice Jus Melon	Watermelon Juice Jus Semangka	Watermelon Lime Juice Jus Semangka dan Jeruk Nipis	Lychee Breeze Buah Leci Sirup Leci Soda dan Jeruk Nipis
			
Tropical Punch Buah Peach, Nata de Coco, Semangka, Biji Selasih, Sirup Mangga dan Lemon Tea	Winter Punch Buah Leci, Nata de Coco, Biji Selasih, Sirup Leci dan Lemon Tea	Toffee Coffee Kopi, Sirup Karamel dan Whipped Cream	Green Tea Shake Bubuk Teh Hijau, Susu, Es Krim Vanila dan Whipped Cream
			
Green Tea Yakult Bubuk Teh Hijau, Yakult dan Potongan Buah Melon	Mocha Float Es Kopi, Cokelat dan Es Krim Vanila	Chocolate Blast Milk dan Es Krim Cokelat	Vanilla Milkshake Susu Segar dan Es Krim Vanila
			
Chocolate Milkshake Susu Segar dan Es Krim Cokelat	Strawberry Milkshake Susu Segar dan Es Krim Stroberi	Cold Frappe Es Kopi Kental, Es Krim Vanila dan Whipped Cream	Lychee Spring Yakult, Sirup Leci dan Potongan Buah Leci
			
Peach Spring Teh Rasa Peach dan Buah Peach	Pink Float Fanta Stroberi dan Es Krim Vanila	Favourite Float Coca-Cola dan Es Krim Vanila	Mixberry Soda Bluberi, Sirup Stroberi, Biji Selasih dan Jelly
			
Orange Lychee Sparkle Jus Jeruk dan Sirup Leci	Blue Ocean Soda Bluberi, Sirup Mangga dan Biji Selasih	Honey Lime Tea Madu dan Teh Jeruk Nipis	Italian Sunrise Soda Soda dan Sirup Mangga



Sumber: www.pizzahut.co.id

Gambar 4.8 Dessert





Sumber: www.pizzahut.co.id

Gambar 4.9 Sarapan Pagi



Sumber: www.pizzahut.co.id

4.4 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak

Kebutuhan perangkat keras dan lunak dalam perdagangan eceran melalui media untuk produk Pizza Hut oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Perangkat Keras

Perangkat keras yang diperlukan dalam operasional perdagangan eceran melalui media adalah 1 (satu) unit Komputer dengan Spesifikasi:

- Pentium Core i7 / 10th Gen 10510
- Windows 10 Professional
- Memory 16 Gb LP DDR4
- SSD Optane 512 Gb PCIe 3.0

Perangkat Lunak

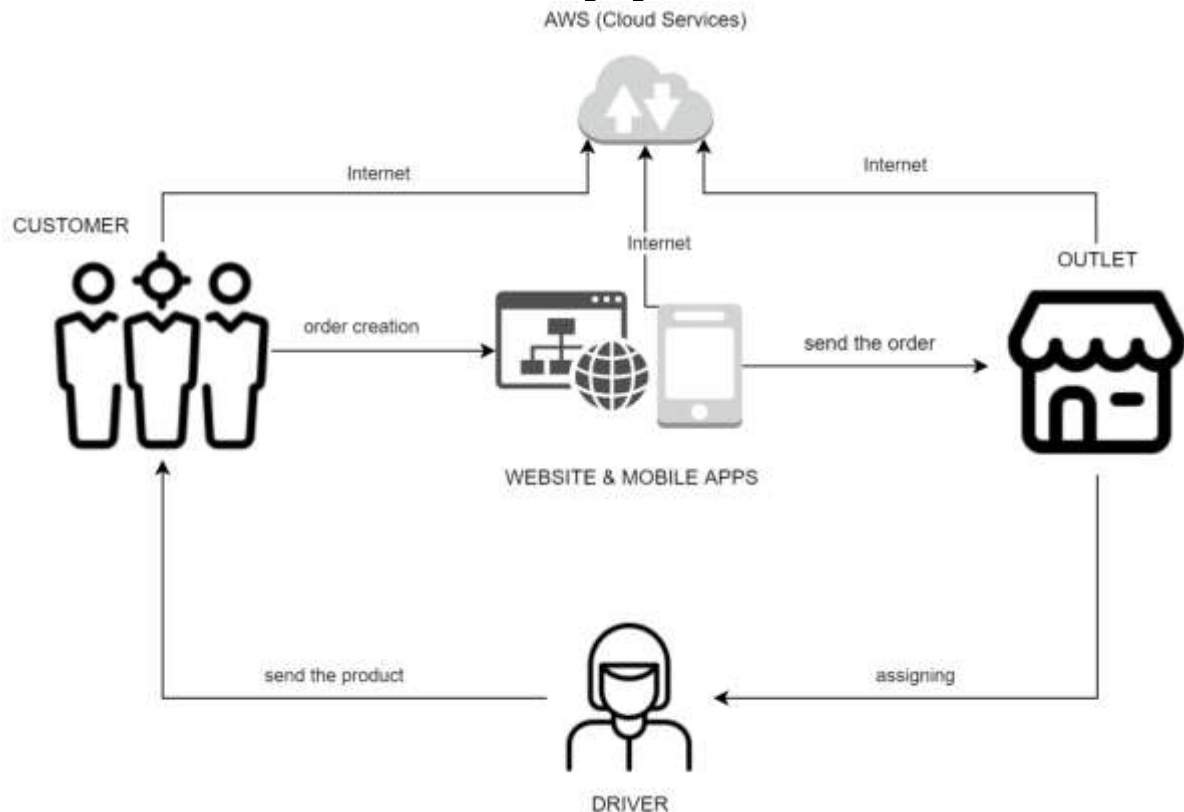
Perangkat lunak dalam operasional perdagangan eceran melalui media adalah sebagai berikut:

- Amazon Web Services for E-Commerce – <http://aws.amazon.com/marketplace/>
- Google Map Services for Outlet Pin Point – <http://www.google.co.id/maps/>
- Doku Wallet Payment System – www.doku.com
- Telkomsel Internet Services – www.telkomsel.com

4.5 Uraian Proses Perdagangan Eceran Melalui Media

Uraian proses perdagangan eceran melalui media pada produk Pizza Hut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.10 Uraian Proses Perdagangan Eceran Melalui Media



Sumber: Manajemen Perseroan

Uraian proses dalam perdagangan eceran melalui media dalam pemesanan produk Pizza Hut adalah sebagai berikut:

1. Pizza Hut mempergunakan *Amazon Web Services* (AWS) untuk menciptakan Website dan Aplikasi (Google / IOS Apple), masing-masing untuk PHR dan PHD, dan kemudian dikombinasikan dengan *Google Map Services* untuk menentukan titik-titik lokasi Outlet Pizza Hut di seluruh wilayah Indonesia.
2. Internet merupakan keharusan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi transaksi pembelian / pemesanan untuk Perdagangan *Online*, baik melalui *Website* maupun Aplikasi. Dalam hal ini, Pizza Hut mempergunakan *Corporate Account* dengan Telkomsel.
3. Konsumen di Indonesia dapat mengakses melalui *Website* atau Aplikasi dengan tujuan membeli dan membayar produk menu Pizza Hut yang diinginkan. Konsumen kemudian memilih lokasi Outlet Pizza Hut terdekat dengan mempergunakan fasilitas *Google Map*.
4. Sistem pembayaran mempergunakan Doku, yang ditujukan untuk memfasilitasi pembayaran dengan metode Kartu Kredit atau Kartu Debit yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.

5. Setelah penyelesaian transaksi dan konfirmasi pembayaran, Outlet Pizza Hut yang dipilih oleh Konsumen akan mempersiapkan produk makanan yang dipesan oleh Konsumen.
6. Proses penyerahan produk makanan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengambilan langsung oleh konsumen yang bersangkutan (*take away*);
 - b. Pengiriman oleh karyawan Outlet Pizza Hut; atau
 - c. Pengiriman melalui jasa agregator pihak ketiga (Gojek / Grab).

4.6 Tenaga Kerja

Operasional perdagangan eceran melalui media pada produk Pizza Hut membutuhkan 2 (dua) orang karyawan IT dengan kualifikasi Sarjana Komputer. Operasional perdagangan eceran melalui media secara normal dilakukan dalam sehari mengikuti jam operasional pada outlet Pizza Hut.

4.7 Rencana Penyerapan Produk Perdagangan *Online*

Perdagangan eceran melalui media pada produk Pizza Hut dapat menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan letak berdekatan dengan titik-titik lokasi Outlet Pizza Hut.

4.8 Peraturan Perundang–Undang yang Terkait

Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

BAB V
KELAYAKAN POLA BISNIS

BAB V

KELAYAKAN POLA BISNIS

5.1 Keunggulan Kompetitif

Kegiatan Usaha Eksisting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif guna menghadapi persaingan dalam bisnis restoran, yaitu mencakup sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan restoran *full service* dan layanan jasa antar dengan jaringan waralaba terbesar di Indonesia.

Perseroan meyakini bahwa sejak makanan pizza mulai diperkenalkan di Indonesia tiga dekade lalu, merek Pizza Hut memiliki *brand awareness* yang kuat di antara masyarakat Indonesia. Berdasarkan *Euromonitor*, PHR mencapai peringkat nomor 1 dalam kategori restoran *full-service* pizza berdasarkan *value* di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar 97,0% pada tahun 2016. Sedangkan dalam kategori layanan jasa antar, PHD mencapai peringkat nomor 1 berdasarkan *value* di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar 64,6% pada tahun 2016.

Perseroan menawarkan layanan *dine-in* di PHR dan layanan pesan antar oleh PHD. Konsep yang beragam ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam melakukan pemesanan makanan serta memperluas target konsumen Perseroan. Konsumen yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman akan datang ke restoran PHR terdekat. Sedangkan konsumen yang ingin menghindari kemacetan dan membutuhkan layanan pesan antar akan melakukan pemesanan di PHD, baik itu melalui telepon, *website* atau melalui aplikasi *mobile*. PHD memberikan layanan terbaik dengan garansi waktu 30 menit sampai di tempat, hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan PHD dalam menarik konsumen.

Selain karena dukungan para pemegang saham Perseroan, Perseroan juga percaya bahwa kesuksesan dalam strategi bisnis dan juga pengembangan menu yang disajikan saat ini, merupakan hasil dari kemampuan Perseroan beradaptasi terhadap perubahan minat pelanggan dan perubahan pola persaingan di Indonesia. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *brand awareness* konsumen.

2. Dukungan yang Kuat Dari Pemberi Waralaba.

Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC sebagai pemberi waralaba menetapkan aturan-aturan atau kebijakan yang cenderung ketat sebagai syarat keberhasilan bagi waralaba tersebut. Perseroan terus mempertahankan hubungan yang baik dengan Pizza Hut Asia

Pasific Holdings LLC dengan berusaha untuk mentaati berbagai aturan dan kebijakan serta mencapai target yang ditetapkan oleh Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC. Selama beberapa tahun, Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai *Asia Franchisee of the Year* dari Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC.

Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC memiliki perjanjian kerjasama dengan Perseroan, dalam perjanjian tersebut Perseroan memiliki target untuk penambahan 175 gerai baru selama periode 2017–2019, dengan insentif dari Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC. Program lainnya yang didukung oleh Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC untuk mencapai kesuksesan Perseroan di antaranya adalah (i) akses terhadap produk–produk inovatif Pizza Hut Global, (ii) akses terhadap *global procurement*, (iii) strategi marketing internasional, (iv) berbagi dalam aplikasi *best practice* dan (v) melakukan *quality control* serta memberikan *technical support* secara berkala dan (vi) berbagai pelatihan yang diadakan oleh Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC. Program–program kerja sama ini dapat meningkatkan kemampuan manajemen dan karyawan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, pengembangan usaha, serta mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan. Selama tahun 2017, Perseroan telah membuka 10 gerai PHR dan 41 gerai PHD yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

3. Memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pergerakan dalam demografi dan preferensi konsumen

Saat ini Indonesia berada di bawah rata–rata produk domestik bruto (“PDB”) per kapita dimana negara–negara lain di Asia Tenggara (seperti Malaysia dan Thailand) serta Tiongkok telah mengalami pertumbuhan konsumsi yang signifikan dalam sektor restoran dan rekreasi. Perseroan optimis akan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan sektor restoran, terutama dari tingginya pertumbuhan konsumsi dari kelas menengah di kota–kota besar di Indonesia. Kondisi tren tersebut diharapkan dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan Perseroan kedepannya. Hal ini disertai dengan fokus Perseroan pada kualitas makanan serta variasi menu yang terus disempurnakan dengan target pada konsumen kelas menengah.

4. Jaringan Gerai Restoran yang Mencakup Kota dan Kabupaten di 28 Provinsi di Indonesia

Jaringan 393 gerai restoran Perseroan tersebar di lima pulau besar di Indonesia dari Banda Aceh di Sumatera hingga Abepura di Papua. Gerai–gerai tersebut meliputi 290 gerai di kota–kota besar (*first–tier city*), 61 gerai di kota satelit/ menengah (*second tier city*), dan 42 gerai di kota kecil (*third–tier city*). Per tanggal 31 Desember 2017, lebih dari 77% dari total gerai Perseroan berada di Pulau Jawa. Luasnya jangkauan gerai restoran Perseroan diharapkan dapat melayani basis konsumen yang luas dan mendukung strategi pertumbuhan Perseroan ke depan.

Perseroan mulai memfokuskan pembukaan gerai pada beberapa daerah baru terutama di kota *second–tier city* dan *third–tier city* di pulau Jawa, dimana penduduk kota

tersebut biasanya telah lama terekspos oleh promosi maupun pemasaran produk-produk Perseroan di iklan TV nasional namun hingga kini belum mendapatkan akses ke gerai Perseroan. Gerai-gerai yang baru-baru ini dibangun di daerah tersebut menunjukkan kinerja dan pertumbuhan penjualan yang sangat baik. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Perseroan telah mengalokasikan biaya yang signifikan untuk kegiatan promosi secara Nasional dan juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Perseroan memiliki kebijakan dan juga tim yang didedikasikan khusus dalam memutuskan pembukaan gerai baru. Tim tersebut memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan (i) jenis gerai yang tepat untuk melayani permintaan di daerah tertentu, (ii) jarak antara gerai satu dan yang lain, dan (iii) cara distribusi logistik yang tepat bagi gerai-gerai tersebut.

5. Kemampuan dalam berinovasi dan penyesuaian dengan preferensi pasar yang telah terbukti selama lebih dari 30 tahun

Perseroan secara reguler memperkenalkan menu-menu baru baik yang dikembangkan sendiri secara lokal maupun menu baru dari Pizza Hut global sebagai strategi pembaruan supaya pelanggan tidak jenuh terhadap menu yang tersedia. Sebagai contoh:

- Pada tahun 2003, Perseroan memperkenalkan menu *stuffed crust*, yaitu inovasi pinggiran pizza dengan keju yang sangat diminati hingga saat ini. Sejak saat itu, menu *stuffed crust* terus dikembangkan dengan berbagai pilihan filling selain keju.
- Pada tahun 2005, salah satu bentuk inovasi yang selalu diminati oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuan Perseroan untuk menawarkan menu dengan harga terjangkau yaitu "*Sensasi Delight*" yang dapat dinikmati mulai dari harga Rp39.000.
- Pada tahun 2006, Perseroan memperkenalkan *cheesy bites* pizza, sebuah inovasi pinggiran pizza yang menjadi pilihan favorit konsumen.
- Menu lain yang juga menjadi favorit adalah *salad bar* yang hanya ada di PHR dan lasagna yang diproduksi di *commissary* Perseroan.

Selain menu-menu unggulan tersebut, Perseroan juga menetapkan kebijakan internal perusahaan untuk memperkenalkan menu baru setiap 2 bulan dengan didukung oleh kegiatan pemasaran yang efektif dan menarik. Perseroan juga menyesuaikan beberapa menu makanan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, misalnya menu oriental *chicken* spageti, *oriental chicken rice*, dan lainnya. Perseroan juga mendesain sendiri seluruh gerai restoran Pizza Hut yang dimilikinya secara *in-house* agar lebih sesuai dengan selera pelanggan Indonesia dan sesuai dengan strategi bisnis Perseroan secara umum.

6. Pertumbuhan penjualan yang solid didukung oleh fundamental keuangan yang sehat

Penjualan Perseroan tumbuh 8,08% di tahun 2016 dan 12,31% di tahun 2017. Pertumbuhan ini didukung oleh pembukaan 51 gerai baru serta meningkatkan penjualan

dari masing-masing gerai. Peningkatan penjualan gerai-gerai Perseroan adalah hasil dari pengenalan menu-menu baru yang menarik, peningkatan layanan di gerai PHR maupun di gerai PHD, bertambahnya saluran penjualan yaitu melalui aplikasi *mobile* yang diluncurkan di tahun 2017 dan kerjasama dengan *online* aggregator.

Selain itu, Perseroan memiliki fundamental keuangan yang sehat yang diceminkan melalui *current ratio* sebesar 0,85x, *debt to equity ratio* 1,17x. Penjualan produk makanan dan minuman pada Perseroan secara umum dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan kartu kredit yang memiliki waktu pencairan selama kurang dari seminggu sehingga siklus konversi kas Perseroan sangat positif dalam menunjang pertumbuhan Perseroan.

7. Tim manajemen kunci yang berpengalaman dalam bisnis restoran di Indonesia

Tim manajemen kunci Perseroan memiliki rata-rata pengalaman lebih dari 15 tahun di industri restoran dan merupakan tim yang memiliki dedikasi kuat terhadap Perseroan dengan pemahaman mendalam mengenai Pizza Hut dan kegiatan usahanya. Perseroan percaya bahwa tim manajemen kunci dengan keahlian dan pemahaman yang mendalam dalam kegiatan usaha Perseroan, serta hubungan baik dengan mitra bisnis, pemasok dan pelanggan akan mendukung pertumbuhan dan pengembangan Perseroan di masa depan. Saat ini bersama-sama dengan karyawan lainnya, tim manajemen kunci Perseroan berhasil melakukan pengembangan produk-produk baru, pemasaran yang efektif, dan pembukaan gerai-gerai baru Perseroan yang lebih agresif.

Selain itu, Perseroan juga memiliki tenaga kerja profesional yang berkomitmen tinggi dan berpengalaman di bidangnya, termasuk dalam hal pelayanan konsumen, operasional, pemasaran serta public relation, hingga pengelolaan keuangan restoran. Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC juga memberikan dukungan *transfer knowledge* untuk melengkapi kompetensi internal Perseroan.

Sehingga dengan komitmen dan pengalaman yang dimiliki, tim manajemen kunci dan karyawan Perseroan senantiasa memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja dan pertumbuhan Perseroan, serta mampu menawarkan dan menyajikan produk Pizza Hut yang memberikan kepuasan pelanggan secara optimal.

Perdagangan Eceran Melalui Media

Keunggulan kompetitif dalam pengembangan usaha perdagangan eceran melalui media adalah:

1. Pelayanan kepada konsumen:
Perdagangan eceran melalui media merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan bagi para konsumen sehingga dapat memudahkan dalam memperoleh produk Pizza Hut yang diinginkan hanya dengan menggunakan aplikasi pada *smartphone*.
2. Konsistensi pada harga produk:
Konsumen dapat mengetahui dan memantau harga produk Pizza Hut yang dirilis oleh

website resmi PHR maupun PHD.

3. Menjaga mutu produk:

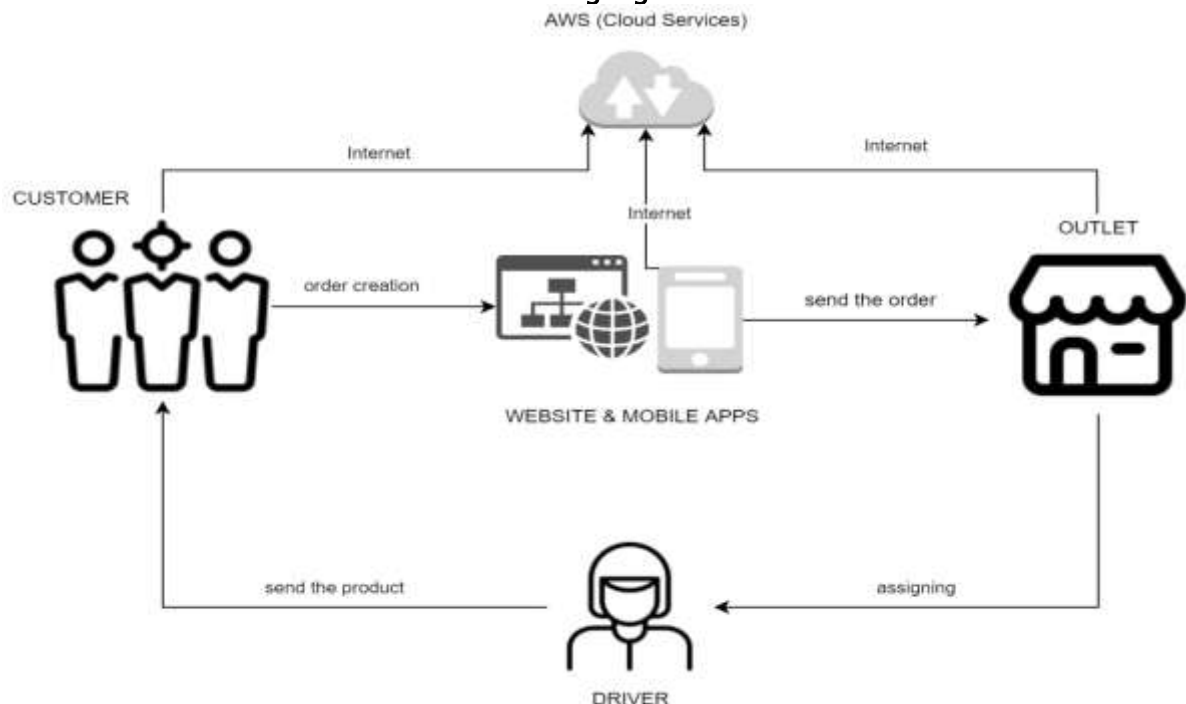
Perseroan menjamin mutu produk Pizza hut yang dipasarkan baik di outlet-outlet maupun yang dipesan melalui media. Perseroan juga berfokus pada '*food-to-go*' dengan menjamin pengantaran pizza dalam waktu 30 menit sejak pesanan dilakukan. Dengan cara ini, pelanggan masih dapat menikmati pizza mereka dalam waktu tunggu yang wajar. PHD menerapkan jangka waktu pengiriman 30 menit ini secara ketat, jika tidak, pelanggan dapat menerima *voucher* pizza gratis.

4. Keunikan produk.

Pizza adalah hidangan gurih dari Italia sejenis adonan bundar dan pipih, yang dipanggang di *oven* dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih. Keju yang dipakai biasanya *mozzarella* atau "keju pizza", bisa juga keju parmesan dan beberapa keju lainnya. Pizza bukan merupakan makanan khas nasional, sehingga keunikan dari produk ini dapat menimbulkan sensasi/motivasi sendiri bagi para penggiat kuliner di Indonesia untuk mencicipi hidangan ini.

Keunikan produk Pizza Hut telah terjaga sebagaimana merek produk/jasa yang ditawarkan oleh Perseroan telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Gambar 5.1 Pola Bisnis Perdagangan Eceran Melalui Media



Sumber: Manajemen Perseroan

5.2 Kemampuan Pesaing untuk Meniru Produk/Jasa

Kemungkinan pesaing untuk meniru produk dalam bidang usaha ini cukup besar, dimana saat ini hampir semua industri sudah menggunakan media *online* dalam aktivitas usahanya. Sehingga para pesaing Pizza Hut juga telah banyak yang telah mengaplikasikan perdagangan produknya melalui media.

5.3 Kemampuan untuk Menciptakan Nilai

Dalam kaitan ini, perusahaan menciptakan nilai konsumen (*customer value*) melalui implementasi strategi, sehingga mampu menciptakan kemenangan di kalangan kompetitor dalam jangka waktu yang panjang. Nilai konsumen telah terealisasi oleh karena Perseroan unggul dalam beberapa faktor sebagai berikut:

1. Spesialisasi

Perseroan merupakan perusahaan penghasil pizza dengan berbagai varian produk makanan yang tidak terbatas pada usia, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian, sehingga dapat dinikmati oleh hampir semua kalangan konsumen.

2. Pengalaman

Perseroan telah berpengalaman di bidang usaha penyedia makanan pizza semenjak didirikannya di Indonesia ($\pm$ 33 tahun).

3. Kecepatan Layanan

Fasilitas yang disediakan Perseroan terkait usaha ini adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, ditunjukkan melalui layanan penjualan melalui media. Hal ini mempermudah konsumen untuk memesan Pizza Hut. Layanan ini juga berimplikasi pada peningkatan kedekatan produk Pizza Hut dengan konsumen, karena adanya interaksi yang didukung oleh kecepatan dalam memperoleh. Hal ini dipahami oleh Perseroan untuk menciptakan suatu kepuasan konsumen, sehingga pihaknya mengupayakan layanan seefisien mungkin bagi para konsumen.

4. Brand Recognition (Pengakuan Merek).

Perseroan memahami pentingnya kekuatan sebuah merek dalam peningkatan loyalitas konsumen. Dalam kaitan ini, kekuatan sebuah merek diindikasikan dapat nilai produk yang dihasilkan, sehingga mampu mempengaruhi keinginan konsumen untuk melanjutkan pembelian. Perseroan memanfaatkan pengalaman yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatan merek. Peningkatan kekuatan merek dikembangkan melalui kedekatan Perseroan dengan konsumennya melalui pemilihan produk dan layanan sesuai kebutuhan konsumen, sehingga perusahaannya dapat lebih dikenal oleh beragam kalangan.

BAB VI
KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN

BAB VI

KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN

6.1 Kebutuhan Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan operasional perusahaan, sangat diperlukan sumber daya manusia yang handal. Hal tersebut juga berperan penting bagi perusahaan untuk menerapkan strategi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tercapainya tujuan dalam perusahaan sangat didukung oleh bagaimana manajemen tersebut dalam menjalankan fungsinya. Setiap manajemen dalam perusahaan perlu mempunyai perencanaan yang matang untuk menjalankan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dalam melaksanakan perencanaan tersebut diperlukan pengorganisasian yang baik.

Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 2 orang karyawan IT dengan kualifikasi Sarjana Komputer. Operasional perdagangan eceran melalui media secara normal dilakukan dalam sehari mengikuti jam operasional pada outlet Pizza Hut. Dengan perdagangan eceran melalui media, konsumen dapat mengakses melalui *Website* atau Aplikasi dengan tujuan membeli dan membayar produk menu Pizza Hut. Perdagangan eceran melalui media tersebut dapat menunjang daya saing dan bertujuan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

6.2 Hak atas Kekayaan Intelektual

Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR-RI yaitu UU No. 20 Th 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan/jasa dalam bidang komersial (*goodwill*).

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sampai dengan tanggal penilaian ini dikeluarkan, Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual atas merk yang didaftarkan yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2028 atas nama Pizza Hut Asia Pasific Holdings LLC dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan diantaranya:

- Kode kelas 29 yang terdiri dari:
Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, selai-selai, manisan-manisan; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan; sari-sari daging; sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng dan acar-acar; telur-telur, susu dan hasil-hasil susu.
Tanggal akhir perlindungan 28 Juli 2028
- Kode kelas 16 yang terdiri dari:
Kertas-kertas, karton; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakasnya); alat-alat tulis-menulis, bahan-bahan perekat (untuk tulis-menulis); alat-alat untuk kesenian; barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat

menjilid buku; gambar-gambar potret; huruf-huruf cetak; klise-klise; mesin-mesin tulis; pensil-pensil.

Tanggal akhir perlindungan 28 Juli 2028

- Kode kelas 30 yang terdiri dari:

Kopi, teh kakao, gula, beras, sagu, bahan pengganti kopi; es; es konsumsi; garam, *mostard*; lada, cuka, saos; madu, *melasse* (tetes); ragi, bubuk untuk membuat roti; rempah-rempah; roti, biskuit, kue-kue dan kembang gula; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum.

Tanggal akhir perlindungan 28 Juli 2028

- Kode kelas 28 yaitu:

Kartu-kartu main.

Tanggal akhir perlindungan 28 Juli 2028

- Kode kelas 43 yaitu:

Jasa penyediaan makanan dan minuman.

Tanggal akhir perlindungan 28 Juli 2028

- Kode kelas 43 yang terdiri dari:

Jasa untuk menyediakan akomodasi sementara (*Services for providing temporary accomodation*); Jasa untuk menyediakan makanan (*Services for providing food*); Jasa untuk menyediakan minuman (*Services for providing drink*).

Tanggal akhir perlindungan 2 November 2022.

- Kode kelas 29 yang terdiri dari:

Daging, ikan unggas dan binatang buruan, buah-buahan serta sayur-sayuran segar, keju, salad, minyak untuk di masak, daging lapisan di atas, ikan lapisan di atas, keju lapisan di atas, buah-buahan lapisan di atas dan sayur-sayuran lapisan di atas untuk pizza, bumbu-bumbu salad

Tanggal akhir perlindungan 30 Juli 2029.

- Kode kelas 30 yang terdiri dari:

Daging, ikan unggas dan binatang buruan, buah-buahan serta sayur-sayuran segar, keju, salad, minyak untuk di masak, daging lapisan di atas, ikan lapisan di atas, keju lapisan di atas, buah-buahan lapisan di atas dan sayur-sayuran lapisan di atas untuk pizza, bumbu-bumbu salad.

Tanggal akhir perlindungan 30 Juli 2029.

- Kode kelas 42 yang terdiri dari:

Jasa restoran, jasa bar makanan kecil, jasa kedai kopi, kantin dan kedai makanan cepat saji; jasa boga; jasa pemesanan makanan melalui jaringan komputer terhubung.

Tanggal akhir perlindungan 30 Juli 2029.

- Kode kelas 30 yang terdiri dari:

Kopi, teh, kakao, beras, tapioka; adonan makaroni atau spaghetti dan bahan-bahan persiapan pasta sebagai hidangan utama; adonan roti pizza, adonan pizza; cuka, saus-saus (bumbu masak seperti garam, lada dan rempah-rempah lain), saus-saus, rempah-rempah dan bumbu-bumbu; madu, ragi, *baking powder*, garam, *mostard*, roti-roti gulung, biskuit-biskuit, roti-roti, kue-kue, pizza; roti-roti tipis pizza; saus-saus pizza; tepung dan bahan-bahan yang terbuat dari gandum, roti, adonan terigu dan gula-gula; es.

Tanggal akhir perlindungan 30 Juli 2029.

- Kode kelas 16 yang terdiri dari:
Kertas, barang-barang kertas, karton, barang-barang karton; alat tulis-menulis; barang-barang cetakan; barang-barang seniman, kuas cat; boneka-boneka, mainan-mainan, mainan anak-anak yang mewah, mainan plastik, mainan berbentuk figur, bola-bola mainan, papan permainan, mainan teka-teki, perlengkapan sulap, perlengkapan ilmu pengetahuan; buku-buku; fotografi; hiasan untuk pohon Natal; kantong kertas; kantong kertas untuk membungkus; kartu mainan; kartu pos; kartu ucapan; kertas bungkus; kertas kartu, kertas bendera, poster-poster, kertas topi; majalah-majalah, penerbitan; materi pengajaran; Pakaian, alas kaki, penutup kepala; Permainan dan benda-benda untuk bermain; peralatan menulis; sapu tangan kertas, pembatas wadah kertas, kertas alas makan; stiker-stiker, dekalkomania, buku mewarnai, buku untuk melukis; undangan-undangan.
Tanggal akhir perlindungan 7 April 2028.
- Kode kelas 36 yang terdiri dari:
Pengumpulan dana untuk amal;
Tanggal akhir perlindungan 15 Mei 2025.
- Kode kelas 43 yang terdiri dari:
Penyediaan makanan dan minuman untuk orang tidak mampu.
Tanggal akhir perlindungan 15 Mei 2025.
- Kode kelas 29 yang terdiri dari:
Daging, ikan unggas dan binatang buruan; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; ekstrak daging; keju-keju; makanan yang diawetkan, dikeringkan, dibekukan, dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang dimasak; minyak untuk memasak; selada-selada, saus-saus selada; telur-telur, susu dan produk-produk susu; topping daging, topping ayam, topping keju, topping buah dan topping sayuran untuk pizza.
Tanggal akhir perlindungan 7 April 2028.
- Kode kelas 29 yang terdiri dari:
Daging, ikan, unggas, ayam yang dimasak, dan ayam yang dibekukan; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; keju untuk taburan di atas pai pizza.
Tanggal akhir perlindungan 7 Oktober 2026.
- Kode kelas 30 yang terdiri dari:
Pizza; hidangan utama pasta siap saji.
Tanggal akhir perlindungan 7 Oktober 2026.
- Kode kelas 43 yaitu:
Jasa Restoran.
Tanggal akhir perlindungan 7 Oktober 2026.

6.3 Faktor Risiko Utama

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah:

- Faktor risiko yang berasal dari luar perusahaan antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik nasional yang dapat berakibat kurang baik dalam dunia usaha pada umumnya. Apabila terjadi penurunan kondisi perekonomian maka akan berdampak

- juga bagi usaha jasa penyediaan makananan sehingga akan mempengaruhi target pendapatan perusahaan;
- Banyaknya kompetitor dam industri yang sama yang telahmenggukan skema perdagangan melalui media harus dapat memotivasi pihak Perseroan untuk menyusun strategi dan sistem pemasaran yang baik, sehingga dapat mencapai target pendapatan yang diharapkan. Sudah menjadi hal yang biasa ketika terjadi persaingan dalam suatu usaha yang dijalankan. Namun perlu dikembangkan ide-ide baru yang inovatif untuk selalu memenangkan persaingan secara sehat. Seperti halnya memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, memberikan harga yang kompetitif, serta cara-cara lain yang bisa menarik para konsumen;
 - Peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan atau dicabut oleh pemerintah pusat atau daerah, baik terkait langsung dengan industri restoran akan turut berpengaruh pada kelangsungan usaha Perseroan;
 - Risiko penetapan harga dimana produk Pizza Hut setidaknya kompetitif terhadap produk yang makanan yang identik ditawarkan oleh kompetitor;
 - Faktor risiko yang datang dari luar Perseroan antara lain yang disebabkan oleh keadaan sosial, ekonomi dan politik baik pada tingkat nasional maupun internasional yang dapat berpengaruh kurang baik dalam dunia usaha pada umumnya. Kondisi sosial ekonomi yang kurang baik dapat menyebabkan adanya kerusuhan sosial. Jika terjadi kerusuhan sosial maka berdampak pada penurunan aktivitas sektor riil terutama berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat, kenaikan biaya dan kenaikan tingkat bunga pinjaman.

6.4 Kapasitas dan Kemampuan Manajemen

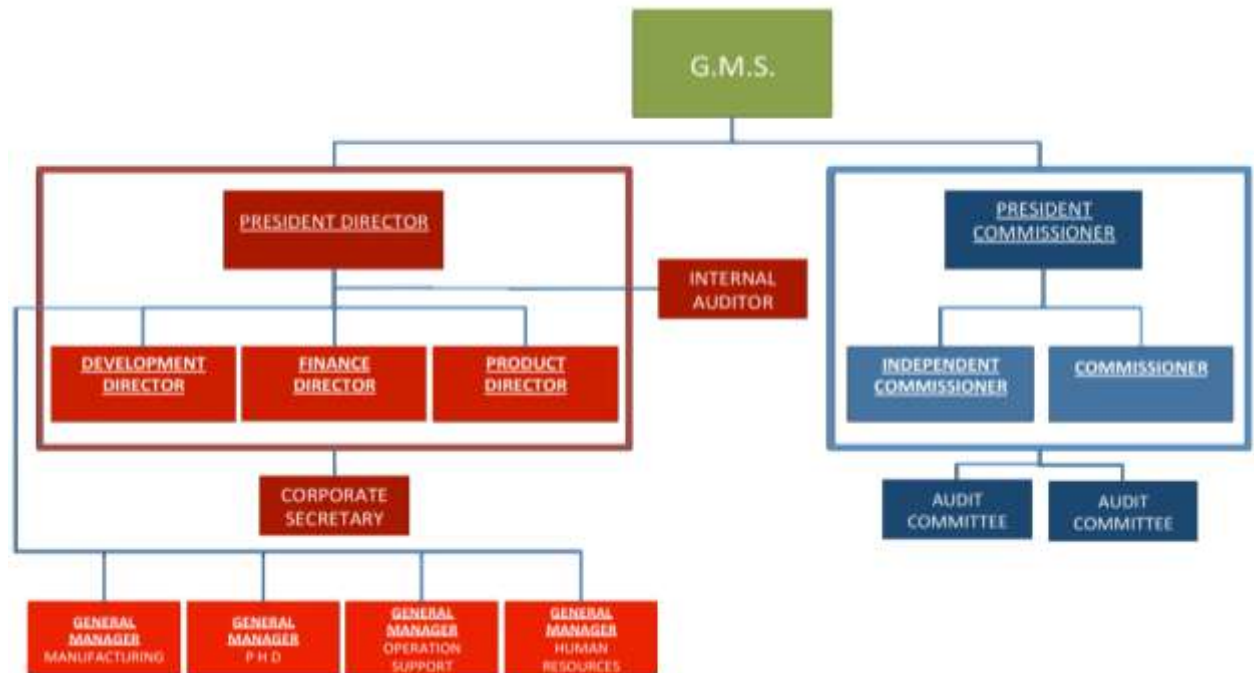
Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama untuk memberi nasihat kepada Direksi apabila diperlukan, dan mengawasi jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 1 tahun terakhir, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi dengan melakukan rapat setiap 2 bulan sekali.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

6.5 Kesesuaian Struktur Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi Perseroan tidak mengalami perubahan setelah dilakukannya pengembangan usaha ini.

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Perseroan Setelah Pengembangan Usaha



Sumber: Manajemen Perseroan

BAB VII

KELAYAKAN KEUANGAN

BAB VII KELAYAKAN KEUANGAN

7.1 Persyaratan Modal dan Strategi Finansial

Perseroan berencana melakukan pengembangan bidang usaha yakni perdagangan eceran melalui media, sehingga nantinya konsumen di Indonesia dapat mengakses melalui *Website* atau Aplikasi dengan tujuan membeli dan membayar produk menu Pizza Hut. Rencana ini merupakan langkah strategis Perseroan untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Kebutuhan biaya untuk operasional perdagangan eceran melalui media adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Kebutuhan Biaya Investasi

Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.000	Total (Rp.000)
I. PRA OPERASI				
1 Perizinan	Ls	1	100.000	100.000
2 Google Credit – Pizza Hut	Ls	1	451.871	451.871
3 AWS Web Maintenance PHR	Ls	1	799.181	799.181
4 AWS Web Maintenance PHD	Ls	1	649.611	649.611
5 Doku Payment System	Ls	1	104.759	104.759
Sub Total				2.105.421
II. MESIN DAN PERALATAN				
1 Komputer (Hardware IT)	Ls	1	40.000	40.000
Sub Total				40.000
Total Investasi				2.145.421

Sumber: Proyeksi Keuangan

7.2 Sumber Pembiayaan Pengembangan Usaha

Sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha Pizza Hut melalui perdagangan eceran melalui media disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.2 Komposisi Pembiayaan (Rp.000)

Keterangan	Total	Sumber Pembiayaan	
	Biaya	Loan	Equity
Investasi	2.145.421	0	2.145.421
<i>Komposisi</i>	100,00%	0,00%	100,00%

Sumber: Proyeksi Keuangan

7.3 Asumsi–Asumsi Proyeksi Keuangan

Jumlah Hari Operasional

Proyeksi keuangan dimulai pada awal tahun 2021 hingga Desember 2025. Jumlah hari operasional diasumsikan sebanyak 365 hari dalam satu tahun.

Penjualan

Proyeksi penjualan Perseroan selama tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3 Proyeksi Penjualan (Rp.000)

Tahun	Penjualan Setelah Pajak	Penjualan Sebelum Pajak	Nilai Penjualan Online
2021	4.140.393.179	3.763.993.799	128.785.388
2022	4.285.306.940	3.895.733.582	133.292.877
2023	4.435.292.683	4.032.084.257	137.958.127
2024	4.590.527.927	4.173.207.206	142.786.662
2025	4.751.196.404	4.319.269.458	147.784.195

Sumber: Proyeksi Keuangan

Total Penjualan Perseroan diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 3,50% per tahun. Dari total penjualan tersebut sebesar 3,42% dari penjualan sebelum pajak adalah diperoleh dari penjualan online.

Struktur Biaya

Biaya Pokok Penjualan

Biaya Pokok Penjualan dalam operasional terinci sebagai berikut

1. Beban Pembelian sebesar 87,50% dari aset.
2. Biaya Karyawan sebanyak 2 orang karyawan IT dengan gaji masing–masing sebesar Rp7.500.000,– per bulan serta tambahan tunjangan hari raya sebesar gaji per bulan.
3. Lembur hari besar nasional sebanyak 13 hari dengan perhitungan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 102 tahun 2004.

Biaya Tetap

Biaya tetap dalam perdagangan eceran melalui media yang dibayarkan setiap tahun adalah sebagai berikut:

1	Google Credit – Pizza Hut	Rp451.871.165,-
2	AWS Web Maintenance PHR	Rp799.181.800,-
3	AWS Web Maintenance PHD	Rp649.611.500,-
4	Doku Payment System	Rp104.759.500,-

Masing-masing biaya tersebut diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 3,50% per tahun.

Beban Usaha

Beban usaha yang dimaksud adalah *Head Office Supervision* yang diproyeksikan sebesar 4,00% dari penjualan.

Pajak

Pajak Restoran (PB1) dikenakan sebesar 10,00% dari penjualan. PB1 dikenakan pada pembeli atau konsumen. Dimana Perseroan memungut dari pembeli dan menyetorkan Pajak Restoran tersebut ke kas negara.

Besarnya tarif pemungutan pajak telah diatur dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah sebesar 10,00%.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, PPh badan tahun 2020 dan 2021 sebesar 22,00%. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar 20,00%.

Perputaran

Perputaran yang digunakan dalam proyeksi terinci sebagai berikut:

- Persediaan bahan baku selama 60 hari;
- Persediaan bahan pembantu selama 30 hari; dan
- Hutang usaha selama 45 hari.

7.4 Proyeksi Laporan Keuangan

7.4.1 Proyeksi Arus Kas

Arus kas Perseroan berasal dari kegiatan operasional yaitu kas masuk berasal dari hasil penjualan dan hasil piutang usaha. Sedangkan kas ke luar adalah untuk membayar beban operasional dan beban usaha serta pajak atas penghasilan badan. Arus kas non operasional berasal dari dana investasi dan modal kerja yang berasal dari modal sendiri.

Tabel 7.4 Laporan Arus Kas (Rp.000)

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
I. ARUS KAS OPERASIONAL						
Arus Kas Masuk						
Penerimaan Penjualan	0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
Penerimaan Piutang Usaha	0	0	0	0	0	0
T o t a l	0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
Arus Kas Keluar						
Pembayaran Kepada Supplier	0	(115.034.424)	(118.997.191)	(120.878.321)	(125.102.167)	(129.487.857)
Biaya Produksi	0	(2.286.391)	(2.375.900)	(2.469.300)	(2.566.789)	(2.668.575)
Biaya Usaha	0	(5.151.416)	(5.331.715)	(5.518.325)	(5.711.466)	(5.911.368)
Pajak Penghasilan Badan	0	(1.457.488)	(1.383.715)	(1.443.143)	(1.504.529)	(1.567.929)
T o t a l	0	(123.929.719)	(128.088.521)	(130.309.089)	(134.884.952)	(139.635.728)
KAS BERSIH DARI OPERASIONAL	0	4.855.669	5.204.356	7.649.038	7.901.710	8.148.467
II. ARUS KAS NON OPERASIONAL						
+ Modal Sendiri KI	2.305.421	0	0	0	0	0
- Investasi	(2.305.421)	0	0	0	0	0
- <i>Capital Expenditures, CAPEX</i>	0	0	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)
T o t a l	0	0	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)
III. SURPLUS (DEFISIT) KAS	0	4.855.669	3.171.439	5.616.121	5.868.793	6.115.550
IV. SALDO KAS AWAL	0	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023
V. KAS TERSEDIA	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023	25.627.572
VI. PEMBAYARAN HUTANG BANK	0	0	0	0	0	0
VII. SALDO KAS AKHIR	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023	25.627.572

Sumber: Proyeksi Keuangan

7.4.2 Proyeksi Laba Rugi

Selama periode proyeksi, Perseroan mengalami peningkatan *profit margin* sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 7.5 Laporan Laba Rugi (Rp.000)

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
PENJUALAN	0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
BEBAN POKOK PENJUALAN	0	(114.973.606)	(119.007.167)	(123.182.662)	(127.505.118)	(131.979.746)
% To Sales		89,28%	89,28%	89,29%	89,30%	89,31%
LABA (RUGI) KOTOR	0	13.811.782	14.285.710	14.775.466	15.281.543	15.804.449
Gross Profit Margin		10,72%	10,72%	10,71%	10,70%	10,69%
BEBAN USAHA	0	(5.151.416)	(5.331.715)	(5.518.325)	(5.711.466)	(5.911.368)
% To Sales		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
LABA (RUGI) USAHA – EBITDA	0	8.660.367	8.953.995	9.257.141	9.570.077	9.893.081
Operating Profit Margin		6,72%	6,72%	6,71%	6,70%	6,69%
BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI	0	(2.035.421)	(2.035.421)	(2.041.427)	(2.047.432)	(2.053.438)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	0	6.624.946	6.918.574	7.215.714	7.522.645	7.839.643
% To Sales		5,14%	5,19%	5,23%	5,27%	5,30%
PAJAK PENGHASILAN	0	(1.457.488)	(1.383.715)	(1.443.143)	(1.504.529)	(1.567.929)
LABA (RUGI) BERSIH	0	5.167.458	5.534.859	5.772.571	6.018.116	6.271.715
Net Profit Margin		4,01%	4,15%	4,18%	4,21%	4,24%

Sumber: Proyeksi Keuangan

7.4.3 Proyeksi Posisi Keuangan

Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasi dibuat untuk melihat posisi keuangan Perseroan pada setiap akhir tahun. Proyeksi Posisi Keuangan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.6 Laporan Posisi Keuangan (Rp.000)

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
ASET						
Aset Lancar						
Kas & Setara Kas	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023	25.627.572
Piutang Usaha	0	0	0	0	0	0
Persediaan	0	18.523.926	19.172.263	19.843.292	20.481.693	21.256.631
T o t a l	0	23.379.595	27.199.371	33.486.522	39.993.716	46.884.203
Aset Tetap						
Harga Perolehan	40.000	40.000	50.130	60.260	70.390	80.519
Akumulasi Penyusutan	0	(10.000)	(20.000)	(32.532)	(47.597)	(65.195)
Nilai Buku	40.000	30.000	30.130	27.727	22.792	15.325
Aset Lain-lain						
Harga Perolehan	2.105.421	2.105.421	4.128.208	6.150.995	8.173.782	10.196.569
Akumulasi Penyusutan	0	(2.025.421)	(4.050.842)	(6.079.736)	(8.112.103)	(10.147.944)
Nilai Buku	2.105.421	80.000	77.366	71.259	61.678	48.625
TOTAL ASET	2.145.421	23.489.595	27.306.867	33.585.508	40.078.187	46.948.153
LIABILITAS & EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Hutang Usaha	0	16.176.716	14.459.129	14.965.199	15.439.762	16.038.013
Utang Lain-lain	0	0	0	0	0	0
T o t a l	0	16.176.716	14.459.129	14.965.199	15.439.762	16.038.013
Liabilitas Jangka Panjang						
Hutang Pemegang Saham	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
Total	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421
Ekuitas						
Modal Saham	0	0	0	0	0	0
Saldo Laba Rugi Ditahan	0	0	5.167.458	10.702.317	16.474.888	22.493.004
Laba Rugi Tahun Berjalan	0	5.167.458	5.534.859	5.772.571	6.018.116	6.271.715
Total	0	5.167.458	10.702.317	16.474.888	22.493.004	28.764.718
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	2.145.421	23.489.595	27.306.867	33.585.508	40.078.187	46.948.153

Sumber: Proyeksi Keuangan

7.5 Analisis Rasio Proyeksi Keuangan

Rasio likuiditas, rasio ini untuk mengetahui sampai seberapa jauh Perseroan dapat melunasi hutang jangka pendeknya, semakin besar rasio yang diperoleh semakin lancar pembayaran hutang jangka pendeknya. Berdasarkan proyeksi keuangan selama periode proyeksi terutama *current ratio* menunjukkan rata-rata sebesar 221,55%. Hal ini berarti setiap Rp1,- hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar Rp2,22.

Rasio leverage, rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kegiatan operasi Perseroan dibiayai oleh modal pinjaman, semakin kecil rasio ini semakin bagus atau lancar. Berdasarkan proyeksi keuangan selama periode proyeksi *total debt to equity ratio* (DER) menunjukkan rata-rata sebesar 105,73%, hal ini berarti setiap Rp1,- modal sendiri digunakan untuk menjamin Rp1,06 hutang. *Total debt to total asset ratio* (DAR) sebesar 47,81%, hal ini berarti setiap Rp1,- aset digunakan untuk menjamin Rp0,48 hutang.

Rasio aktivitas, rasio ini bertujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Perseroan dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Proyeksi keuangan selama periode proyeksi yaitu *total asset turnover* menunjukkan rata-rata 4,24 kali, hal ini berarti setiap Rp1,- aset selama setahun dapat menghasilkan *revenue* sebesar Rp4,24.

Rasio keuntungan, rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaannya, rasio ini terus memberikan keuntungan selama periode proyeksi yang mencapai rata-rata positif 4,16% yang tercermin dari rasio *net profit margin* selama 5 tahun.

7.6 Analisis Kelayakan Proyek

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan perdagangan eceran melalui media dengan menggunakan beberapa parameter seperti:

- **Net Present Value (NPV)**
NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp15.310.101.000,-
- **Profitability Index (PI)**
PI yang diperoleh adalah sebesar 1,92911 yang berarti lebih besar dari 1.
- **Payback Period (PP)**
PP akan diperoleh dalam waktu 11 bulan.
- **Break Even Point (BEP)**
BEP selama periode proyeksi akan dicapai rata-rata pada tingkat pendapatan sebesar Rp70.662.194.000,- atau 51,19% dari rata-rata penjualan.

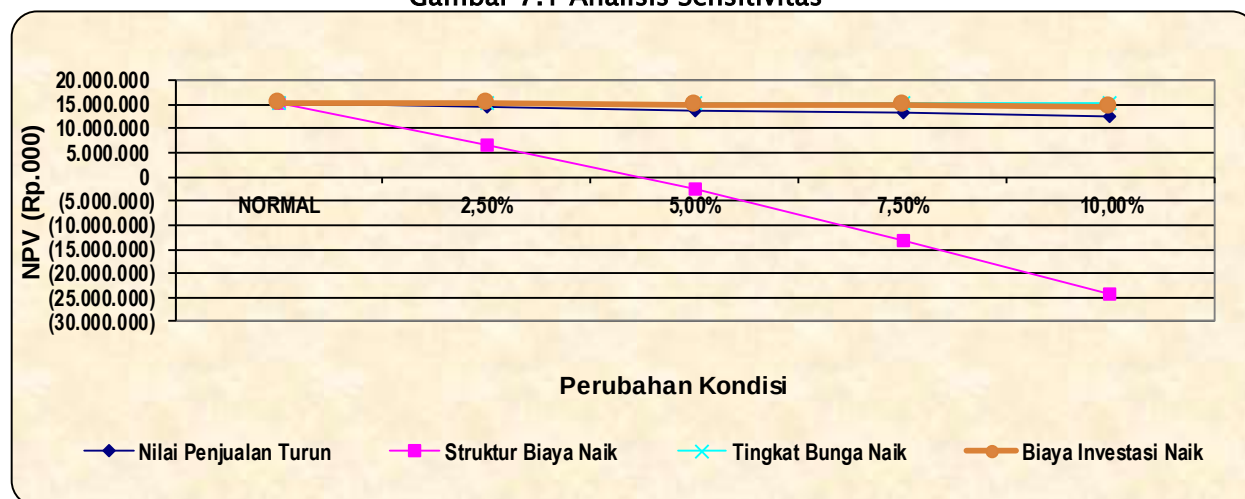
7.7 Analisis Sentivitas

Untuk menguji kepekaan proyek perdagangan eceran melalui media terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya, maka berikut ini disajikan analisis sensitivitas terhadap kelayakan proyek, yaitu :

- Nilai Penjualan Turun dengan perubahan kondisi penurunan sebesar 2,50%, 5,00%, 7,50%, dan 10,00%.
- Struktur Biaya Naik dengan perubahan kondisi kenaikan sebesar 2,50%, 5,00%, 7,50%, dan 10,00%.
- Biaya Investasi Naik dengan perubahan kondisi kenaikan sebesar 2,50%, 5,00%, 7,50%, dan 10,00%.
- *Interest Rate* Naik dengan perubahan kondisi kenaikan sebesar 2,50%, 5,00%, 7,50%, dan 10,00%.

Berdasarkan uji sensitivitas tersebut, kondisi parameter kelayakan perdagangan eceran melalui media akan terlihat seperti pada grafik di bawah ini.

Gambar 7.1 Analisis Sensitivitas



Sumber: Proyeksi Keuangan

Dari empat variabel yang diukur, kenaikan Struktur Biaya merupakan variabel yang sensitif pada kelayakan usaha perdagangan eceran melalui media.

7.8 Kesimpulan

Berdasarkan kajian proyeksi keuangan yang telah dilakukan, dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan dapat terpenuhi maka rencana pengembangan usaha perdagangan eceran melalui media yang direncanakan oleh Perseroan **memberikan kontribusi yang positif dan layak untuk dilaksanakan.**

LAMPIRAN
PROYEKSI KEUANGAN

Keterangan		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		0,50	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
WAKTU OPERASIONAL							
Jumlah Hari Dalam Setahun	hari	184	365	365	365	366	365
Jumlah Hari Kerja Dalam Setahun	hari	184	365	365	365	366	365
Jumlah Bulan Kerja Dalam Setahun	bulan	6	12	12	12	12	12
PENJUALAN							
Penjualan Setelah Pajak	Rp.000	2.000.189.941	4.140.393.179	4.285.306.940	4.435.292.683	4.590.527.927	4.751.196.404
Kenaikan	Growth		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Penjualan Sebelum Pajak	Rp.000	1.818.354.492	3.763.993.799	3.895.733.582	4.032.084.257	4.173.207.206	4.319.269.458
Penjualan Online							
Porsi Penjualan	To Total Sales		3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%
STRUKTUR BIAYA							
Biaya Pokok Penjualan							
Beban Pembelian	To Sales		87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
Biaya Karyawan							
Jumlah karyawan IT	Orang		2	2	2	2	2
Biaya Gaji							
Asumsi kenaikan UMP	Growth			8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Asumsi UMP (DKI Jakarta) ++	Rp.000/Bulan		7.500	8.100	8.748	9.448	10.204
Lembur Hari Besar Nasional							
Jumlah Hari Besar Nasional dalam 1 tahun	Hari		13	13	13	13	13
Nilai Lembur Hari Besar Nasional	Rp.000		15.780	17.043	18.406	19.879	21.469
Tunjangan Hari Raya	Rp.000		15.000	16.200	17.496	18.896	20.407
Biaya Tetap							
		Per Tahun					
1 Google Credit – Pizza Hut	Rp.000	451.871	467.687	484.056	500.998	518.533	536.681
2 AWS Web Maintenance PHR	Rp.000	799.181	827.152	856.102	886.066	917.078	949.176
3 AWS Web Maintenance PHD	Rp.000	649.611	672.347	695.879	720.235	745.443	771.533
4 Doku Payment System	Rp.000	104.759	108.425	112.220	116.148	120.213	124.420
Kenaikan							
Google Credit – Pizza Hut	Growth		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
AWS Web Maintenance PHR	Growth		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
AWS Web Maintenance PHD	Growth		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Doku Payment System	Growth		3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
Beban Usaha							
Head Office Supervision							
Head Office Supervision	To Sales		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
BEBAN BUNGA BANK							
Hutang Bank K1	p.a.	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%
Hutang Bank KMK	p.a.	9,86%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%
TARIF PAJAK							
Pajak Restoran (PB1)		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Pajak Penghasilan Badan		22,00%	22,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TURN OVER							
Persediaan							
Bahan Baku	Hari	60	60	60	60	60	60
Bahan Pembantu	Hari	30	30	30	30	30	30
Piutang Usaha	Hari	0	0	0	0	0	0
Hutang Usaha	Hari	45	45	45	45	45	45

PT SARIMELATI KENCANA, TBK
INDUSTRI : MAKANAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
(Rp.000)

Lampiran 3

Keterangan	Satuan	Volume	Harga Satuan Rp.000	T o t a l (Rp.000)	Realisasi s/d Jun 2020 (Rp.000)	Sisa (Rp.000)	Jadwal Pengadaan & Alokasi Dana Proyek									
							2020				T o t a l	2021				T o t a l
							Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
							Jan s/d Mar	Apr s/d Jun	Jul s/d Sep	Okt s/d Des		Jan s/d Mar	Apr s/d Jun	Jul s/d Sep	Okt s/d Des	
I. PRA OPERASI																
1 Perizinan	Ls	1	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2 Google Credit – Pizza Hut	Ls	1	451.871	451.871	0	451.871	0	0	0	451.871	451.871	0	0	0	0	0
3 AWS Web Maintenance PHR	Ls	1	799.181	799.181	0	799.181	0	0	0	799.181	799.181	0	0	0	0	0
4 AWS Web Maintenance PHD	Ls	1	649.611	649.611	0	649.611	0	0	0	649.611	649.611	0	0	0	0	0
5 Doku Payment System	Ls	1	104.759	104.759	0	104.759	0	0	0	104.759	104.759	0	0	0	0	0
Sub Total				2.105.421	0	2.105.421	0	0	0	2.105.421	2.105.421	0	0	0	0	0
II. MESIN DAN PERALATAN																
1 Komputer (Hardware IT)	Ls	1	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Sub Total				40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Total Investasi				2.145.421	0	2.145.421	0	0	0	2.145.421	2.145.421	0	0	0	0	0
SUMBER PEMBIAYAAN - PRA OPERASI																
a. Pinjaman Bank	0,00%			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Modal Sendiri	100,00%			2.105.421		2.105.421	0	0	0	2.105.421	2.105.421	0	0	0	0	0
Sub Total	100,00%			2.105.421		2.105.421	0	0	0	2.105.421	2.105.421	0	0	0	0	0
SUMBER PEMBIAYAAN - INVESTASI																
a. Pinjaman Bank	0,00%			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Modal Sendiri	100,00%			40.000		40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Sub Total	100,00%			40.000		40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0

PT SARIMELATI KENCANA, TBK

INDUSTRI : MAKANAN

STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE

REKAP RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

(Rp.000)

Lampiran 2

Keterangan	Total		
REKAPITULASI			
I. PRA OPERASI	2.105.421		
II. MESIN DAN PERALATAN	40.000		
Total	2.145.421		
Komposisi Pinjaman			
Investasi	2.145.421	0	2.145.421
Komposisi	100,00%	0,00%	100,00%
Total Biaya Proyek	2.145.421	0	2.145.421
Komposisi	100,00%	0,00%	100,00%

PT SARIMELATI KENCANA, TBK
INDUSTRI : MAKANAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE
PROYEKSI POSISI KEUANGAN
(Rp.000)

Lampiran 4

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
ASET						
Aset Lancar						
Kas & Setara Kas	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023	25.627.572
Piutang Usaha	0	0	0	0	0	0
Persediaan	0	18.523.926	19.172.263	19.843.292	20.481.693	21.256.631
T o t a l	0	23.379.595	27.199.371	33.486.522	39.993.716	46.884.203
Aaset Tetap						
Harga Perolehan	40.000	40.000	50.130	60.260	70.390	80.519
Akumulasi Penyusutan	0	(10.000)	(20.000)	(32.532)	(47.597)	(65.195)
Nilai Buku	40.000	30.000	30.130	27.727	22.792	15.325
Aset Lain-lain						
Harga Perolehan	2.105.421	2.105.421	4.128.208	6.150.995	8.173.782	10.196.569
Akumulasi Penyusutan	0	(2.025.421)	(4.050.842)	(6.079.736)	(8.112.103)	(10.147.944)
Nilai Buku	2.105.421	80.000	77.366	71.259	61.678	48.625
TOTAL ASET	2.145.421	23.489.595	27.306.867	33.585.508	40.078.187	46.948.153
LIABILITAS & EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Hutang Usaha	0	16.176.716	14.459.129	14.965.199	15.439.762	16.038.013
Utang Lain-lain	0	0	0	0	0	0
T o t a l	0	16.176.716	14.459.129	14.965.199	15.439.762	16.038.013
Liabilitas Jangka Panjang						
Hutang Pemegang Saham	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421
T o t a l	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421	2.145.421
Ekuitas						
Modal Saham	0	0	0	0	0	0
Saldo Laba Rugi Ditahan	0	0	5.167.458	10.702.317	16.474.888	22.493.004
Lab a Rugi Tahun Berjalan	0	5.167.458	5.534.859	5.772.571	6.018.116	6.271.715
T o t a l	0	5.167.458	10.702.317	16.474.888	22.493.004	28.764.718
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	2.145.421	23.489.595	27.306.867	33.585.508	40.078.187	46.948.153

PT SARIMELATI KENCANA, TBK
INDUSTRI : MAKANAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE
PROYEKSI LABA RUGI
(Rp.000)

Lampiran 5

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
PENJUALAN	0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
BEBAN POKOK PENJUALAN	0	(114.973.606)	(119.007.167)	(123.182.662)	(127.505.118)	(131.979.746)
<i>% To Sales</i>		89,28%	89,28%	89,29%	89,30%	89,31%
LABA (RUGI) KOTOR	0	13.811.782	14.285.710	14.775.466	15.281.543	15.804.449
<i>Gross Profit Margin</i>		10,72%	10,72%	10,71%	10,70%	10,69%
BEBAN USAHA	0	(5.151.416)	(5.331.715)	(5.518.325)	(5.711.466)	(5.911.368)
<i>% To Sales</i>		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
LABA (RUGI) USAHA - EBITDA	0	8.660.367	8.953.995	9.257.141	9.570.077	9.893.081
<i>Operating Profit Margin</i>		6,72%	6,72%	6,71%	6,70%	6,69%
BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI	0	(2.035.421)	(2.035.421)	(2.041.427)	(2.047.432)	(2.053.438)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Beban Lain-lain	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	0	6.624.946	6.918.574	7.215.714	7.522.645	7.839.643
<i>% To Sales</i>		5,14%	5,19%	5,23%	5,27%	5,30%
PAJAK PENGHASILAN	0	(1.457.488)	(1.383.715)	(1.443.143)	(1.504.529)	(1.567.929)
LABA (RUGI) BERSIH	0	5.167.458	5.534.859	5.772.571	6.018.116	6.271.715
<i>Net Profit Margin</i>		4,01%	4,15%	4,18%	4,21%	4,24%
SALDO LABA (RUGI) AWAL TAHUN	0	0	5.167.458	10.702.317	16.474.888	22.493.004
<i>Adjustment</i>	0	0	0	0	0	0
SALDO LABA (RUGI) AKHIR TAHUN	0	5.167.458	10.702.317	16.474.888	22.493.004	28.764.718

PT SARIMELATI KENCANA, TBK
INDUSTRI : MAKANAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE
PROYEKSI ARUS KAS
(Rp.000)

Lampiran 6

Keterangan	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
I. ARUS KAS OPERASIONAL						
Arus Kas Masuk						
Penerimaan Penjualan	0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
Penerimaan Piutang Usaha	0	0	0	0	0	0
T o t a l	0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
Arus Kas Keluar						
Pembayaran Kepada Supplier	0	(115.034.424)	(118.997.191)	(120.878.321)	(125.102.167)	(129.487.857)
Biaya Produksi	0	(2.286.391)	(2.375.900)	(2.469.300)	(2.566.789)	(2.668.575)
Biaya Usaha	0	(5.151.416)	(5.331.715)	(5.518.325)	(5.711.466)	(5.911.368)
Pajak Penghasilan Badan	0	(1.457.488)	(1.383.715)	(1.443.143)	(1.504.529)	(1.567.929)
T o t a l	0	(123.929.719)	(128.088.521)	(130.309.089)	(134.884.952)	(139.635.728)
KAS BERSIH DARI OPERASIONAL	0	4.855.669	5.204.356	7.649.038	7.901.710	8.148.467
II. ARUS KAS NON OPERASIONAL						
+ Modal Sendiri KI	2.145.421	0	0	0	0	0
- Investasi	(2.145.421)	0	0	0	0	0
- Capital Expenditures, CAPEX	0	0	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)
T o t a l	0	0	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)
III. SURPLUS (DEFISIT) KAS	0	4.855.669	3.171.439	5.616.121	5.868.793	6.115.550
IV. SALDO KAS AWAL	0	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023
V. KAS TERSEDIA	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023	25.627.572
VI. PEMBAYARAN HUTANG BANK						
T o t a l	0	0	0	0	0	0
VII. SALDO KAS AKHIR	0	4.855.669	8.027.108	13.643.229	19.512.023	25.627.572

PT SARIMELATI KENCANA, TBK
INDUSTRI : MAKANAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE
PROYEKSI RATIO KEUANGAN

Lampiran 7

K e t e r a n g a n		2021	2022	2023	2024	2025
		1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
I. <u>RATIO LIKUIDITAS</u>						
Current Ratio		144,53%	188,11%	223,76%	259,03%	292,33%
Quick (Acid Test) Ratio		30,02%	55,52%	91,17%	126,38%	159,79%
Working Capital To Total Assets Ratio		30,66%	46,66%	55,15%	61,27%	65,70%
II. <u>RATIO LEVERAGE</u>						
Total Debt To Equity Ratio	DER	221,21%	112,54%	80,37%	62,67%	51,89%
Total Debt To Total Assets Ratio	DAR	68,87%	52,95%	44,56%	38,52%	34,16%
III. <u>RATIO AKTIVITAS</u>						
Total Assets Turnover	Kali	5,48	4,88	4,11	3,56	3,15
Payable Turnover	Kali	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Collection Period	Hari	45	45	45	45	45
Inventory Turnover(Total)	Kali	6,21	6,21	6,21	6,23	6,21
Average Day'a Inventory	Hari	59	59	59	59	59
Working Capital Turnover	Kali	17,88	10,46	7,45	5,82	4,79
IV. <u>RATIO KEUANGAN</u>						
Gross Profit Margin		9,14%	9,19%	9,23%	9,27%	9,30%
Operating Profit Margin		5,14%	5,19%	5,23%	5,27%	5,30%
Return On Investment, ROI		22,00%	20,27%	17,19%	15,02%	13,36%
Return On Equity, ROE		70,66%	43,08%	31,00%	24,43%	20,29%

PT SARIMELATI KENCANA, TBK
INDUSTRI : MAKANAN
STUDI KELAYAKAN USAHA PENJUALAN ONLINE
ANALISA KELAYAKAN PROYEK
(Rp.000)

Lampiran 8

Keterangan	TOTAL	2020 0,50	2021 1,50	2022 2,50	2023 3,50	2024 4,50	2025 5,50
E B I T D A	46.398.610	0	8.660.367	8.953.995	9.257.141	9.570.077	9.957.031
CASH OUT FLOW							
- Tax	(7.356.803)	0	(1.457.488)	(1.383.715)	(1.443.143)	(1.504.529)	(1.567.929)
- Investment Outlays - New	(2.145.421)	(2.145.421)	0	0	0	0	0
- Capital Expenditure, CAPEX	(8.131.667)	0	0	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)	(2.032.917)
+ / - Working Capital	(5.218.617)	0	(2.347.210)	(2.365.924)	(164.960)	(163.838)	(176.686)
TOTAL	(22.852.509)	(2.145.421)	(3.804.698)	(5.782.556)	(3.641.019)	(3.701.284)	(3.777.532)
NET CASH FLOW	23.546.101	(2.145.421)	4.855.669	3.171.439	5.616.121	5.868.793	6.179.499
Discount Factor	11,55%	0,94681	0,84878	0,76090	0,68211	0,61148	0,54817
DISCOUNTED CASH FLOW	15.310.101	(2.031.316)	4.121.392	2.413.132	3.830.815	3.588.669	3.387.410
P R O C E E D		(2.145.421)	2.710.248	5.881.687	11.497.808	17.366.602	23.546.101
PRESENT VALUE KAS MASUK	31.788.260	0	7.350.741	6.813.050	6.314.392	5.851.942	5.458.135
PRESENT VALUE KAS KELUAR	(16.478.159)	(2.031.316)	(3.229.349)	(4.399.918)	(2.483.577)	(2.263.273)	(2.070.726)
NET PRESENT VALUE, NPV	15.310.101						
PROFITABILITY INDEX, PI	1,92911						
PAYBACK PERIOD, PP	0	Tahun	11	Bulan			
BREAK EVEN POINT, BEP							
Penjualan		0	128.785.388	133.292.877	137.958.127	142.786.662	147.784.195
Variable Cost		0	114.973.606	119.007.167	123.182.662	127.505.118	131.979.746
Fixed Cost		0	7.186.836	7.367.136	7.559.752	7.758.899	7.964.806
BEP			67.012.316	68.739.095	70.585.200	72.497.078	74.477.282
BEP Rata-rata	70.662.194		52,03%	51,57%	51,16%	50,77%	50,40%
BEP Rata-rata (%)	51,19%						
PERHITUNGAN MODAL KERJA							
Piutang Usaha	0	0	0	0	0	0	0
Hutang Usaha	0	0	(16.176.716)	(14.459.129)	(14.965.199)	(15.439.762)	(16.038.013)
Persediaan (Total)	0	0	18.523.926	19.172.263	19.843.292	20.481.693	21.256.631
TOTAL	0	0	2.347.210	4.713.134	4.878.093	5.041.931	5.218.617
+ / - Working Capital		0	2.347.210	2.365.924	164.960	163.838	176.686

Keterangan	PERUBAHAN KONDISI				
	NORMAL	2,50%	5,00%	7,50%	10,00%
1 NILAI PENJUALAN TURUN					
Net Present Value (NPV) - Dalam Rp.000	15.310.101	14.612.931	13.915.760	13.218.589	12.521.419
Return On Investment (ROI)	17,57%	17,37%	17,17%	16,95%	16,72%
Profitability Index (PI)	1,92911	1,90371	1,87732	1,84989	1,82135
Payback Period (PP)	0 Th 11 Bln	0 Th 11 Bln	0 Th 12 Bln	0 Th 12 Bln	1 Th 0 Bln
BEP					
a. Dalam Rp.000	70.662.194	69.671.150	68.687.167	67.710.922	66.743.183
b. Dalam % Terhadap Pendapatan	51,19%	51,76%	52,38%	53,03%	53,72%
2 STRUKTUR BIAYA NAIK					
Net Present Value (NPV) - Dalam Rp.000	15.310.101	6.430.448	(2.449.205)	(13.049.045)	(24.186.699)
Return On Investment (ROI)	17,57%	11,94%	3,09%	-23,36%	-28,10%
Payback Period (PP)	0 Th 11 Bln	1 Th 4 Bln	5 Th 6 Bln	5 Th 6 Bln	5 Th 6 Bln
BEP					
a. Dalam Rp.000	70.662.194	90.898.956	125.603.370	198.921.694	456.115.134
b. Dalam % Terhadap Pendapatan	51,19%	65,85%	90,98%	144,08%	330,30%
3 BIAYA INVESTASI NAIK					
Net Present Value (NPV) - Dalam Rp.000	15.310.101	15.164.016	15.017.931	14.871.846	14.725.761
Return On Investment (ROI)	17,57%	17,47%	17,36%	17,26%	17,16%
Profitability Index (PI)	1,92911	1,91211	1,89541	1,87900	1,86287
Payback Period (PP)	0 Th 11 Bln	0 Th 11 Bln	0 Th 12 Bln	0 Th 12 Bln	0 Th 12 Bln
BEP					
a. Dalam Rp.000	70.662.194	71.139.010	71.615.825	72.092.640	72.569.456
b. Dalam % Terhadap Pendapatan	51,19%	51,53%	51,88%	52,23%	52,57%
4 INTEREST RATE (i) NAIK					
Net Present Value (NPV) - Dalam Rp.000	15.310.101	15.286.371	15.262.690	15.239.057	15.215.473
Return On Investment (ROI)	17,57%	17,57%	17,57%	17,57%	17,57%
Profitability Index (PI)	1,92911	1,92874	1,92836	1,92798	1,92760
Payback Period (PP)	0 Th 11 Bln	0 Th 11 Bln	0 Th 11 Bln	0 Th 11 Bln	0 Th 11 Bln
BEP					
a. Dalam Rp.000	70.662.194	70.662.194	70.662.194	70.662.194	70.662.194
b. Dalam % Terhadap Pendapatan	51,19%	51,19%	51,19%	51,19%	51,19%

